



histma

Jurnal Sejarah

Vol 8, No 1 (2023)

Pengantar Redaksi

Histma, ketika pertama kali ditubuhkan pada 1990-an, tak begitu saja menyerupai bentuknya saat ini. Bersemboyan “Media Mahasiswa Sejarah”, Histma generasi awal justru banyak memuat tulisan-tulisan yang dibuat oleh para sejarawan mumpuni. Para sejarawan tersebut antara lain Sartono Kartodirdjo, Suhartono, Djoko Surjo, Mestika Zed, Sarwono Pusposaputro, Suyatno Kartodirdjo, Hari Poerwanto, Sri Margana, dan Arief Akhyat. Dalam edisi-edisi perdana, Histma kerap mengangkat tema yang kini dianggap klasik dalam historiografi Indonesia, seperti ““Pemuda & Perubahan” (No. 2/II/1992) dan “Ekonomi Rakyat Masa Kolonial” (No. 1/IV/1994). Tema-tema tersebut diejawantahkan ke dalam rubrik-rubrik yang cukup beragam, mulai dari “Tema”, “Akademika”, “Lepas”, hingga “Tokoh”. Di bawah ISSN bernomor 0854-1558, Histma diedarkan seharga Rp1.500,00.

Sayangnya, satu dekade pertama abad ke-21 nyaris tak meninggalkan arsip yang dapat dipelajari untuk memahami transformasi Histma. Beberapa sumber lisan menyebutkan bahwa sejak vakum pada 1990-an, upaya pertama menghidupkan kembali Histma dilakukan pada 2006. Sayangnya, upaya tersebut tak mampu bernapas panjang. Setelah berhasil diterbitkan satu edisi, Histma kembali terbenam dalam kesunyian. Selang lima tahun, Histma diterbitkan kembali dengan format baru pada 2011. Histma tak lagi banyak menerima sentuhan para sejarawan profesional. Histma justru ingin memberi ruang pembelajaran bagi mahasiswa Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sendiri. Upaya perluasan segmentasi dilakukan ketika Histma membuka call for papers untuk mahasiswa FIB UGM pada 2013.

Upaya kedua memberi napas kepada Histma lebih membuahkan hasil. Setelah Vol 1 bertemakan “Modernitas dalam Sejarah Indonesia” diterbitkan pada Juli 2011, Histma berhasil mencatatkan tiga edisi susulan, yakni “Indonesia dan Dunia” (2012), “Wajah Kekerasan Masa Lalu” (2013), dan “Perempuan dan Negara” (2014). Di bawah ISSN bernomor 2301-7155, Histma diedarkan seharga Rp15.000,00 untuk menutup ongkos produksi. Dalam rangka mengupayakan diseminasi pengetahuan, Histma periode pasca-2011 tak hanya membuat tulisan. Histma juga menggelar diskusi tematik dan pemutaran film. Ketika sebuah edisi diterbitkan, peluncuran Histma dilakukan melalui sebuah diskusi sesuai tema edisi terkait. Bahkan, acara peluncuran Histma Vol 2 dimuat di dalam Kompas. Tak hanya itu, Histma mulai merambah dunia media sosial dan laman.

Sayangnya, Histma tak mampu terbit konsisten lebih dari empat nomor. Selama 2016 sampai 2017, Histma kembali vakum. Histma berhasil diterbitkan kembali dengan tema “Anak-Anak dalam Historiografi Indonesia” pada 2017. Edisi ini berusaha menghimpun naskah-naskah melalui mekanisme call for papers. Setelah itu, meskipun sejumlah diskusi terus diadakan, Histma tak kuasa menerbitkan satu edisi pun selama empat tahun. Usai absen dari dunia penerbitan sampai pertengahan pandemi COVID-19, Histma diterbitkan kembali pada 2021. Bertemakan “Migrasi dan Diaspora”, Histma Vol 6 menghimpun ringkasan dari naskah-naskah skripsi S-1 Departemen Sejarah UGM. Sebuah edisi berformat hampir serupa diterbitkan dengan tema “Alam dan Manusia dalam Tiga Abad” pada 2022. Histma pasca-2021 diedarkan seharga Rp30–35.000,00.

Menimbang kebutuhan pembaca, kemampuan mahasiswa, dan transformasi digital, Histma melakukan reorientasi pada 2023. Histma berusaha mengoptimalkan fungsinya sebagai gelanggang pembelajaran pertama publikasi ilmiah mahasiswa dan media diseminasi pengetahuan sejarah. Itu sebabnya Histma mulai merintis versi open journal system yang dapat diakses secara bebas. Sebagai jurnal ilmiah, Histma diterbitkan dua kali dalam satu volume. Nomor pertama sebuah volume berisi naskah-naskah yang ditulis oleh mahasiswa Departemen Sejarah UGM hasil mata kuliah Metode Sejarah dan Praktik Penulisan Sejarah. Sementara itu, nomor kedua akan dibuka call for papers secara tematik bagi mahasiswa peminat sejarah dari S-1 dan Diploma di seluruh Indonesia.

Redaktur Pelaksana

DARI “DIMAKAN BUAYA” SAMPAI “MELAWAN TAKDIR” PENOLAKAN VAKSINASI CACAR AIR DAN CACAR SAPI DI JAWA PADA ABAD XIX

Aldiza Syifa Maura Pramudhita

aldiza.syifa1202@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Penyakit cacar air (*Variola major*) dan cacar sapi (*Varicela major*) adalah penyakit yang banyak menyerang penduduk Hindia Belanda pada abad XIX. Kedua penyakit ini sering dianggap sebagai penyakit endemik dan sudah hidup bersama masyarakat. Pada akhir abad XVII, virus cacar bermutasi menjadi lebih kuat dan lebih mematikan. Untuk mencegah hal persebaran virus cacar air dan cacar sapi semakin meluas, Pemerintah Belanda di Den Haag menyatakan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai wabah penyakit cacar ini. Proses penelitian dan pengembangan vaksin dilakukan. Berbagai cara digunakan untuk mendistribusi vaksin yang diciptakan di Belanda untuk dibawa ke Jawa. Namun efektivitas vaksin masih dipertanyakan karena ada beberapa kasus penderita cacar kembali terserang penyakit yang sama meskipun telah divaksinasi. Berdasarkan surat kabar sezaman, penelitian ini menemukan berbagai respons penolakan terhadap vaksinasi, mulai dari tersebarnya berita miring mengenai vaksinasi hingga konspirasi pemusnahan etnis tertentu. Semua hal ini terakumulasi dan menjadi tantangan bagi pemerintah Hindia Belanda.

Kata Kunci

Cacar air;
Wabah;
Mutasi;
Vaksinasi;
Penolakan

Abstract

Smallpox (*Variola major*) and cowpox (*Varicela major*) were endemic diseases that afflicted the population of the Dutch East Indies in the 19th century. In the late 17th century, the smallpox virus underwent a mutation, resulting in a more severe and deadly form of the disease. In response, the Dutch Government in The Hague mandated further research to tackle the smallpox outbreak. Vaccine research and development were undertaken, and various methods were employed to transport the vaccine from the Netherlands to Java. However, the efficacy of the vaccine remained questionable, as some vaccinated individuals still contracted smallpox. This raised concerns and created unrest within the community. Based on contemporary newspapers, this research discovered various forms of vaccine rejection, ranging from the spread of negative news about vaccination to conspiracy theories about the targeting of certain ethnic groups for eradication. All of these factors accumulated and posed challenges for the Dutch East Indies government.

Keywords

Smallpox;
Outbreak;
Mutation;
Vaccination;
Rejection

Pendahuluan

Wabah penyakit bukanlah hal yang asing bagi Indonesia. Di era pemerintahan kolonial Belanda permasalahan wabah penyakit menjadi momok yang ditakuti. Dari sekian banyak penyakit yang menyerang Hindia Belanda pada masa itu, terdapat penyakit yang menjadi sorotan pemerintah Belanda yaitu cacar air (smallpox) dan cacar sapi (cowpox). Kedua penyakit tersebut disebabkan oleh dua virus yang berbeda. Cacar air adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus *Varicella zoster*, spesies virus variola yang merupakan pathogen paling tua dan mematikan (Mark dan Hanifin, 2004: 263). Virus ini menyebabkan ruam merah yang kemudian berkembang menjadi kantung-kantung berisi cairan. Cairan ini apabila pecah dapat menyebarkan virus yang tidak dormant ke area tubuh lain, bahkan dapat menularkan virus kepada orang lain yang sistem imunnya rendah. Sedangkan, untuk penyakit cacar sapi atau cowpox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang ber genus *Orthopoxvirus*, genus yang sama dengan virus *Variola* tetapi bersifat lebih pasif dan tidak lethal. Meskipun demikian, tingkat penyebarannya sama-sama cukup tinggi.

Diperkirakan bahwa penyakit ini sudah dibawa oleh penjelajah dan pedagang yang sering singgah atau mampir di Indonesia. Mengingat bahwa posisi Indonesia pada saat itu terletak di antara jalur perdagangan yang menghubungkan India, Cina dan Arab, sangat masuk akal apabila penyakit-penyakit menular mudah sekali menjangkiti penduduk pribumi. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya penyakit cacar dari virus genus *Orthopoxvirus* sudah berada ditengah-tengah masyarakat jauh lebih lama sebelum zaman perdagangan. Menurut catatan dari penjelajah Eropa, penyakit cacar (baik smallpox maupun cowpox) sudah dikenal masyarakat awam secara luas dan masuk ke dalam cerita-cerita mitos yang berkembang di daerah masing-masing (Neelakantan, 2010: 62). Bahkan dari catatan perjalanan milik Portugis, masyarakat lokal yang pertama kali ditemui oleh Portugis justru memberitahu adanya kutukan yang menyebabkan munculnya bintil-bintil berisi cairan di sekujur tubuh (merujuk kepada penyakit cacar). Wabah cacar air muncul dalam periode waktu tertentu kemudian menghilang untuk beberapa lama dan selalu kembali lagi dengan tingkat korban jiwa semakin bertambah pada tiap periode kemunculannya.

Penyakit cacar air dalam Bahasa Belanda disebut *kinder pokken* atau *kinder ziekte* (penyakit anak-anak). Penamaan ini bukan tanpa alasan yang jelas. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan virus untuk menyerang anak-anak (terutama balita) yang memiliki imunitas cukup lema (Boomgaard, 2003: 591). Ditambah lagi dengan lingkungan hidup mereka yang tidak higienis, sangat memungkinkan untuk terjadinya transfer serta mutasi virus. Namun kenyataannya, di awal abad XVIII, banyak sekali korban jiwa yang berjatuh bukan hanya dari kalangan anak-anak melainkan orang dewasa juga turut terjangkit. Lebih mencengangkan lagi, anak-anak dan orang dewasa yang terjangkit tidak lagi hanya berasal dari kawasan kumuh dengan tingkat higienitas rendah, melainkan juga kepada mereka yang tinggal di kawasan elit.

Tercatat beberapa keturunan raja (salah satu keluarga Sultan Kanoman) satu persatu mulai menjadi korban keganasan virus cacar air dan cacar sapi. Fenomena serupa juga terjadi di Eropa, yaitu terjadi lonjakan cukup tinggi mengenai kematian dari keturunan aristokrat (Pradjoko, 2021: 129). Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan semakin bervariasinya latar belakang korban yang terjangkit cacar air membuktikan teori bahwa proses mutasi sebuah virus itu nyata adanya.

Selain proses mutasi yang memperparah dampak dari cacar air dan cacar sapi, faktor dari luar juga turut mendukung masifnya penyebaran virus cacar ini. Dalam catatan dari Boomgard tercatat bahwa penyebaran sebuah penyakit tidak hanya bergantung pada proses mutasi virus saja, akan tetapi didukung oleh faktor eksternal seperti ketersediaan makanan, tingkat aktivitas manusia, dan adanya perbedaan kondisi geografis (Boomgaard, 2003: 592). Meskipun pada akhirnya vaksin untuk cacar air dan cacar sapi berhasil dikembangkan oleh Edward Jenner pada 1798, efektivitasnya masih dipertanyakan. Hal tersebut disebabkan adanya pasien yang kembali terjangkit cacar air meski sebelumnya sudah divaksin. Hal ini kemudian memantik permasalahan lain yaitu munculnya rasa ragu dan tidak percaya publik terhadap vaksinasi yang digaungkan oleh pemerintah.

Tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai bentuk penolakan masyarakat terhadap vaksinasi cacar air dan cacar sapi yang ada di Pulau Jawa. Siapa saja yang menolak vaksinasi? Apa dampak dari penolakan ini terhadap vaksinasi dan pengembangan vaksin tahap awal di Pulau Jawa? Tulisan ini akan menggunakan periode tahun 1804 dan berakhir pada 1879. Hal ini disebabkan vaksin sedang masif didistribusikan dari Belanda pada 1804. Sementara itu, kasus cacar air perlahan menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi sudah meningkat pada 1879.

Sedangkan alasan pemilihan penolakan terhadap vaksinasi disebabkan adanya pola serupa yang terjadi selama pandemi COVID-19 berlangsung, yaitu ada beberapa golongan masyarakat yang terkesan menyepelkan bahkan skeptis terhadap vaksinasi. Tulisan ini juga akan meninjau pada artikel Persebaran Penyakit di Kawasan Laut Jawa Abad XIX - XX dari Jurnal Diakronika karya Didik Pradjoko dan Imas Emalia. Tulisan ini berfokus kepada jenis-jenis penyakit yang tersebar di Pulau Jawa dan bagaimana pemerintah pada saat itu merespons dengan mengeluarkan kebijakan tertentu.

Awal Pembuatan Vaksin

Sebelum ditemukannya vaksin yang cukup efektif oleh Edward Jenner pada 1798, penanganan cacar (baik cacar air maupun cacar sapi) dilakukan dengan prosedur variolasi¹. Prosedur ini membutuhkan beberapa tubuh sehat sebagai inang virus aktif (Jaklenec, 2021: 10). Hal selanjutnya adalah menunggu reaksi yang diberikan oleh sistem kekebalan tubuh dari inang untuk memproduksi individual immunity. Penanganan seperti ini sangat sering dilakukan di abad XVIII. Akan tetapi, metode ini sering menemui kegagalan.

Pada 1779, salah satu dokter di Batavia yang melakukan metode variolasi adalah dr. J. Van der Steege. Dr Steege melakukan beberapa uji coba prosedur variolasi kepada 100 orang pasien penderita cacar air dan cacar sapi. Praktek ini berjalan cukup lancar sampai suatu saat 8 orang anak meninggal setelah di variolasi. Setelah diteliti lebih lanjut, diketahui bahwa korban jiwa (terutama anak-anak) yang meninggal disebabkan ketidakmampuan tubuh mereka untuk memproduksi sistem imunitas yang dapat mengimbangi laju infeksi dan mutasi virus cacar (Schout, 1937: 95).

Kegagalan metode variolasi pada saat itu mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mencari alternatif lain dalam menanggulangi laju penyebaran cacar air dan cacar sapi. pada 1798 seorang ilmuwan bernama Edward Jenner berhasil melakukan inokulasi pada virus aktif cacar (variola virus) yang dengan kurun waktu setahun setelah keberhasilan inokulasinya menghasilkan vaksin layak guna (Harris, 1915: 66). Pada saat itu pemerintah Belanda merasa langkah vaksinasi jauh lebih aman dibandingkan penyuntikan virus aktif cacar air atau cacar sapi ke tubuh yang sehat untuk dipanen antibodinya. Maka dari itu pemerintah Belanda segera memerintahkan pemerintah Hindia-Belanda untuk melakukan vaksinasi tahap pertama.

Namun, lagi-lagi tantangan muncul disaat vaksin yang dibuat di Den Haag hendak didistribusikan ke Hindia Belanda. Proses distribusi dari Den Haag ke Batavia juga cukup panjang yaitu mulai dari pusat pengembangan vaksin di Jenewa kemudian dikirim ke Baghdad dan Basrah (Irak), lalu ke India. Dari India inilah vaksin kemudian didistribusikan ke Isle de France dan diteruskan ke Batavia (Wisnuwardhana, 2016: 7). Hal ini dikhawatirkan membuat efektivitas vaksin berkurang disebabkan sel-sel dormant yang berada di dalam vaksin aktif menjadi rusak dan mati. Padahal sel-sel dormant ini berperan penting dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh pasien yang terkena cacar sapi dan cacar air. Namun, pemerintah berpacu dengan waktu dan penyebaran virus yang semakin menyebar ke seluruh Hindia Belanda. Johannes Siberg, yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, mengambil keputusan

1 Variolasi adalah praktik yang digunakan untuk melindungi seseorang dari cacar air dengan cara menyuntikan partikel virus cacar air aktif ke dalam tubuh penderita.

untuk mengirim anak-anak dari panti asuhan (sumber lain mengatakan anak-anak terlantar di kota Batavia) ke Belanda (Neeklantén, 2010: 63). Anak-anak ini nantinya akan langsung diinjeksikan dengan vaksin yang stabil dan dibawa kembali ke Hindia Belanda.

Diberangkatkanlah 40 anak ke Belanda menggunakan kapal pada 1804 (Neelantén, 2010: 63). Sesampainya di Den Haag, mereka langsung disuntikkan dengan vaksin cacar air dan vaksin cacar sapi. Setelah itu anak-anak tadi diisolasi selama 5 hari (Braudel, 1992: 321). Tujuannya agar mereka tidak melakukan kontak langsung dengan orang-orang yang berpotensi menurunkan atau malah menggagalkan pembentukan antibodi anti cacar di dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka kembali dibawa pulang ke Hindia untuk diisolasi kembali sebelum akhirnya antibodi mereka diambil oleh para dokter dan disimpan dalam kapsul-kapsul yang telah disterilkan. Setelah itu, vaksin dari anak-anak tadi (living vaccine) didistribusikan ke orang-orang yang terkena cacar air.

Orang-orang yang divaksinasi untuk tahap ini adalah orang-orang yang sering berkontak dengan orang Eropa seperti para pedagang dan pekerja di pelabuhan. Ini ditujukan agar orang Eropa tidak terkena virus cacar yang dibawa oleh para pribumi yang bekerja untuk mereka. Hal ini terjadi karena orang Eropa masih menganggap bahwa orang pribumi adalah carier aktif virus cacar air dan cacar sapi.

Untuk beberapa waktu, proses vaksinasi ini terlihat menjanjikan. Tingkat penyebaran cacar air dan cacar sapi sedikit menurun. Laporan kasus yang biasanya sehari hampir 10 kasus, berkurang menjadi kurang dari 8 per harinya (Boomgaard, 2003: 601). Setelah adanya injeksi vaksin inkubasi hasil dari living vaccine banyak orang yang tidak terpapar cacar air ataupun cacar sapi. Ini artinya pembentukan herd immunity sudah mulai terbentuk secara perlahan. Antibodi dari orang-orang yang sudah diinjeksikan vaksin ke dalam tubuhnya berperan melindungi orang-orang di dalam komunitasnya.

Permasalahan muncul pada 1804 ketika dokter-dokter yang bertugas untuk mendistribusikan vaksin cacar air tidak cukup banyak. Meskipun di Batavia kasus penularan cacar sapi dan cacar air sudah perlahan melandai, akan tetapi di luar Batavia memiliki cerita yang berbeda. disebabkan dokter yang menangani juga terbatas, daerah di luar Batavia tidak memiliki akses yang banyak untuk mendapatkan vaksin dengan baik. Tidak hanya itu, alhasil laju penyebaran cacar air masih stagnan dan bahkan di beberapa daerah seperti Semarang dan Surabaya sedikit mengalami lonjakan (Boomgaard, 2003: 605).

Pemerintah Hindia Belanda lagi-lagi dipaksa untuk memutar otak untuk melawan virus cacar air dan cacar sapi yang semakin merebak. Hal ini disebabkan persentase penyebaran virus dari yang awalnya hanya berpusat di anak-anak dan balita, kini merebak ke orang dewasa. Jelas saja jika tidak diatasi dengan segera, pengaruh wabah cacar air dan cacar sapi ini dapat mempengaruhi aspek ekonomi dan merambah ke aspek lainnya.

Akhirnya, Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengambil langkah yang sebelumnya pernah dipertimbangkan namun

bagi mereka cukup riskan untuk diambil. Mereka mendatangkan vaksin-vaksin yang sudah stabil dari Belanda untuk didistribusikan ke Batavia. Kekhawatiran mengenai turunnya kualitas vaksin karena paparan suhu dan kelembaban yang tidak beraturan di perjalanan perlahan hilang. Vaksin-vaksin ini sudah diberi stabilizer berupa pipa kapiler yang bersifat sebagai pelindung vaksin (Neelakantan, 2010: 69). Pipa kapiler ini dimasukkan ke dalam kontainer yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga mampu menstabilkan vaksin cacar air dan cacar sapi stabil dalam jumlah banyak.

Di pertengahan abad XIX, pemerintah Hindia Belanda berhasil mendatangkan vaksin cacar air dan cacar sapi langsung dari Belanda untuk pertama kalinya (Neelakantan, 2010: 69). Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata substansi di dalam vaksin masih aktif dan stabil. Hal ini menandai keberhasilan dan kemajuan pemerintah Hindia Belanda dalam menanggulangi penyebaran wabah cacar air dan cacar sapi. Segera pemerintah mendistribusikan vaksin-vaksin yang baru datang dari Belanda tadi untuk menambah pasokan vaksin yang sudah beredar di masyarakat. Puncaknya pada 1870, didirikan badan-badan yang bertugas untuk menerima pasokan vaksin langsung dari Belanda (Bataviaasch Handelsblad, 25 April 1870). Badan-badan ini tidak hanya berada di Batavia saja, tetapi juga tersebar di beberapa kota di Jawa seperti Semarang dan Surabaya. Di Semarang sendiri, bahkan sudah memiliki donator yang berasal dari orang Eropa langsung. Hal ini memudahkan proses distribusi vaksin stabil dari Belanda (De Locomotief, 14 Desember 1870). Setidaknya ada empat kota di Belanda yang rajin mensuplai vaksin cacar air dan cacar sapi ke Batavia, yaitu Rotterdam, Utrecht, Den Haag dan Amsterdam. Badan kesehatan dari empat kota tersebut secara rutin mengirimkan vaksin-vaksin stabil ke Batavia bahkan dengan periode yang lebih cepat, yaitu 2-3 bulan sekali.

Semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi tak lama setelah berhasilnya vaksin-vaksin yang didistribusikan dari Belanda muncul permasalahan baru. Pasien yang sudah mendapatkan vaksinasi karena pernah terpapar cacar air justru kembali terjangkit. Hal tersebut juga terjadi pada pasien yang terjangkit cacar sapi, setelah mendapatkan vaksinasi tak lama kemudian malah terjangkit cacar air (Polak, 1974: 2). Jika ditilik dari dunia medis modern, hal ini memang bisa saja terjadi. Alasan yang paling memungkinkan adalah mutasi virus yang cukup cepat tidak diiringi dengan meningkatnya system kekebalan tubuh penderita. Namun, mengingat periode tersebut masih minim informasi tentang daur hidup virus, hal tersebut, malah memancing rasa tidak percaya publik kepada pemerintah.

Keraguan Terhadap Vaksin

Vaksin yang pertama dikirimkan melalui metode “living vaccine” dari Belanda memiliki banyak kelemahan dibandingkan vaksin stabil yang didatangkan langsung dari Belanda. Tidak hanya itu, vaksin yang datang pada 1804 ini dianggap kurang mampu menahan laju penyebaran cacar

air dan cacar sapi. Selain itu, di beberapa kasus juga terjadi kematian pasca vaksinasi.

Jika ditilik lebih lanjut, kegagalan ini tidak hanya terletak pada vaksinnya, akan tetapi juga terletak pada tenaga kesehatan yang ada pada saat itu. disebabkan terbatasnya jumlah lulusan dokter dan adanya jarak sosial antara dokter dan penduduk pribumi, maka pemerintah Belanda mulai melatih beberapa penduduk pribumi yang terpandang untuk menjadi mantri cacar atau juru cacar.

Mantri cacar ini mendistribusikan vaksin hingga ke bagian-bagian pelosok di Pulau Jawa. Sedangkan mantri cacar inilah yang secara langsung melawan narasi-narasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin dan perlahan merubahnya menjadi sebuah kepercayaan masyarakat (Sciortino, 1999: 193). Untuk itu, pendekatan yang dilakukan harus lebih intens. Para tenaga kesehatan tidak bisa lagi muncul beberapa saat lalu pergi dan menghilang (tidak berkunjung ke desa yang divaksinasi lagi). Jika itu terjadi, hal itu justru akan membuat kondisi sosial masyarakat pedesaan semakin jauh dari mantri cacar.

Biasanya para mantri cacar dan jajaran tenaga kesehatan lainnya akan menetap sementara di desa yang akan divaksinasi. Awalnya, tinggal menetap untuk sementara ini tidak diwajibkan. Namun pada 1820, dikeluarkan Reglement voor den Burgelijke Geneeskundige Dienst (Peraturan mengenai BGD) yang disusul dengan dikeluarkan Reglement op de uitoefening der koepokvaccinatie in Nederlandsch-Indie (Peraturan Pelaksanaan Vaksinasi cacar) (Papers, 1975: 104). Selain diharuskan tinggal, mantri cacar beserta jajaran tenaga kesehatan yang turut membantu juga diwajibkan menulis laporan tiga kali pada tiap minggu untuk selanjutnya dilaporkan kepada bupati setempat.

Vaksin memang semakin dekat dengan penduduk pribumi yang tinggal di desa. Akan tetapi tetap ada resistensi dari beberapa penduduk. Kunci dari keberhasilan sebuah vaksin pada era itu adalah ketersediaan orang tua mengantarkan anaknya untuk divaksinasi. Beberapa resistensi sempat terjadi. pada 1831, para orang tua di Madiun tidak mau mengantar dan menolak anaknya untuk divaksinasi (Loedin, 2005: 167). Setelah ditelisik, hal ini disebabkan adanya narasi bahwa pengumpulan anak-anak untuk divaksinasi sebenarnya hanya akal bulus kepala residen supaya anak-anak tadi bisa dijadikan makanan buaya. Sontak hal ini membuat suasana tidak kondusif disebabkan para orang tua ini segera membawa kabur anaknya untuk bersembunyi jauh di kedalaman hutan. Hal ini jelas membuat suasana tidak kondusif dan membuat mantri cacar semakin kelimpungan. Pasalnya jika anak-anak yang menjadi target utama vaksinasi justru kabur dan tidak mau divaksinasi, kemungkinan virus cacar air dan cacar sapi menjangkiti banyak orang di Madiun sangat besar. .

Tidak hanya Madiun, resistensi ini juga terjadi di desa-desa pelosok di Surabaya dan Semarang. Berbeda dengan di Madiun, resistensi di Surabaya dan Semarang ini terjadi karena adanya pengaruh dari tetua adat dan pemuka agama di daerah setempat (Loedin, 2005: 167). Pada 1837, para orang tua di Surabaya terpengaruh perkataan

pemuka agama dan pejabat lokal yang menyatakan bahwa melakukan vaksinasi kepada anak sama saja melawan takdir Tuhan. Di Semarang juga muncul narasi bahwa wabah yang terjadi (cacar air dan cacar sapi) adalah cara Tuhan memperingatkan manusia. Melakukan vaksinasi sama saja melawan dan sombong kepada Tuhan.

Pejabat lokal yang mendapatkan edukasi langsung dari pemerintah juga tidak membantu banyak. Anehnya sebagian dari mereka justru menjadi agen penghambat penyebaran vaksin. Ini terjadi karena mereka juga turut menyebarkan narasi yang tidak benar mengenai vaksin. Para pejabat lokal berkata bahwa vaksinasi itu sia-sia karena nantinya bisa terjangkit dan tertular lagi bahkan meninggal.

Ada juga resistensi dari masyarakat dengan alasan yang lebih rasional. Beberapa orang di Surabaya dan Batavia menolak divaksinasi karena keraguan mereka pada manfaat vaksin itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa vaksin merupakan hal baru dan mereka masih ragu terhadap efektivitas vaksin (Loedin, 2005: 168). Asumsi yang sering dilontarkan oleh masyarakat dengan bentuk resistensi seperti ini adalah, bagaimana jika vaksin melakukan hal sebaliknya? Bukan membentuk antibodi melainkan memperburuk antibodi bawaan yang sudah ada di dalam tubuh.

Ketakutan-ketakutan masyarakat diatas bukan sekedar omong kosong. Meskipun tidak terjadi secara langsung di periode yang sama, ketakutan mereka justru menjadi kenyataan di saat vaksin stabil sudah lebih mudah didapatkan. Pada 1879 muncul kasus seorang pasien (seorang pedagang pribumi) yang sudah memiliki catatan terpapar cacar air kembali terjangkit (Bataviaasch Handelsblad, 10 Oktober 1879). Hal ini dapat terdeteksi karena sang pasien adalah pedagang yang terdaftar dan hendak memasuki area Batavia.

Tidak hanya berhenti sampai di sana, di Batavia, sekitar 7 anak berusia di bawah sepuluh tahun (anak-anak berusia sekolah awal) yang sebelumnya terpapar cacar sapi justru terpapar cacar air setelah divaksinasi (Bataviaasch Handelsblad, 15 Maret 1879). Perlu diingat meskipun penyebab cacar sapi dan cacar air hampir mirip, tetapi cacar air adalah versi lethal dari cacar sapi. Tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua, terutama mereka yang awam terhadap ilmu medis/ilmu kesehatan.

Seketika muncul narasi-narasi miring mengenai vaksinasi. Narasi yang pertama mencuat adalah dugaan bahwa vaksin yang dibawa/didistribusikan pada periode itu sudah rusak dan tidak layak untuk dipakai (Neelakantan, 2010: 69). Menurut orang-orang yang mulai ragu pada vaksinasi, vaksin yang disuntikkan kepada mereka bukan lagi vaksin stabil melainkan vaksin yang substansi dormannya sudah mati.

Narasi keraguan terhadap vaksin seakan tidak pernah mati. Pada 1890, Semarang dilanda bencana alam dan banyak sekali wabah penyakit seperti malaria, kolera dan cacar air. Selain itu, Semarang juga dilanda banjir serta kekeringan. Hal ini menyebabkan masyarakat pada saat itu mengalami kekurangan bahkan kelangkaan pangan. Ketika

krisis pangan di Semarang terjadi di saat yang bersamaan dengan gelombang pertama menyebarnya wabah cacar, hal ini menyebabkan efek domino yang tidak hanya mengakibatkan semakin merebaknya penyakit cacar, tetapi juga narasi-narasi resistensi terhadap vaksin kembali bergaung. Kali ini narasi yang tersebar berasal dari tetua adat yang menyatakan bahwa vaksinasi mengundang murka Tuhan (Loedin, 2005: 169).

Respons terhadap Resistensi Masyarakat

Jika dicermati lebih jauh mengenai narasi-narasi yang kontra terhadap vaksinasi, hal-hal tersebut muncul bukan tanpa alasan. Kemungkinan besar untuk narasi dimakan buaya atau melawan takdir Tuhan terdengar tidak masuk akal. Namun, narasi dari pejabat lokal inilah yang cukup menarik untuk dikulik. Mereka menekankan bahwa meskipun sudah divaksinasi akan tetapi masih ada kemungkinan untuk terjangkit lagi bahkan meninggal.

Kembali lagi kepada penjelasan di atas, vaksin yang dibawa pada periode awal abad XVIII bukanlah vaksin stabil. Ditambah lagi dengan sistem distribusi yang tidak sama dari desa satu ke desa lainnya. Artinya, perlu penelitian lebih lanjut agar vaksin dapat disebarluaskan secara lebih aman dan minim efek samping. Lalu mengenai pasien cacar air yang meninggal setelah divaksinasi, dalam kasus ini ada hal lain yang dapat dievaluasi. Selain substansi vaksin yang belum stabil, pengetahuan mantri cacar mengenai vaksin sendiri masih tergolong minim.

Kurang maksimalnya vaksinasi yang terjadi pada awal abad XIX tidak terlepas dari kualitas vaksin yang belum stabil dan minimnya pengetahuan (teori dan lapangan) yang dimiliki para mantri cacar (Papers, 1975: 61). Kesalahan yang umum dilakukan oleh mantri cacar adalah melakukan vaksinasi kepada pasien yang kulitnya masih memiliki luka basah bekas cacar. Ada juga mantri cacar yang melakukan vaksinasi terhadap penduduk yang sudah terjangkiti (virus sudah aktif), tetapi belum terdapat bintil-bintil cacar di kulitnya.

Faktor utama kegagalan vaksinasi yang terjadi pada paruh pertama abad XIX adalah buruknya kualitas vaksin dan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh para mantri cacar. Dalam beberapa kejadian, mantri cacar sering melakukan kesalahan dengan melakukan kesalahan dengan melakukan vaksinasi terhadap orang yang kulitnya masih terluka atau orang yang sudah terjangkiti, tetapi bisulnya belum timbul. Dari tindakan dan rendahnya kualitas vaksin tersebut, antara 10 sampai 15% vaksinasi yang dilakukan mengalami kegagalan.

Merespons masyarakat yang sudah meragukan vaksinasi, pemerintah pada 1879 mengeluarkan perintah bagi anak-anak yang bersekolah untuk melakukan vaksinasi cacar air dan cacar sapi agar dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah (De Locomotief, 11 Agustus 1879). Selain memberikan kewajiban untuk vaksinasi, pemerintah juga melakukan kampanye tindakan preventif untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit cacar. Kampanye tindakan preventif ini

biasanya disebar di koran-koran, majalah atau poster-poster yang di tempel di dinding sekolah.

Salah satu artikel yang ditulis di surat kabar untuk menghalau narasi anti vaksinasi dipublikasikan di *De Locomotief* berjudul *Vrees voor Inenting*. Artikel ini ditulis secara anonim oleh seseorang yang berprofesi sebagai physician. Di dalam artikel ini, dijelaskan bahwa vaksin tidak akan pernah sempurna. Selalu ada persentase kemungkinan paling buruk untuk terjadi. Kemungkinan paling buruk juga dapat terjadi apabila kondisi tubuh penduduk yang terjangkit virus cacar air atau cacar sapi sudah sangat buruk. Di dalam artikel ini, juga dijelaskan bahwa vaksinasi tidak akan membawa efek buruk bagi tubuh manusia disebabkan vaksin sendiri adalah substansi virus yang sudah diinokulasi. Artinya, ketika diinjeksikan ke tubuh manusia tidak akan mungkin membunuh atau memperburuk sistem imunitas di dalam tubuh (*De Locomotief*, 27 September 1869).

Kesimpulan

Vaksinasi yang digalakkan pemerintah merupakan upaya untuk mengontrol laju penyebaran wabah cacar air dan cacar sapi yang terjadi pada periode itu. Vaksinasi sendiri merupakan konsep yang cukup baru bagi dunia medis, apalagi di Hindia-Belanda. Segala keraguan, ketidakpercayaan dan ketakutan masyarakat sebelum memutuskan untuk bersedia di vaksinasi dirasa cukup masuk akal. Akibat dari resistensi yang dilakukan masyarakat di Pulau Jawa pada waktu itu memang sedikit banyak memperlambat program pemberantasan wabah cacar air dan cacar sapi yang digalakkan pemerintah. Akan tetapi, jika dilihat dari kacamata lain, resistensi inilah yang menjadi salah satu faktor perkembangan fasilitas kesehatan yang ada di Hindia Belanda. Tidak hanya itu, fasilitas kesehatan juga dapat diakses lebih luas setelah adanya wabah cacar air dan cacar sapi. Seiring berjalannya waktu, vaksin yang tidak stabil itu mulai dibenahi dan ini menjadi titik balik pemerintah Hindia-Belanda memutuskan untuk mendirikan pusat penelitian dan pembuatan vaksin di Hindia Belanda. Pada akhirnya, pemerintah Hindia Belanda tidak perlu lagi mengimpor vaksin cacar air dan cacar sapi dari Belanda.

Referensi

Surat Kabar

- Bataviaasch Handelsblad, 25 April 1870.
Bataviaasch Handelsblad, 15 Maret 1879.
Bataviaasch Handelsblad, 10 Oktober 1879.
De Locomotief, 4 Maret 1891.
De Locomotief, 27 September 1869.
De Locomotief, 14 Desember 1870.
De Locomotief, 11 Agustus 1879.

Artikel dan Buku

- Boomgaard, Peter (1954). Smallpox, vaccination, and the Pax Neerlandica: Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 593. Diakses melalui <https://www.jstor.org/>
- Harris, Fraser (1915). Edward Jenner and Vaccination. *The Scientific Monthly* Vol. 1, No. 1: 66–85. Diakses melalui <https://www.jstor.org/>
- Hopkins, Donald R. (1983). *Princes and peasants; Smallpox in history*. Chicago: Chicago University Press. Diakses melalui <https://jamanetwork.com/journals>
- Jaklenec, A. (2021). Vaccine Delivery Systems Towards Lymph Nodes. *Advance Drug Delivery*, 10. Diakses melalui <https://www.sciencedirect.com/>
- Loedin. (2005). *Sejarah Kedokteran di Bumi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti.
- Mark, S. K., & Hanifin, J. M. (2004). Smallpox: The Basics. *Dermatol Clin*, 263. Diakses melalui <https://www.sciencedirect.com/>
- Mauldin MR, A. M. (2017). Cowpox virus: What’s in a Name? *Viruses*, 101. Diakses <https://www.mdpi.com/>
- Neelakantan, Vivek. (2010). Eradicating Smallpox in Indonesia: The Archipelagic Challenge. *Health and History*, 63. Diakses melalui <https://www.jstor.org/>
- Papers, Bram (1975). Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Asli di Jawa dalam Abad ke-19: Suatu Pandangan Lain Khususnya Mengenai Masa 1800-1850. Jakarta: Bharata.
- Polak, M.F. (1974). Smallpox Control in Indonesia during the Second Quarter of the Century and Re-establishment of Endemic Smallpox from 1947. *International Assessment of Smallpox Eradication in Indonesia*, 2. Diakses melalui <https://www.jstor.org/>
- Schout, D. (1937). *Occidental Therapeutics in the Netherlands East Indies during Three Centuries of the Netherlands Settlements*. Amsterdam: The Netherlands Indian Public Health Service. Diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
- Sciortino, Rosalia (1999). *Menuju Kesehatan Madani*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

NASIONALIS DI BALIK LAYAR:

GAYA HIDUP PELAJAR BUMIPUTRA DI STOVIA, 1902-1927

Anggun Pramesti Cahyani

anggun.pramesti1401@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Banyak pelajar bumiputra lulusan STOVIA yang kemudian menjadi tokoh penting bagi bangsa Indonesia, baik di bidang kesehatan maupun pergerakan nasional. Namun, belum banyak penelitian yang membahas tentang aktivitas mereka di kontribusi mereka dalam pergerakan nasional. Penelitian ini bertujuan membahas gaya hidup dan kegiatan kaum bumiputra di STOVIA pada 1902–1927. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa STOVIA tidak hanya mengajarkan ilmu kesehatan, tetapi juga mendukung kegiatan pelajar seperti diadakannya festival olahraga dan seni, pendirian asosiasi olahraga dan seni, serta kegiatan jurnalistik.

Kata Kunci

Stovia;
Dokter Dja-
wa;
Bumiputra;
Gaya Hidup

Abstract

Many native STOVIA graduates went on to become important figures for the Indonesian nation, making significant contributions in the realms of healthcare and the national movement. However, there remains a dearth of research exploring their involvement and impact within the national movement. Therefore, this research aims to discuss the lifestyle and activities of the native people at STOVIA in 1902–1927. The results of this study explain that STOVIA not only taught health sciences, but also supported student activities such as the holding of sports and arts festivals, the establishment of sports and arts associations, and journalistic activities.

Keywords

STOVIA;
Dokter
Djawa;
Bumiputra;
Lifestyle

Pendahuluan

Pertengahan abad XIX menjadi masa terbukanya kesempatan besar untuk para kaum bumiputra. Akses pendidikan Barat diawali teruntuk keturunan priyayi sebagai suatu langkah besar yang kemudian membawa ide-ide baru baik gaya hidup, kebiasaan, bahkan ide mengenai kesadaran nasional. Salah satu faktor penyebab terbukanya akses untuk pendidikan barat kaum priyayi adalah maraknya wabah penyakit dan kelangkaan profesi dokter (Colombijn, 2015: 31). Didirikannya Dokter-Djawa School pada 1851 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian diharapkan dapat mencetak lulusan yang nantinya mampu memberikan vaksinasi pada penduduk yang terkena penyakit (Hesselink, 2011: 15).

Mereka yang berasal dari lingkungan keluarga priyayi dan memiliki kemampuan berbahasa Melayu, menulis, dan membaca huruf Jawa dapat mengenyam pendidikan di sana (Hadisutjipto, 1973: 15). Pada 1901, Dokter-Djawa School mengalami reorganisasi oleh Hermanus Frederik Roll, Direktur Sekolah yang kemudian sekolah pendidikan dokter tersebut resmi berubah nama menjadi School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) (Colombijn, 2015: 33). Perubahan Dokter-Djawa School menjadi STOVIA membuka kesempatan yang lebih luas khususnya kepada kaum bumiputra. Hal tersebut karena diberlakukannya ujian masuk yang dapat diikuti oleh semua penduduk Hindia Belanda, bukan hanya kaum priyayi saja. Peserta didik perempuan juga mulai diterima meskipun jumlahnya terlampaui sedikit (Pols, 2019: 66).

Sejak dilakukan reorganisasi, setiap tahunnya STOVIA semakin mengalami peningkatan peminat calon murid. Peningkatan peminat tersebut mendorong didirikannya gedung-gedung baru supaya dapat mengimbangi kuota penerimaan yang juga semakin bertambah. Sehingga hal tersebut juga berdampak pada lulusan sekolah yang semakin lama menghasilkan lulusan yang cukup banyak dan berperan terhadap pembangunan kesehatan pada masa kolonial.

Perkembangan STOVIA telah banyak dipaparkan melalui karya tulis para sejarawan terdahulu. Tidak sulit untuk mencari bagaimana sejarah berdirinya Dokter-Djawa School dan bagaimana proses reorganisasinya menjadi STOVIA. Dapat ditemukan pula tokoh-tokoh nasional yang memiliki latar pendidikan di STOVIA karena lulusan STOVIA banyak yang memiliki peran besar dalam pergerakan nasional Indonesia pada masa kolonial. Namun, hal yang menarik adalah mengetahui bagaimana gaya hidup dan kegiatan pada pelajar di STOVIA di balik ruang kelas mereka sebagai siswa kedokteran. Selain mempelajari ilmu kedokteran, mereka juga melakukan berbagai kegiatan guna mengembangkan skill dan potensi diri mereka. Misalnya, kegiatan olahraga dan seni. Bukan hanya itu, mereka juga dapat menyalurkan hobi menulis atau jurnalistik yang nantinya dapat dituangkan dalam berbagai surat kabar dan majalah, contohnya adalah majalah *De Locomotief* dan *Expres*. Dengan demikian, artikel ini akan memaparkan lebih mendalam mengenai alur penerimaan calon siswa

Dalam melakukan penelitian, sumber primer yang digunakan merupakan arsip-arsip dari Pakualaman, arsip tersebut memberikan informasi mengenai proses penerimaan siswa di STOVIA pada 1901 dan 1902. Adapun surat kabar online yang digunakan yaitu *De Locomotief*, *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, dan *Bataviaasch nieuwsblad* yang dapat diakses melalui Delpher.nl telah memberikan informasi mengenai kegiatan bidang olahraga dan kesenian di STOVIA. Selanjutnya, KITLV memberikan informasi mengenai gambaran kegiatan pesta dan olahraga melalui foto.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang berbagai kegiatan siswa STOVIA terdapat pada beberapa buku dan novel, di antaranya buku *Merawat Bangsa*, *Gedung STOVIA Sebagai Cagar Sejarah*, *Jagat Wartawan Indonesia*, dan *Jejak Langkah*. Kemudian, terdapat karya tulis ilmiah berupa tesis dan skripsi yang relevan. Sumber-sumber tersebut dapat diakses di Perpustakaan Pusat UGM, Perpustakaan FIB UGM, Perpustakaan Departemen Sejarah FIB, Perpustakaan FK-KMK UGM, serta Perpustakaan Daerah Yogyakarta. Terdapat juga laman online yang digunakan untuk mengakses sumber-sumber terkait seperti kamus yang diperlukan untuk menerjemahkan sumber berbahasa Belanda, JSTOR (www.jstor.com), dan Google Scholar (www.scholar.google.com).

Sumber yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi atau diidentifikasi keabsahannya. Untuk mengetahui tingkat keautentikan dan kredibilitasnya, maka harus dilakukan dengan cara komparasi berbagai sumber. Hasil dari tahap verifikasi lalu diinterpretasikan. Dari proses yang telah dilalui, tahap terakhir adalah penulisan sejarah.

Proses Penerimaan Kaum Bumiputra di STOVIA

Setelah mengalami reorganisasi, STOVIA membuka kesempatan yang lebih luas untuk semua kaum bumiputra di Hindia Belanda. Namun tidak semua kaum bumiputra bisa bersekolah di STOVIA, karena terdapat kriteria-kriteria dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi siswa di STOVIA. Sebagai lembaga pendidikan, STOVIA menerapkan tiga ujian, yaitu ujian masuk, ujian transisi untuk siswa yang dianggap memiliki nilai yang kurang memuaskan selama berada di divisi persiapan, serta ujian akhir (Alfian, 2017: 37).

Sementara itu, untuk menjadi siswa di STOVIA, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Selain belajar untuk mempersiapkan ujian, ada juga persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon siswa, yaitu: Calon murid saat mendaftarkan diri harus memenuhi kriteria yaitu memiliki usia minimum 12 tahun dan usia maksimum 17 tahun. Selain usia, mereka juga harus memiliki kondisi fisik yang prima. Pengecekan kondisi fisik calon murid diuji oleh Raad van Bestuur (RvB). Bagi calon murid beragama Kristen mereka harus menunjukkan sertifikat pembaptisan. Mereka juga harus sudah melakukan vaksinasi atau cacar alami. Penilaian karakter juga menjadi persyaratan bagi calon murid STOVIA, dengan begitu dibutuhkan bukti calon murid berkarakter baik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mereka. Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam persyaratan calon murid di STOVIA, mereka harus menjamin orang-orang yang ia rekomendasikan akan melayani negara sampai 10 tahun setelah lulus. Calon murid juga harus tuntas melewati kelas menengah pertama Europeesche Lagere School (ELS) (Alfian, 2017: 58).

Di sisi lain, pendidikan di STOVIA pada masa itu dapat dikatakan memiliki tingkat selektivitas yang tinggi karena terdapat beberapa siswa yang dikeluarkan oleh Direktur Sekolah. Mereka dikeluarkan karena dinilai tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik, tidak terkecuali pada siswa yang baru menempuh pendidikan di tahun pertama (Alfian, 2017: 38). STOVIA tidak memungut biaya selama pendidikan, mereka memberikan beasiswa untuk bersekolah di sekolah kedokteran ini secara gratis, bahkan sekolah ini memiliki julukan “for the poor people” (Hesselink, 2011: 207). Hal tersebut juga menjadi faktor mengapa peminat sekolah pendidikan dokter ini mengalami peningkatan dari berbagai penjuru Hindia Belanda setiap tahunnya. Bagi mereka yang berasal dari Batavia, calon murid akan melakukan ujian bersama secara langsung di gedung STOVIA diawasi oleh Direktur Sekolah dengan tanggal dan jam yang telah disusun oleh Direktur Sekolah dan Kepala Sekolah. Bagi siswa yang tinggal di luar Batavia, mereka harus mengirimkan dokumen persyaratan kepada Kepala Administrasi Departemen Setempat. Kemudian, persyaratan tersebut akan dijadikan satu dengan calon siswa lain untuk dinyatakan sebagai kandidat calon murid STOVIA. Persyaratan tersebut harus dikirimkan dan tiba selambatnya dua bulan sebelum ramadhan-

(Alfian, 2017: 59). Paku Alam V pernah mengirimkan daftar nama anak-cucunya yang ingin ia sekolahkan kepada J.A. Ament, Residen Yogyakarta, lalu mendapat balasan yang berisi :

“Saja minta Kangdjeng Pangeran mengirimkan kepada saja pertelan terseboed saja ampoenja soerat tertanggal 27 Januari 1900 N:227/28, dari adanja anak-anak jang soeka masoek sekolah wolanda tijada pake bajaran, maksoednja boeat beladjar soepadja besoek bisa masoek mendjadi moerid di sekolahan Docter djawa. [...]”¹

Ujian masuk STOVIA memuat mata pelajaran bahasa Belanda dan Aritmatika. Bagi calon siswa yang berasal dari luar Batavia, maka soal ujian akan disegel dan dikirimkan ke ibukota daerah atau Kepala Administrasi Departemen Daerah, mengenai informasi kapan dilaksanakannya ujian dan urutan subjek mana yang terlebih dahulu dinilai juga diinformasikan bersamaan dengan pengiriman soal ujian (Alfian, 2017: 59). Kegiatan surat-menyurat yang ditemukan dalam arsip Pakualaman sebagai berikut merupakan proses pengiriman anak-cucu Paku Alam V untuk mengenyam pendidikan di STOVIA, penggalan surat berikut ini juga merupakan respon dari J.A. Ament yang pada saat itu menjabat sebagai Residen Yogyakarta selaku pemerintah daerah yang dapat merekomendasikan dan menjamin kandidat calon murid STOVIA:

“Surat dan banyak salam dari Mr. J.A. Ament, penduduk Yogyakarta. Kepada sahabatnya Pangeran Adipati Kolonel Paku Alam. Sesuai dengan surat saya tertanggal 17 November 1893 N: 3455, saya dengan hormat meminta Anda untuk mengirimkan kepada saya permintaan Anda untuk jumlah anak muda yang ingin ditempatkan sebagai siswa di sekolah untuk pelatihan siswa kedokteran dalam negeri di Weltevreden. Sebagaimana dimaksud dalam surat itu, sebelum akhir November mendatang, dan ini mengingatkan fakta bahwa kursus baru dimulai pertengahan Maret 1897. Yogyakarta, 18 September 1896. Penduduk Yogyakarta.”²

1 Gewestelijk Bestuur Residentie Jogjakarta N. 81/28 Bijlagen

2 Brief en vele groeken van den Heer J.A. Ament Resident van Jogjakarta, aan lijnen vriend den Pangeran Adhipati Kolonel Paku Alam, Ridden der orde van den Nederlandschen Leiuw. Met vereniging maar mijnen brief dd 17 november 1893 on: 3455, vergoek ik U uwe opgave van jongelieden, die als leerlingen wenschen geplaadst de worden aan de school tot opleiding van Inlandshe geneeskundige de Weltevreden, als bij die misfve is bedoeld, voor uldimo November a.s. Aan mij in de dienen, en julks dewjil de nieuwe cursus aanvangt medio Maart 1897. Jogjakarta, 18 September 1896. De resident van Jogjakarta.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa penilaian memiliki tingkat selektivitas yang tinggi juga dapat diimplementasikan dalam beberapa hal lain, namun sifat penilaian juga cenderung subjektif. Beberapa siswa, khususnya di bagian divisi persiapan atau *voorbereidend afdeling* yang harus dilalui selama 3 tahun terlebih dahulu, bisa mendapatkan keringanan untuk melanjutkan ke divisi kedokteran yang merupakan bagian lanjutannya dengan pertimbangan bahwa mereka harus memiliki nilai yang bagus. Dengan begitu, mereka bisa melewati divisi persiapan selama 3 tahun (Alfian, 2017: 61).

“[...] Kami sudah menunggu-nunggu Tuan. Semestinya Tuan masuk tahun lalu, bukan? Sekarang Tuan terlambat. Seminggu. Harap Tuan mengerti, hanya karena nilai baik dalam ijazah Tuan saja keterlambatan masih dimaafkan” (Toer, 2007: 12).

Penggalan percakapan tersebut adalah kisah Minke yang tertuang dalam salah satu novel karangan Pramoedya Ananta Toer. Dalam novel tersebut dikisahkan, Minke adalah seorang pemuda yang menempuh pendidikan di STOVIA pada 1901. Ia juga mendapatkan kebebasan selama 2 tahun dari divisi persiapan disebabkan perlakuan Dewan guru yang keras pada Minke (Toer, 2007: 12).

Menuangkan Pemikiran Pada Surat Kabar Kolonial

Jurnalistik merupakan salah satu kegiatan yang cukup digemari oleh murid-murid di STOVIA. Pada ruangan rekreasi di gedung STOVIA, terdapat meja belajar yang terikat dengan koran dan majalah.

Di ruangan tersebut, menjadi tempat para murid bisa saling bertukar pikiran dan menambah wawasan dengan membaca koran atau majalah yang disediakan. Majalah yang disediakan di ruang rekreasi tersebut beberapa ada yang merupakan terbitan siswa STOVIA itu sendiri (Hanafiah, 1976: 107). Pada dasarnya, kegiatan menulis yang dilakukan oleh siswa STOVIA merupakan pionir pergerakan nasional karena gagasan-gagasan mereka yang menggugah kesadaran bangsa. Salah satu siswa STOVIA yang bergelut di bidang pers adalah Suardhy Suryaningrat—anak dari Paku Alam III, walaupun pendidikannya di STOVIA tidak tamat, kegiatan menulis dapat dikatakan sebagai kegiatan di luar sekolah yang tampaknya lebih mengikat pada Suardhy Suryaningrat. Ia kerap melakukan kegiatan surat menyurat dengan berbagai koran, terutama dengan surat kabar *Expres* (Notodidjojo, 1981: 63).

Selain itu, tokoh lain seperti Djamaludin juga merupakan siswa STOVIA yang cukup aktif dalam bidang jurnalistik. Ia dikirim ke STOVIA oleh kedua orang tuanya yang diharapkan kelak ia akan menjadi seorang dokter. Namun, sejak usia 18 tahun ia mulai tertarik dalam bidang jurnalistik. Hal yang ia lakukan ketika terjun di dunia jurnalistik adalah mengirimkan tulisannya ke surat kabar Tjaja Hindia. Dalam tulisan-tulisannya itu, ia menggunakan nama samaran “Adinegoro” (Notodidjojo, 1981: 438).

Kebanyakan dari mereka merasakan hal yang sama akan tantangan perbedaan budaya antara pribumi dan budaya barat. Dengan begitu, mereka menggunakan kesempatan menulis dalam buletin, majalah, bahkan buku tahunan untuk mencurahkan peristiwa kehidupan yang terjadi selama bersekolah di STOVIA. Misalnya, catatan unik kehidupan pelajar yang menceritakan kelelahan mereka karena terlalu banyak belajar, kejamnya profesor karena membuat soal ujian yang dirasa siswa terlalu sulit, sensasi kehidupan kota, dan berbagi berita tentang olahraga, pesta, serta acara-acara khusus (Pols, 2019: 72).

KEOLAHRAGAAN

Selain belajar ilmu kedokteran, para siswa STOVIA juga sangat antusias mengikuti kegiatan di luar kelas, seperti olahraga dan seni. Ruang rekreasi kemudian tidak hanya menjadi ruang untuk bertukar dan menambah wawasan, kegemaran murid-murid di STOVIA dalam olahraga juga dapat mereka salurkan di ruang rekreasi seperti misalnya bermain catur, bermain bilyar, dan lain-lain (Mardheni, 2017: 91).

a. Catur

Sejak berdirinya Dokter-Djawa School, catur menjadi salah satu olahraga yang cukup eksis di sana dari waktu ke waktu. STOVIA kerap kali mengikuti pertandingan catur antar sekolah maupun asosiasi luar sekolah. Sering juga termuat dalam koran setiap kali STOVIA mengikuti kompetisi catur. Klub Catur STOVIA biasanya mendapat undangan untuk bertanding dengan klub catur lain. Klub yang sering mengundang STOVIA untuk melakukan pertandingan adalah Klub Catur “Batavia”. Selain itu, ketika STOVIA merayakan hari jadi sekolah, maka biasa diadakan juga kompetisi olahraga persahabatan dengan mengundang sekolah lain untuk bertanding (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 9 Mei 1914). STOVIA juga pernah mengikuti pertandingan yang diadakan oleh Asosiasi “Buitenzorg” di Rumah Militer di Buitenzorg. Dalam pertandingan tersebut, STOVIA mendapatkan kemenangan dengan 13 ½ poin melawan ½ poin (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 27 Desember 1917).

STOVIA juga pernah mengikuti pertandingan yang diadakan oleh Asosiasi “Buitenzorg” di Rumah Militer di Buitenzorg. Dalam pertandingan tersebut, STOVIA mendapatkan kemenangan dengan 13 ½ poin melawan ½ poin (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 27 Desember 1917). Pada awal abad XX, pertandingan catur merupakan kegiatan yang kerap diselenggarakan, biasanya Klub Catur STOVIA mengirimkan perwakilan yang cukup banyak untuk pertandingan catur yang diadakan. Pada acara Schaken, STOVIA menghadapi 22 lawan. Dalam pertandingan itu, STOVIA dikabarkan cukup unggul dalam permainan (Bataviaasch Nieuwsblad, 3 Desember 1927).

“Di bidang catur saya termasuk kedelapan anggota yang biasa mempertahankan nama Stovia dalam kompetisi catur di Betawi. Jarang sekali kami dikalahkan oleh perkumpulan lain. Pada kesempatan memperingati 10 tahun berdiri perkumpulan catur Stovia dalam tahun 1923, diperebutkan kejuaraan antara anggota. Saya berhasil menjadi juara satu. Tapi saya perlu tambahkan bahwa jago-jago “tua” seperti Aulia, abd. Rasid, Soemadiono, Enggelen waktu itu sudah keluar dari sekolah” (Hanafiah, 1976: 108).

Tulis dari seorang alumni STOVIA yang kala itu berkesempatan mewakili STOVIA bertanding catur. Dapat diketahui bahwa keberadaan olahraga catur di STOVIA sendiri sangat populer, bahkan terdapat pemain unggulan yang cukup dikenal banyak orang seperti Aulia, Abd. Rasyid, Soemadiono, dan Enggelen.

b. SepakBola

STOVIA memiliki tim sepak bola yang seringkali bertanding dengan sekolah pendidikan barat lain seperti Technische Hoogeschool dan Rechtshogeschool. Biasanya, mereka bertanding dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun STOVIA atau Festival Olahraga, seperti “De Stovia Jubileum-Wedstrijden”. Kemungkinan, klub sepak bola ini merupakan kegiatan di luar kelas yang cukup diunggulkan oleh sekolah, karena dalam setiap pertandingan, STOVIA sering meraih kemenangan. Selain itu, STOVIA juga melakukan pertandingan dengan asosiasi klub sepak bola luar sekolah, seperti Archilles, Hercules, dan Oliveo.

Klub sepak bola STOVIA memiliki pemain yang cukup andal dan terkenal pada masa itu, seperti Roebini dan Rehatta. Mereka dikatakan sebagai pemain yang terlincah di lapangan hijau (Hanafiah, 1976: 108). Saat melakukan pertandingan dengan Rechtshoogeschool, STOVIA mendapatkan kemenangan dengan skor akhir 5-1 (Bataviaasch Nieuwsblad, 18 September 1926).

Selain dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun, tim sepakbola juga sering melakukan pertemuan pada hari sabtu sore di lapangan STOVIA. Pertemuan tersebut menghadirkan tim sepak bola lain, salah satu yang pernah diwartakan oleh surat kabar adalah Achilles.

Permainan sepak bola melawan Achilles dimenangkan kembali oleh STOVIA. Gawang STOVIA berulang kali diserang namun tidak ada gol dari lawan yang tercipta (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 15 Mei 1905).



Figur 1. Klub sepak bola STOVIA
Sumber: KITLV

c. Tenis

Selain mengadakan pertandingan catur dan sepak bola, saat perayaan Hari Ulang Tahun STOVIA juga diadakan pertandingan tenis. Dalam koran, pernah termuat bahwa Klub Tenis STOVIA telah bertanding dengan Klub Tenis Technische Hogeschool pada hari Sabtu di Bandung (Bataviaasch Nieuwsblad, 11 Oktober 1926). Olahraga tenis merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup banyak digemari bersama dengan cabang olahraga sepakbola dan catur (Hanafiah, 1976: 108).

d. Senam

STOVIA memiliki Asosiasi Anggar Senam yang kemudian ikut serta dalam kompetisi olahraga dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun STOVIA. Dalam kompetisi tersebut, diberitakan bahwa setiap peserta kompetisi senam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu A, B, dan C. Kelompok A terdiri dari laki-laki yang berbadan tinggi dan lebih banyak melakukan latihan di palang horizontal, ring dan jembatan. Peserta dari perlombaan senam ini nampaknya hanya untuk para siswa STOVIA saja. Dalam surat kabar, atlet Roebini dan Rehatta juga ikut serta dalam perlombaan ini sebagai anggota kelompok B. Mereka mendapat juara masing-masing juara satu untuk Roebini dan juara tiga untuk Rehatta. Kepala Direktur dan Administrator STOVIA mengatakan bahwa pemuda pribumi harus lebih banyak berolahraga. Mereka harus diberi nasihat yang baik bahwa selain mengembangkan pikiran melalui kegiatan akademik mereka juga harus meningkatkan kesehatan tubuh juga (De Locomotief, 18 Maret 1921).

Dengan adanya dukungan dari Direktur STOVIA pada cabang olahraga ini, dibuka juga kursus senam putri yang dilaksanakan di gedung olahraga STOVIA. Kursus senam itu rutin dilakukan pada setiap hari selasa pukul 6.30 pagi sampai pukul 7.30 malam hari (Bataviaasch Nieuwsblad, 27 September 1922).



Figur 2. Gudang Senam STOVIA di Hospitaalweg di Batavia

Sumber: KITLV

SENI DAN PERAYAAN

a. Hari Ulang Tahun STOVIA

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa pertandingan klub olahraga biasanya berlangsung untuk memeriahkan hari ulang tahun STOVIA. Perayaan Hari Ulang Tahun STOVIA terbesar pernah dilaksanakan dengan menggelar festival bertajuk “75-jarig Jubileum der Stovia” yang berlangsung selama 10 hari dari tanggal 11-21 September 1926. Pesta tersebut bahkan dihadiri oleh gubernur, hampir semua Direktur Departemen, dan banyak pejabat lainnya (Bataviaasch Nieuwsblad, 14 September 1926).



Figur 3. HUT STOVIA ke 75 tahun

Sumber: KITLV

Kemeriahan festival yang diselenggarakan telah menarik ribuan orang dan banyak guru sekolah untuk menghadiri acara tersebut. Tempat utama perayaan tersebut di aula yang telah dihiasi bunga dan kain bendera. Banyaknya orang yang datang membuat beberapa dari mereka harus berada di luar aula. Dengan penampilan orkestra yang dimulai jam 9 pagi, maka telah menandakan dibukanya pawai dan acara. Konduktor pun menerima karangan bunga laurel. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan pertunjukan wayang-wong. Usai pertunjukan tersebut, terdapat tarian di lantai dansa yang dilakukan hingga dini hari (Bataviaasch Nieuwsblad, 20 September 1926) Berikut ini rangkaian acara Hari Ulang Tahun ke-75 STOVIA (Bataviaasch Nieuwsblad, 20 September 1926).

Hari, Tanggal	Waktu	Nama Kegiatan	Lokasi
Kamis, 16 September 1926	8.30	Pertandingan Tenis Fakultas Cup	Lapangan Bata-viasche Sport
	16.30	Pertandingan sepak bola (Divisi Persiapan vs Divisi Kedokteran)	
		Pertandingan sepak bola (Divisi Persiapan vs Divisi Kedokteran)	
		Kedatangan senat Technische Hoogeschool	
Jum'at, 17 September 1926	9.15 - 11.00	Upacara resepsi	Gedung utama STOVIA di Salemba
	16.30 - 18.00	Pertandingan sepak bola (STOVIA vs Rechtshogeeschool)	
	17.30	Kedatangan siswa Technische Hogeschool	
	21.00	Malam reuni (khusus guru dan siswa)	Gedung utama STOVIA di Salemba
Sabtu, 18 September 1926	8.30 - 13.00	Pertandingan tenis (STOVIA vs Technische Hoogeschool)	Lapangan B.S.C. Koning-splein Noord

Hari, Tanggal	Waktu	Nama Kegiatan	Lokasi
Kamis, 16 September 1926	16.00 - 18.00	Pertandingan tenis (Technische Hoogeschool vs STOVIA)	Jalan rumah sakit stoviabaan 32
	16.30 - 18.00	Pertandingan sepak bola (Technische Hoogeschool vs Rechtshogeschool)	Halaman Botanic Garden
		Pertandingan sepak bola (Technische Hoogeschool vs Rechtshogeschool)	Halaman Botanic Garden
Minggu, 19 September 1926	16.00	Pertandingan tenis (Technische Hoogeschool vs Rechtshogeschool)	Jalan rumah sakit stoviabaan 32
Senin, 20 September 1926	8.30 - 13.00	Pertandingan lanjutan, tenis (Technische Hoogeschool vs Rechtshogeschool)	Lapangan B.S.C. Koningplein Noord
	16.00 - 18.00	Pertandingan lanjutan, tenis (Technische Hoogeschool vs Rechtshogeschool)	Jalan rumah sakit stoviabaan 32
	20.00	Upacara dan Diner	Ruang atas zandversteeg, Noordwijk.

Hari, Tanggal	Waktu	Nama Kegiatan	Lokasi
Selasa, 21 September 1926	8.30 - 12.00	Pertandingan lanjutan tenis	
	7.00 - 13.00	Kompetisi atletik ringan antar kelas	Lapangan resital, King Square selatan
		Kompetisi atletik ringan antar kelas	Lapangan resital, King Square selatan
	19.00	Reuni siswa dan mantan siswa sekolah asrama Hospitaalweg.	Jalan rumah sakit stoviabaan 32

b. Pesta Akhir Tahun di Kebun Binatang

Pesta akhir tahun biasanya diadakan saat ujian akhir usai atau saat menjelang libur besar. Pesta yang diselenggarakan cukup bervariasi, misalnya, pesta yang diadakan oleh Asosiasi Olahraga dan Seni, di kebun raya dan kebun binatang. Dalam pesta tersebut, turut hadir para petinggi-petinggi sekolah, seperti mantan Direktur Pendidikan yang saat itu telah menjadi anggota Dewan Hindia, direktur dan guru STOVIA, konsultan rumah sakit, wakil presiden dewan yudisial, dan lain-lain. Seperti biasanya, pembukaan acara akan diawali dengan pertunjukan orkestra. Pada perayaan tersebut dibawakan karya musik klasik berjudul "Die weisse Dame" ciptaan François-Adrien Boieldieu (1775 - 1834). Kemudian, acara dilanjutkan dengan pertunjukan wayang-wong yang menceritakan tentang pertempuran tunggal antara Raden Narantoko, Ksatria dari Djenggalo, dan Daeng Mabela seorang Kepala Suku Bugis (Bataviaasch Nieuwsblad, 24 Desember 1923).

c. Kesenian Musik

Orkestra sering menjadi tanda pembuka pesta atau festival yang diadakan di STOVIA. Pertunjukan tersebut selalu mendapatkan sambutan positif dari penonton, baik guru maupun siswa. Hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa kegiatan bermusik di STOVIA berkembang dengan cukup baik. Di STOVIA sendiri terdapat perkumpulan musik Hawaii. Perkumpulan ini pernah mendapat hadiah perlombaan umum di “Decapark” sebanyak dua kali. Awalnya, perkumpulan musik Hawaii mendapatkan juara tiga, lalu setahun kemudian mereka mendapatkan juara dua. Dalam sebuah catatan, lulusan STOVIA menyebutkan bahwa :

“Ingin untuk juga ikut serta di bidang musik, saya menyerahkan diri sebagai murid kepada sahabat Nelwan, yang bersedia mengajar saya, bermula main gitar. Tetapi sesudah beberapa bulan, guru dan murid sependapat bahwa saya termasuk orang yang tuna-musik, segala usaha dianggap sia-sia” (Hanafiah, 1976: 108).

Dari tulisan tersebut, dapat dipahami bahwa seorang siswa boleh saja mengikuti segala klub atau perkumpulan yang ada di STOVIA. Walaupun pada dasarnya mereka tidak bisa, tetapi yang terpenting adalah kemauan dalam belajar, sehingga mereka akan dilatih bersama dengan teman-teman yang lain.

Kesimpulan

Terbukanya kesempatan kaum Bumiputra untuk menempuh pendidikan di sekolah kedokteran pribumi menjadi awal mulanya adanya perubahan. Kaum bumiputra turut mengalami perubahan kebiasaan gaya hidup yang mulai kebarat-baratan. Dalam proses mengenyam pendidikan dokter, banyak hal baru yang mereka serap. Mulai paham bahasa Belanda atau bahasa lain misalnya, menjadi transportasi untuk mengetahui dunia luar. Kedekatan mereka dalam dunia penulisan membuat para murid-murid bumiputra di STOVIA saling menuangkan perasaan yang mereka alami baik di buku harian maupun di surat kabar. Dalam mengenyam pendidikan di STOVIA mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran. Seperti pada umumnya sekolah di masa sekarang selalu ada ekstrakurikuler di dalamnya untuk menunjang hobi para murid, nampaknya hal tersebut sudah ada sejak dulu seperti di STOVIA sendiri. Berbagai kegiatan di luar kelas cukup di fasilitasi oleh Direktur Sekolah STOVIA. Dalam bidang olahraga, terdapat catur, tenis, sepak bola, dan atletik. Klub yang telah disebutkan sering sekali mengikuti pertandingan antar sekolah maupun asosiasi luar sekolah.

Kemenangan bagi STOVIA bukanlah suatu hal yang baru, klub olahraga mereka kerap menjumpai kemenangan yang pasti berkat kerja keras dan dedikasi para murid-murid di STOVIA.

Hal-hal semacam kegiatan olahraga dan kesenian seringkali menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan yang diadakan oleh sekolah. Terdapat beberapa jenis perayaan yang dapat dijumpai para murid di STOVIA, diantaranya adalah perayaan hari ulang tahun sekolah dan pesta akhir tahun yang biasanya diadakan menjelang libur besar. Dengan demikian, para murid di STOVIA tidak hanya mempelajari ilmu kedokteran semasa mengenyam pendidikan di sekolah tersebut, namun mereka juga melakukan kegiatan diluar itu. Direktur sekolah juga turut mendukung aktivitas demikian, terutama dalam bidang olahraga yang dianggap sangat perlu dilakukan karena kesehatan tubuh merupakan hal yang penting. Dengan demikian sekolah pendidikan dokter ini tidak hanya memberikan ilmu kedokteran namun juga mendukung dan memfasilitasi peminatan yang terdapat pada masing-masing muridnya. Sekolah juga kerap memberikan hiburan melalui pesta atau perayaan untuk sekedar mengistirahatkan diri dari kegiatan kelas yang cukup berat.

Referensi

Surat Kabar

- Gewestelijk Bestuur Residentie Jogjakarta N. 81/28 Bijlagen.
De Locomotief, 18 Maret 1921.
Bataviaasch Nieuwsblad, 3 Desember 1927.
Bataviaasch Nieuwsblad, 18 September 1926.
Bataviaasch Nieuwsblad, 11 Oktober 1926.
Bataviaasch Nieuwsblad, 27 September 1922.
Bataviaasch Nieuwsblad, 20 September 1926.
Bataviaasch Nieuwsblad, 14 September 1926.
Bataviaasch Nieuwsblad, 24 Desember 1923.
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie, 9 Mei 1914.
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie, 27 Desember 1917.
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie, 15 Mei 1905.

Artikel dan Buku

- Colombijn, Freek dan Coté, Joost. (eds.). (2014). *Cars, Conduits, and Kampongs: The Modernization of the Indonesian City, 1920-1960*. Leiden: Brill.
- Hadisutjipto. (1973). *Gedung STOVIA Sebagai Cagar Sejarah*. Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah DKI.
- Hanafiah, M.A. (1976). *125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia 1851-1976*. Panitia Peringatan 125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia.
- Hesselink, L. (2011). *Healers on the Colonial Market: Native Doctors and Midwives in the Dutch East Indies*. Leiden: KITLV Press.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Notodidjojo, S. I. (1981). *Jagat Wartawan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Pols, Hans. (2019). *Merawat Bangsa: Sejarah Pergerakan Para Dokter Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Toer, Pramoedya Ananta. (2007). *Jejak langkah*. Jakarta: Lentera Di antara.
- Amini, Mutiah. (2014). "Melawat ke Barat: Westernisasi Pendidikan Keluarga Paku Alam V". Dalam *Jurnal Patraidya*, Vol. 15, No, 1.

Skripsi dan Tesis

- Lestyanto, Andry Nurtjahjo, 1986, “Politik Pendidikan Kolonial di Hindia Belanda: STOVIA Sebagai Tolak Ukur Kemajuan Bangsa (1851-1910)”, Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.
- Mardheni, Dieka Wahyudha, 2017, “Gaya Hidup Modern Siswa Ke dokteran (Eleve) di Batavia 1851-1927”, Thesis, Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Alfian, Bara Rozie, 2017, “Direktur Roll Dalam Reorganisasi STOVIA 1902”, Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

BERTAHAN PADA MASA RAWAN: INDUSTRI SUSU SAPI DI MALANG PADA MASA DEPRESI 1930-AN

Putri Dwi Lestari

putri.dwi.lestari@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Depresi Ekonomi 1930 menyebabkan guncangan pada perekonomian Indonesia masa kolonial. Ekspor Indonesia sangat terpuak karena tren harga dan permintaan global yang menurun. Perkebunan-perkebunan besar mengalami penyusutan pendapatan dan terpaksa mengurangi faktor-faktor produksi. Akan tetapi, terlepas dari ekspor yang menjadi sumber pendapatan utama kolonial, industri-industri kecil dalam negeri juga tidak kalah sulitnya dalam menghadapi masa depresi. Industri susu, misalnya, mereka hanya mengandalkan permintaan regional penduduk di sekitarnya. Di Malang, krisis Malaise menyebabkan penurunan penjualan dan surplus susu besar-besaran. Permasalahan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena penelitian mengenai dampak Malaise terhadap industri berbasis regional masih jarang ditemukan. Berdasarkan surat kabar dan arsip yang sezaman, penelitian ini menemukan adanya pengaturan baru dalam industri susu sapi di Malang sebagai respons atas Depresi ekonomi 1930-an.

Kata Kunci

*Depresi
Ekonomi;
Industri
Susu;
Malang.*

Abstract

The Great Depression 1930 caused a shock to the economy of the colonial Indonesia. Indonesian exports were hitting hard due to the downward trend in global prices and demand. Large plantations experienced a shrinking revenue and were forced to cut down on factors of production. However, apart from exports, which were the main source of colonial income, the country's small industries also struggled during the depression. The dairy industry, for example, relied solely on the regional demand of the people living nearby. In Malang, the Malaise crisis led to a massive drop in sales and milk surpluses. The issue is interesting to explore since research on the impact of the Malaise on regionally-based industries is lacking. The research is based on contemporaneous newspapers and archives. This resulted in a new arrangement of the dairy industry in Malang as a response to the 1930's economic depression.

Keywords

*Great
Depression;
Dairy
Industry;
Malang.*

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia mengalami guncangan keras ketika Depresi ekonomi melanda dunia pada 1930-an. Harga beberapa produk ekspor dan permintaan barang mengalami penurunan. Indonesia sangat menggantungkan pendapatan dari ekspor, utamanya dari produk-produk perkebunan dan minyak bumi. Ekspor banyak ditujukan kepada negara-negara industri Eropa dan Amerika Utara. Pada 1930, produk yang diekspor ke negara-negara tersebut mencapai 52% (Ricklefs, 2008: 399). Namun, krisis ekonomi menyebabkan negara-negara tujuan ekspor memberlakukan kebijakan proteksi sehingga volume ekspor Indonesia menjadi anjlok. Pada 1935, nilai ekspor Indonesia tercatat hanya 32% dari yang dihasilkan pada 1929 (Ricklefs, 2008: 400).

Dampak Depresi pada ekspor perkebunan ini banyak disinggung dalam karya Roger Knight, Ulbe Bosma, Soegijanto Padmo, Sartono Kartodirdjo, dan Anne Booth¹. Gula sebagai komoditas ekspor utama pada masa itu merupakan sektor yang paling terdampak. Lahan garapan tebu berkurang dari 200.000 hektare pada 1934 menjadi 90.000 hektare pada 1939. Gaji yang dibayarkan pada pekerja industri gula juga berkurang hingga 90% (Ricklefs, 2008: 400). Akibatnya, kemiskinan meluas dengan cepat. Industri gula Jawa runtuh dan wilayah ini menjadi tertinggal dibandingkan luar Jawa (Touwen, 2002: 108). Tidak hanya gula; semua komoditas perkebunan, seperti karet, kopi, dan tembakau juga mengalami penurunan yang serupa.

Selain perkebunan-perkebunan berskala besar, perusahaan-perusahaan kecil juga menghadapi kesulitan. Meskipun mereka tidak berfokus pada ekspor, perusahaan-perusahaan tersebut mengalami penurunan penjualan karena berkurangnya daya beli dalam negeri. Industri susu, misalnya. Susu merupakan zat yang mudah berubah atau rusak. Susu akan menjadi asam dan tidak layak konsumsi ketika disimpan berhari-hari dengan cara biasa. Dengan terjadinya penurunan penjualan, terdapat peningkatan potensi kerugian akibat susu-susu yang terbuang.

Industri susu pada masa itu juga tidak dapat berkembang secara luas karena masalah ketahanan tersebut. Ia hanya mampu menjangkau wilayah regional. Di Batavia, industri susu difokuskan di daerah Jakarta, Jatinegara, Bogor, dan Karawang. Di Jawa Barat, susu dapat dipasok

1 Lihat G. Roger Knight, *Commodities and Colonialism: The Story of Big Sugar in Indonesia, 1880–1942*; Ulbe Bosma, Juan Gius-ti-Cordero, G. Roger Knight (Eds.), *Sugarlandia Revisited: Sugar and Colonialism in Asia and the Americas, 1800 to 1940*; Soegijanto Padmo, *Bunga Rampai Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia*; Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*; Anne Booth, William J. O'Malley, Anna Weidemann (Eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*.

dari wilayah Preanger, terutama di Bandung dan sekitarnya. Di Jawa Tengah, daerah Salatiga, Boyolali, dan Jonggrangan berkembang menjadi sentra susu. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, peternakan sapi perah banyak ditemui di Surabaya, Malang, dan Pasuruan (Subandriyo dan Adiarto, 2009: 3). Beberapa peternakan telah dikaji secara khusus, di antaranya dalam tulisan yang berjudul *Perkembangan Peternakan Sapi Perah dan serangan Wabah Anthrax di Boyolali* (Purnomo, 2001), *Peternakan Sapi di Madura Tahun 1900-1937 Suatu Tinjauan Sosial Ekonomi* (Kriswijanto, 1988), dan juga *Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Peternak Sapi Perah di Pangalengan (1969 – 1998)* (Amin, 2006).

Perkembangan industri susu atau peternakan sapi perah di Indonesia memang sudah banyak diteliti dalam cakupan spasial dan temporal yang berbeda-beda. Namun, belum ada pebelitian yang secara spesifik mengaitkannya dengan Depresi 1930. Dalam hal ini, Malang menjadi wilayah yang menarik. Di pinggiran Lawang, orang-orang Eropa yang sudah pensiun berlangganan pada perusahaan susu di sekitar tempat tinggalnya. Sayangnya, pada 1932, Departemen Kesehatan Hewan Provinsi melaporkan bahwa penjualan susu menurun pada saat krisis Malaise. Hal ini menyebabkan banyak peternakan sapi perah di Malang mengalami surplus susu besar-besaran. Persaingan di antara penjual pun tidak dapat dihindari, akibatnya harga susu anjlok (*De Indische Courant*, 2 Desember 1932).

Kasus Malang merupakan bukti bahwa Depresi tidak hanya berdampak pada sektor luar negeri, tetapi juga dalam negeri, khususnya bagi perusahaan-perusahaan kecil yang berbasis regional. Permasalahan ini kurang menjadi sorotan karena pemerintah berfokus pada pemulihan sumber pendapatan utama. Akan tetapi, permasalahan di atas harus segera diatasi agar industri yang rentan itu tidak menghancurkan ekonomi penduduk sekitar. Lantas, usaha apa yang dilakukan oleh pelaku industri Malang dalam menghadapi krisis? Apakah usaha tersebut berhasil mengatasi permasalahan pada saat krisis? Kedua hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini. Konteks sebelum Depresi diberikan untuk melihat bagaimana perkembangan industri susu sapi di Malang dan bagaimana Depresi mempengaruhi industri-industri tersebut.

Tema dipilih berdasarkan minat terhadap perekonomian dan agrikultur. Saat ini, pembahasan mengenai dampak Depresi hanya berfokus pada sektor ekspor. Sementara pengaruh pada industri regional, seperti industri susu sapi di Malang, jarang dibahas. Padahal, Malang memiliki gagasan penting dalam menghadapi permasalahan Depresi dengan didirikannya sentra susu pada 1930-an. Itu sebabnya bahasan tentang peternakan dan industri susu di Malang, khususnya pada awal abad XX, sangat menarik untuk diteliti. Topik mengenai industri pengolahan susu juga disesuaikan dengan data yang tersedia (data driven).

Sumber-sumber dalam penelitian ini dapat diakses secara online. Sumber primer berasal dari website surat kabar Delpher. Adapun surat

dari wilayah Preanger, terutama di Bandung dan sekitarnya. Di Jawa Tengah, daerah Salatiga, Boyolali, dan Jonggrangan berkembang menjadi sentra susu. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, peternakan sapi perah banyak ditemui di Surabaya, Malang, dan Pasuruan (Subandriyo dan Adiarto, 2009: 3). Beberapa peternakan telah dikaji secara khusus, di antaranya dalam tulisan yang berjudul *Perkembangan Peternakan Sapi Perah dan serangan Wabah Anthrax di Boyolali* (Purnomo, 2001), *Peternakan Sapi di Madura Tahun 1900-1937 Suatu Tinjauan Sosial Ekonomi* (Kriswijanto, 1988), dan juga *Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Peternak Sapi Perah di Pangalengan (1969 – 1998)* (Amin, 2006).

Perkembangan industri susu atau peternakan sapi perah di Indonesia memang sudah banyak diteliti dalam cakupan spasial dan temporal yang berbeda-beda. Namun, belum ada pebelitian yang secara spesifik mengaitkannya dengan Depresi 1930. Dalam hal ini, Malang menjadi wilayah yang menarik. Di pinggiran Lawang, orang-orang Eropa yang sudah pensiun berlangganan pada perusahaan susu di sekitar tempat tinggalnya. Sayangnya, pada 1932, Departemen Kesehatan Hewan Provinsi melaporkan bahwa penjualan susu menurun pada saat krisis Malaise. Hal ini menyebabkan banyak peternakan sapi perah di Malang mengalami surplus susu besar-besaran. Persaingan di antara penjual pun tidak dapat dihindari, akibatnya harga susu anjlok (*De Indische Courant*, 2 Desember 1932).

Kasus Malang merupakan bukti bahwa Depresi tidak hanya berdampak pada sektor luar negeri, tetapi juga dalam negeri, khususnya bagi perusahaan-perusahaan kecil yang berbasis regional. Permasalahan ini kurang menjadi sorotan karena pemerintah berfokus pada pemulihan sumber pendapatan utama. Akan tetapi, permasalahan di atas harus segera diatasi agar industri yang rentan itu tidak menghancurkan ekonomi penduduk sekitar. Lantas, usaha apa yang dilakukan oleh pelaku industri Malang dalam menghadapi krisis? Apakah usaha tersebut berhasil mengatasi permasalahan pada saat krisis? Kedua hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini. Konteks sebelum Depresi diberikan untuk melihat bagaimana perkembangan industri susu sapi di Malang dan bagaimana Depresi mempengaruhi industri-industri tersebut.

Tema dipilih berdasarkan minat terhadap perekonomian dan agrikultur. Saat ini, pembahasan mengenai dampak Depresi hanya berfokus pada sektor ekspor. Sementara pengaruh pada industri regional, seperti industri susu sapi di Malang, jarang dibahas. Padahal, Malang memiliki gagasan penting dalam menghadapi permasalahan Depresi dengan didirikannya sentra susu pada 1930-an. Itu sebabnya bahasan tentang peternakan dan industri susu di Malang, khususnya pada awal abad XX, sangat menarik untuk diteliti. Topik mengenai industri pengolahan susu juga disesuaikan dengan data yang tersedia (data driven).

Sumber-sumber dalam penelitian ini dapat diakses secara online. Sumber primer berasal dari website surat kabar Delpher. Adapun surat

antara lain *De Indische Courant*, *Soerabaijasch handelsblad*, dan *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*. Sumber foto didapatkan dari website Digital Collections Leiden University. Sementara itu, digunakan pula buku-buku catatan atau panduan yang menjelaskan peristiwa pada zamannya.

Perkembangan Industri Susu Sapi di Malang



Figur 1. Malang Based on the Dutch town plan kaart van de *Stadsgemeente Malang* dated 1923.

Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl>

Tahun awal munculnya peternakan sapi perah di Malang tidak dapat diketahui secara pasti. Laporan mengenai jumlah peternakan sebelum tahun 1930-an sulit untuk ditemui. Hal ini mungkin disebabkan oleh latar belakang dari pendirian peternakan itu sendiri. Sebagian besar peternakan tumbuh dari usaha keluarga untuk memenuhi kebutuhan susunya masing-masing. Saat didirikan, besar kemungkinan bahwa mereka tidak mengira usaha itu akan berkembang menjadi sebuah peternakan sapi perah yang terstruktur. Pada 9 April 1918, sekitar 60 ekor sapi perah pilihan, termasuk sapi dari Beemster, Belanda Utara, dipamerkan di halaman hotel Songgoriti di Batu. Sapi perah ini berasal dari peternakan Sidodadi yang baru didirikan di Poenten. Sekarang, mereka dijual karena pemiliknya, Tn. Halkema, sedang sakit (*Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, 2 April 1918). Peristiwa ini menandai bahwa usaha peternakan sapi perah dan pengolahan susu sudah ada di Malang sebelum tahun 1918.

Sepuluh tahun kemudian, dokter hewan kota melaporkan rincian pasokan susu di Malang. Jumlah perusahaan susu di dalam Kotamadya Malang mencapai 10. Sementara 4 perusahaan yang terletak di luar kota, mengimpor semua atau sebagian susu yang diproduksi untuk dijual di dalam kota. Jumlah sapi perah yang terlibat dalam berbagai peternakan berkisar 260 ekor, 212 ekor diantaranya aktif memproduksi (*De Indische Courant*, 15 Oktober 1928).

Produksi Susu

Sapi di Malang dikelola dalam peternakan skala kecil maupun besar. Ada yang jumlahnya lusinan, tetapi banyak juga yang memiliki kurang dari sepuluh ekor sapi perah (*De Indische Courant*, 11 Desember 1939). Di sini, sapi yang dikembangkan adalah jenis *Fries Holland*. Sapi jenis ini terkenal dengan kemampuannya dalam memproduksi susu. Koran mencatat bahwa seorang peternak Eropa pernah memberikan seekor sapi perah Frisian murni kepada peternak sapi kecil di Batu dan sekitarnya. Sapi ini kemudian disilangkan dengan sapi lokal untuk menghasilkan keturunan yang lebih unggul.

Dalam perkembangannya, pemerintah provinsi berambisi untuk melakukan perluasan peternakan. Ternak membutuhkan ekspansi seiring dengan susu yang semakin merambah sebagai makanan rakyat. Kebutuhan akan penggembalaan ternak kemudian diperdebatkan. Di Malang, isu ini sudah dibahas sejak awal 1930 an. Pada 1938, permasalahan ini ditanggapi dengan rencana sentralisasi padang rumput ternak di daerah Ardjoeno. Dengan penyatuan ini, pengendalian penyakit dan hama pada sapi muda juga menjadi lebih mudah sehingga sapi yang benar-benar bebas penyakit dapat dijamin (*De Indische Courant*, 4 November 1938).

Upaya untuk menciptakan peternakan yang berkualitas juga dilakukan melalui penanganan penyakit menular pada sapi. Hal ini sudah dibahas pada pertemuan Perhimpunan Dokter Hewan dan Peternakan pada 1926. TBC sering dijumpai pada sapi perah. Di Malang, misalnya, 30 persen dari kawanan ternak terkena tuberkulosis (*De Indische Courant*, 27 Maret 1926). Pada kuartal terakhir tahun 1928, enam ekor sapi dari berbagai perusahaan susu disembelih. Hal ini disebabkan sapi diduga terinfeksi TBC. Sesuai kesepakatan, sapi yang sakit harus segera disingkirkan agar kawanan yang lain tetap sehat. Berkat upaya penanganan yang cepat dari dokter hewan, hampir semua peternakan sapi perah di Kota Malang sudah bebas dari TBC. Hasil pengujian susu di laboratorium juga cukup memuaskan. 57 sampel susu yang dijual di jalan diperiksa. Dua diantaranya memiliki kandungan kotoran yang tinggi, sedangkan yang lainnya dinyatakan baik oleh dokter hewan (*De Indische Courant*, 15 Oktober 1928).

Distribusi Susu

Di Belanda, distribusi susu sepenuhnya terpisah dari perusahaan susu. Tetapi disini, hal ini berada dalam satu penanganan. Luasnya kota-kota di Hindia Belanda menuntut perusahaan memiliki tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terkontrol. Saking banyaknya, di jalan yang sama, orang dapat melihat pengirim susu dari empat atau lima perusahaan susu yang berbeda (*De Indische Courant*, 4 November 1938).

Sentralisasi lembaga distribusi diharapkan dapat mengurangi biaya pengiriman. Dari yang sebelumnya berkisar 7 sen per liter berubah menjadi lebih rendah. Sentralisasi distribusi kemudian bisa mengalihkan tenaga kerja ke tugas lain, misalnya pasteurisasi susu. Karena seberapa higienisnya peternakan sapi perah, pun kuman masih bisa hadir dalam bentuk bakteri (*De Indische Courant*, 4 November 1938).

Konsumsi Susu

Orang-orang Eropa yang sudah pensiun telah berlangganan pada perusahaan susu di sekitar pinggiran Lawang. Sebuah perusahaan susu Eropa juga mencatat ada sekitar 40 orang pribumi yang membeli susu dalam jumlah kecil setiap hari. Dapat dilihat bahwa susu diminati oleh orang Eropa maupun penduduk lokal. Selain susu dari Malang, susu impor Jepang yang murah tak kalah populer di kalangan masyarakat pribumi. Mereka tersedia dalam kaleng dengan harga 11 dan 15 sen. Penduduk pribumi akan menjadi konsumen perusahaan secara signifikan apabila harga per liternya lebih rendah dari susu impor, yakni di kisaran 9-10 sen (*De Indische Courant*, 4 November 1938).

Pada 1926, susu sapi di Malang dijual di kisaran harga f 0,50 per liter untuk pelanggan baru. Apabila memesan lebih dari 15 liter, susu akan dijual seharga f 0,40 per liter (*De Indische Courant*, 27 Maret 1926). Beberapa tahun kemudian, harga susu mengalami perubahan. Pada 1930-an, harga rata-rata susu di Jawa Timur adalah 20 sen per liter. Harga ini lebih murah dibandingkan dengan di Jawa Barat yang harganya 22-24 sen (*De Indische Courant*, 4 November 1938).

Pendirian peternakan sapi perah skala besar melebihi 200 ekor sapi belum tentu dapat mendorong harga susu menjadi lebih moderat. Di Jawa Barat, misalnya, proses pengolahan susu dengan mesin mahal membuat susu tidak dapat dijual dengan harga murah (*De Indische Courant*, 4 November 1938). Solusinya, mereka mendirikan Bandoengsche Melk Centrale untuk mencegah anjloknya harga susu di kalangan penjual. Dengan begitu, harga susu dapat dipertahankan dan perang susu antar penjual tidak terjadi. Hal serupa pernah dilakukan di Malang sebagai respons atas krisis Malaise.

Krisis Malaise Melanda Malang

Ketika Malaise melanda perekonomian dunia, Hindia Belanda tidak luput terkena dampaknya. Salah satu kecamatan di Malang, Lawang, menghadapi krisis petani kecil sejak tahun 1933. Lawang banyak dihuni oleh para pegawai kolonial yang sudah pensiun dan enggan kembali ke negaranya. Di sini, mereka yang pengangguran terpaksa melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup saat krisis. C. Reynecke, misalnya, ia merupakan orang Belanda yang menjadi petani kecil di Malang. Ia kemudian menuliskan pengalamannya selama membangun pertanian kecil dalam sebuah laporan yang layak menjadi perhatian semua orang (*De Indische Courant*, 9 Juni 1939).

Berawal pada 1933, keluarga Reynecke meminta bantuan kepada Komite Pembantu Malang untuk memulai pekerjaan di Lawang. Komite memutuskan untuk membantunya dengan f 40 per bulan. Reynecke mengerti bahwa dari pendapatan krisis ini, ia harus menciptakan bisnis. Oleh karenanya, sebuah pertanian kecil didirikan (*De Indische Courant*, 9 Juni 1939).

Reynecke pergi ke konsultan pertanian, Ir. Van der Harst, dan juga lembaga pemberi kredit, I.M.I.W. Ia mendapat pinjaman sebesar f 275 dengan kewajiban membayar f 10 sebulan. Dari sana, padi, kacang, dan gogo mulai dibudidayakan. Namun, keuntungan yang sangat kecil

membuat pertanian tersebut gagal. I.M.I.W. kemudian menerima proposal lagi dari Tuan R untuk budidaya tanaman pisang, kopi, turi, jeruk manis, dan mawar. Usaha ini tidak sepenuhnya buruk. Akan tetapi, tanaman dan buah-buahan menjadi petaka ketika harga-harga anjlok. Reynecke lalu mencoba bisnis sampingan berupa peternakan ayam dan kambing. Tidak lama, peternakan ayam ditutup karena penyakit ayam dan biaya operasional yang tinggi. Selain itu, banyak kambing yang mati dan anakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Mereka sempat beralih ke usaha pemerahan susu kambing, tetapi lagi-lagi itu tidak cukup menguntungkan (De Indische Courant, 9 Juni 1939).

Reynecke juga mencoba mengembangkan perusahaan transportasi dari sapi dan banteng untuk mengangkut barang, tetapi ini pun pada akhirnya mengalami stagnasi. Bisnis Tuan R kemudian didorong ke arah produk susu karena selalu ada permintaan susu dari orang-orang Eropa yang pensiun. Hal tersebut menjadi awal mula mengapa pekerjaan ini disorot pada masa krisis. Pada tahun pertama, ia berhasil memproduksi 11.144 liter. Pada 1938, produksi mencapai 20.357 liter atau 57 liter per hari. Akhirnya, usahanya di bidang pertanian membuahkan hasil setelah bertahun-tahun. Sayangnya, pada 1938, produktivitas sapi menurun padahal biaya pemeliharannya semakin naik (De Indische Courant, 9 Juni 1939).

Berkaca pada cerita di atas, sebuah peternakan dapat berkembang dari sebidang tanah yang tidak terurus dengan dukungan simpatik dari organisasi pemerintah. Kini, krisis pertanian kecil telah berakhir dengan dukungan selama lima tahun. Tuan Reynecke, di akhir laporannya yang sangat komprehensif, menyimpulkan sebagai berikut,

“Pertanian kecil ini bagaimanapun juga telah berubah menjadi pertanian yang memberikan kehidupan bagi keluarga; meskipun tidak luas, kehidupan ini berdiri di atas kakinya sendiri, bebas dari dukungan, tetapi tidak bebas dari kekhawatiran.” (*De Indische Courant*, 9 Juni

Seandainya tidak ada usaha pemerahan sapi di masa krisis, peternakan di Lawang akan lenyap dan keluarga tadi akan selalu bergantung pada bantuan. Susu tentu memberikan alternatif bagi para petani kecil yang masih memfokuskan diri pada pertanian saja. Sudah banyak bantuan yang diberikan sejak krisis terjadi, beberapa diantaranya berhasil keluar dari krisis.

Pendirian Serikat Pekerja dan Koperasi

Di sela-sela krisis yang membawa banyak kerugian, sebuah dampak positif masih dapat ditemukan. Pada 1932, Departemen Kesehatan Hewan Provinsi melaporkan bahwa penjualan susu menjadi lebih rendah pada saat terjadinya krisis Malaise. Hal ini menyebabkan banyak peternakan sapi perah di Malang memiliki surplus susu yang besar. Akibatnya, terjadi persaingan yang ketat di antara penjual yang menyebabkan harga susu anjlok. Susu dijual dengan harga 13 sen dari yang awalnya 20 sen per liter. Para penjual susu di Malang dan sekitarnya

pun akhirnya membentuk serikat pekerja dengan menetapkan harga 18 sen per botol. Anggota yang menurunkan harga lebih rendah dari harga minimum akan mendapatkan denda yang tinggi (*De Indische Courant*, 2 Desember 1932). Ide pembentukan serikat pekerja ini menjadi cikal bakal pendirian koperasi susu di Malang.

Dua tahun kemudian, L. Levert dan P.H.I. Barentz, seorang insinyur pertanian di Malang, menginisiasi pembentukan koperasi peternak sapi perah di wilayah Malang. Pada mulanya, rencana ini bertujuan untuk mengajak para petani kecil di sekitar kediamannya untuk bekerja sama. Hal ini berkembang menjadi brosur yang cukup luas, yang mulai diterbitkan pada bulan September 1934 dengan judul “Basis voor de oprichting eener Coöperatie van klein-landbouwers in de residentie Malang” (Prinsip-prinsip untuk pendirian koperasi petani kecil di kediaman Malang). Di dalamnya diuraikan tujuan pendirian koperasi yang berdasar pada prinsip-prinsip sosial-ekonomi. I.M.I.W. kemudian menjanjikan dukungan penuh. Dari sini, muncul keinginan untuk memulai dari satu kelompok yang berkepentingan, dan jika berhasil, secara bertahap akan dijalankan pada kelompok lain. Pilihan pertama jatuh pada kelompok peternak sapi perah. Tentu, inisiasi ini sangat didukung oleh dokter hewan provinsi dan kota. Mereka memberikan informasi yang mengarah pada rencana baru (*Soerabaijisch Handelsblad*, 3 Mei 1935).

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Tuan Barentz memberikan penyuluhan pada hari Kamis, 2 Mei 1935 pukul 6.30 sore di ruang dewan balai kota (*De Indische Courant*, 25 April 1935). Pertemuan untuk rencana pendirian koperasi peternak sapi perah di Maison Parren ini dihadiri dengan baik. Pertemuan dihadiri oleh sekitar 70 orang, termasuk penggagasnya Tn. Barentz dan Tn. Levert. Dalam pertemuan tersebut, hadir Residen Bertsch dan asisten residen Van Rossen. Pertemuan juga dihadiri oleh bupati R.A.A., Sam dan sekretarisnya, walikota Lakeman, Alderman van Vrijberghe de Coningh dan anggota dewan Kho Sien Tjo, Tumbelaka, dan Raden Soedomo. Konsultan pertanian Ir. Van der Harst juga hadir bersama Tn. Polman, seorang pejabat di dinas penyuluhan pertanian. Hadir pula, kepala dinas peternakan provinsi Dr. Dieben, dokter hewan provinsi Dr Bakker, serta dokter pemerintah regional Dr Pesik dan Dr Slamet. Selain itu, komisaris Tn. Weber, anggota dewan A.M.V.J. Von Glahn, ada disana ditemani Tn. Schijfsma, propagandis aktif untuk pekerjaan kolonial. Selain itu, terdapat Tn. Kriesfeld, administratur pabrik gula Panggoongredjo, yang juga mendukung proyek ini (*Soerabaijisch Handelsblad*, 3 Mei 1935). Pertemuan ini juga dihadiri oleh para peternak sapi perah berskala kecil maupun besar di kabupaten dan kotamadya Malang. Terdapat 22 peternak sapi perah dari Eropa (termasuk wanita), Cina, dan warga lokal (*Soerabaijisch Handelsblad*, 14 Juni 1935). Mereka datang tanpa berkomitmen apapun, hanya akan ada penjelasan mengenai tujuan dan sasaran didirikannya koperasi. Setiap pihak yang berminat akan diberikan salinan cetak dari rencana tersebut yang berisi tentang pedoman koperasi sebelum bergabung (*De Indische Courant*, 25 April

Partisipasi dari begitu banyak pihak berwenang membuktikan bahwa pemerintah sangat serius dalam memperhatikan peluang yang bisa dihasilkan oleh para peternak (*Soerabaijasch Handelsblad*, 17 Mei 1935). Residen, walikota, dan bupati Malang telah menyatakan minat mereka pada rencana tersebut. Para peternak sapi perah juga menyatakan diri mendukung pendirian koperasi. Di malam itu, 17 peternak sapi perah, termasuk beberapa peternak sapi besar, mendaftar sebagai anggota koperasi yang akan didirikan (*Soerabaijasch Handelsblad*, 20 Mei 1935) (*Soerabaijasch Handelsblad*, 3 Mei 1935). Lebih lanjut, Tn. Barentz telah berdiskusi dengan kepala Departemen Urusan Ekonomi, Tn. J.H. van Mook, mengenai kemungkinan tindakan perlindungan pemerintah. Sisi penting lain dari masalah koperasi, yakni kepentingan pemerintah, kemudian dibahas (*Soerabaijasch handelsblad*, 3 Mei 1935).

Dengan persetujuan dari berbagai pihak, maka koperasi perusahaan susu didirikan di Malang. Kegiatan yang akan diatur oleh koperasi ini, antara lain: (a) pengumpulan susu, yang dibebaskan sepenuhnya kepada para anggota; (b) distribusi, yang akan dilakukan oleh koperasi, dan (c) pemeliharaan dan peningkatan ternak, yang di masa depan akan dilakukan secara kooperatif. Pemerintah memutuskan bahwa pusat susu koperasi merupakan satu-satunya yang dapat menjual susu pada konsumen. Monopoli memaksa semua peternak sapi perah untuk menjadi anggota koperasi dan menghilangkan kesempatan mereka untuk menjual susu kepada organisasi lain (*De Indische Courant*, 13 Juni 1935).

Pengumpulan susu dibiarkan sepenuhnya independen di tangan peternak. Kerja sama dapat dilakukan melalui pembelian pakan secara kolektif, perlengkapan operasi, serta kebutuhan peternakan lain. Susu yang baru dikumpulkan lalu diangkut ke kantor distribusi pusat secepat mungkin dalam tong yang disegel setelah pendinginan. Di pabrik pusat, susu yang sudah diterima akan diperiksa melalui laboratorium. Dasar dari inspeksi ini adalah peraturan provinsi dan kota. Hasil inspeksi akan menjadi tolak ukur dalam menilai susu yang dipasok. Terdapat beberapa kategori, diantaranya sangat baik, baik, cukup, dan tidak cukup. Kategori cukup akan dibagi lagi menjadi “masih bisa digunakan untuk koperasi” dan “tidak bisa digunakan untuk koperasi.” Susu kemudian akan mengalami perbaikan kualitas dengan berbagai metode seperti pasteurisasi dan sterilisasi. Hal ini memungkinkan susu yang tadinya tidak layak dikonsumsi menjadi layak dan bisa dijual di pasaran. Analisis susu kemudian akan digunakan untuk menentukan harga beli susu (*De Indische Courant*, 13 Juni 1935).

Harga susu juga dipengaruhi oleh kuantitas susu yang dikirim oleh masing-masing perusahaan. Peternakan besar, misalnya, akan menerima lebih banyak untuk 100 liter pertama daripada 100 liter kedua, dan seterusnya. Bagian terbaik dari susu dijual sebagai susu murni yang siap untuk dikonsumsi. Sisanya akan dibuat menjadi produk susu konvensional. Lalu ada susu olahan yang dimaksudkan untuk menjadi produk sampingan, seperti yoghurt, buttermilk, mentega, keju, dan lain-

lain (Soerabajasch Handelsblad, 3 Mei 1935).

Pengaturan ini bukan berarti tidak memiliki kendala. Susu dipasok dari peternakan besar dan kecil di sekitar Malang. Ada yang jumlahnya lusinan, tetapi banyak juga yang memiliki kurang dari sepuluh ekor sapi perah. Hal ini tentu membawa kerisauan bagi para peternak kecil. Pemeriksaan dan publikasi berkala mengenai kualitas susu yang dipasok memberikan tuntutan tinggi pada usaha kecil. Pemberian makan, penampungan hewan, dan fasilitas distribusi, semuanya harus memenuhi persyaratan yang ketat. Belum lagi dengan biaya botol, kapsul, dan upah para distributor. Mereka juga khawatir akan kelebihan susu. Ada ketakutan terus-menerus dari peternak sapi perah kecil akan tindakan kompetitif perusahaan besar. Jelas tidak semua hal dalam bisnis susu bisa dilakukan dengan mudah. Mempertahankan dan meningkatkan kawanan ternak juga merupakan hal yang sulit bagi sebagian besar peternak sapi perah. Mereka kekurangan uang dan kesempatan untuk melakukannya (*De Indische Courant*, 13 Juni 1935).

Pengaturan yang tepat untuk koperasi melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Oleh karena itu, setiap upaya untuk membuatnya gagal harus segera diatasi. Tn. Barentz dan Levert menjelaskan bahwa untuk menciptakan situasi yang diinginkan, diperlukan kerja sama total. Koperasi atas dasar monopoli dianggap sebagai bentuk paling pas untuk kepentingan peternak dan konsumen. Pengurus koperasi terdiri dari tiga orang manajer susu yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dibayar. Dalam kasus-kasus yang meragukan, anggota koperasi dapat mengajukan banding ke komite pengawas (*De Indische Courant*, 13 Juni 1935). Di samping pengurus ini, terdapat sebuah komite pelayanan publik yang mempromosikan kerja sama demi pengumpulan dan distribusi susu sebanyak mungkin. Komite ini juga bisa menangani kasus-kasus yang diajukan banding (*Soerabajasch Handelsblad*, 3 Mei 1935). Dengan koperasi, semua anggota yang terlibat bisa mendapatkan manfaat baik secara finansial maupun sosial dari kerja sama yang dilakukan. Para anggota memiliki suara dalam menentukan operasional koperasi. Semua laba yang dihasilkan oleh koperasi juga akan masuk ke kantong anggota. Setiap anggota mendapatkan imbalan secara proporsional sesuai dengan bagiannya dalam pasokan susu harian (*Soerabajasch Handelsblad*, 3 Mei 1935).

Baik perusahaan besar maupun kecil, perusahaan yang kuat maupun yang lemah secara ekonomi bisa mendapatkan keuntungan dari monopoli susu di Malang. Konsumen hanya akan menggantungkan permintaan susu pada mereka. Selain itu, bagi konsumen, monopoli membuat koperasi tidak dapat menetapkan harga secara sewenang-wenang karena ada harga jual maksimum dari pemerintah. Kepentingan konsumen bahkan akan diawasi oleh sebuah komite yang terdiri dari penduduk Malang, walikota Malang, dokter hewan provinsi dan kota, serta seorang dokter dari D.V.G (*De Indische Courant*, 13 Juni 1935).

Berbagai data, baik dari pengelola sapi perah sendiri maupun dari para ahli di bidang peternakan, diperlukan untuk mendukung rencana koperasi. Untuk mengetahui posisi ekonomi dan keuangan

peternakan sapi perah, pemerintah harus memiliki data-data dari para peternak. Pemerintahlah yang akan menetapkan kriteria mengenai bantuan yang akan diberikan pada para peternak. Dengan ini, pemerintah dapat menemukan cara untuk memfasilitasi keberlangsungan usaha pemerahan sapi di wilayah Malang (*Soerabaijasch Handelsblad*, 14 Juni 1935).

Koperasi juga mendapat dukungan dari I.M.I.W. (*De Indische Courant*, 4 Februari 1935). Mereka berperan sebagai komite eksekutif yang menyediakan pembiayaan untuk persiapan rencana tersebut. I.M.I.W. akan memastikan bahwa koperasi memiliki cukup uang untuk mempekerjakan beberapa karyawan dalam masa persiapan. Jika proyek ini berhasil, I.M.I.W. dapat terus memberikan dukungan moral dan finansial pada usaha-usaha lain yang mungkin akan ditambahkan. Pekerjaan operasional sepenuhnya diserahkan kepada koperasi di bawah pengawasan I.M.I.W. (*Soerabaijasch Handelsblad*, 3 Mei 1935).

Hal yang berkaitan dengan peternakan sapi juga dibahas. Dengan memusatkan semua sapi muda di kompleks pusat, pengendalian penyakit dapat lebih mudah dilakukan sehingga pengiriman sapi yang benar-benar bebas penyakit dapat dijamin di masa depan. Cara-cara untuk membasmi titik-titik infeksi di kandang juga dijelaskan. Sementara itu, pusat breeding farm perlu didirikan. Dokter hewan provinsi, Dr Bakker, kemudian mengemukakan gagasannya untuk mendirikan peternakan sapi bersama di Djoenggoh. Di sana, lahan penggembalaan (cadangan hutan) sangat baik untuk memulai pembibitan. Pengelolaan yang seperti ini membutuhkan modal yang besar. Jika pemerintah tidak memberikan bantuan, lembaga kredit sosial bisa diandalkan karena pertanian semacam itu akan dilihat sebagai objek yang menghasilkan keuntungan (*Soerabaijasch Handelsblad*, 3 Mei 1935).

Semua orang optimis dengan pendirian pertanian kooperatif ini. Dana dialokasikan oleh I.M.I.W untuk biaya awal, survei dilakukan, lebih banyak pertemuan diadakan, statistik dan grafik produksi dibuat, serta diskusi antara pemerintah dan para petani kerap terjadi. Memorandum disusun, didistribusikan dan diterbitkan, begitu juga brosur, bahan perbandingan dikumpulkan untuk studi lebih lanjut. Komite, manajemen sementara, dewan pengawas dan penasihat telah dibentuk. Singkatnya, hampir semua dilakukan untuk membuat koperasi ini berhasil. Hanya saja ada satu hal yang hilang, yakni kerja sama antar pihak-pihak yang berkepentingan. Karena itu, proyek ini kandas setelah dua tahun dicanangkan (*De Indische Courant*, 22 Januari 1937).

Kesimpulan

Pada awal abad XX, peternakan-peternakan sapi perah berdiri di Malang sebagai respons atas meningkatnya permintaan susu sapi di sekitar wilayah tersebut. Pada 1920-an, industri susu sapi di Malang telah mengalami perkembangan yang stabil. Namun, Depresi ekonomi membuat penjualan menurun dan harga susu anjlok seketika.

Harga jual yang merosot lantas membuat mereka terdorong untuk membentuk serikat pekerja di akhir 1932. Serikat ini bertujuan untuk menetapkan harga jual agar peternak tidak semakin merugi. L. Levert dan P. H. I. Barentz, seorang insinyur pertanian di Malang, menyadari bahwa pembentukan suatu pusat untuk mewadahi kepentingan para peternak akan menghasilkan banyak manfaat. Rencana ini kemudian disampaikan pada 1935 dan mendapat dukungan dari pemerintah maupun peternak di wilayah tersebut. Dari sana, monopoli susu diberlakukan di Malang. Koperasi menjadi satu-satunya organisasi yang dapat menjual susu. Di sini, pembeli pun mendapat keuntungan karena koperasi tidak dapat menaikkan harga dengan sewenang-wenang. Dana sudah dialokasikan dan berbagai persiapan telah dilakukan. Sayangnya, kurangnya kerja sama antar pihak yang berkepentingan membuat proyek ini gagal setelah dua tahun dicanangkan.

Referensi

Surat Kabar

- De Indische Courant*, 27 Maret 1926.
De Indische Courant, 9 Juni 1939.
De Indische Courant, 15 Oktober 1928.
De Indische Courant, 2 Desember 1932.
De Indische Courant, 4 Februari 1935.
De Indische Courant, 25 April 1935.
De Indische Courant, 13 Juni 1935.
De Indische Courant, 22 Januari 1937.
De Indische Courant, 25 Oktober 1938.
De Indische Courant, 4 November 1938.
Eerste lustrum van het klein landbouwbedrijf "Crisis",
Bambangan, Lawang (1933-1938), 1938.
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 2 April 1918.
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 8 Desember
1931.
Soerabaijasch Handelsblad, 15 Desember 1933.
Soerabaijasch Handelsblad, 14 Juni 1935.
Soerabaijasch Handelsblad, 3 Mei 1935.
Soerabaijasch Handelsblad, 17 Mei 1935.
Soerabaijasch Handelsblad, 20 Mei 1935.
Survey Directorate Head Quarters ALFSEA. 1946. Malang.
Diakses melalui <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl>

Artikel, Buku, dan Skripsi

- Amin, I. R. (2006). "Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Peternak Sapi Perah di Pangalengan (1969 – 1998)". Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Booth, A., O'Malley, W. J., Weidemann, A. (Eds.). (1988). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Bosma, U., Cordero, J. G., Knight, G. R. (eds.). (2007) "*Sugarlandia Revisited: Sugar and Colonialism in Asia and the Americas, 1800 to 1940*". International Studies in Social History. Vol. 9.
- Kartodirdjo, S. & Suryo, D. (1991). *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Knight, G. R. (2013). *Commodities and Colonialism: The Story of Big Sugar in Indonesia, 1800-1942*. Leiden: Brill.
- Kriswijanto, A. (1998). "*Peternakan Sapi di Madura Tahun 1900-1937 Suatu Tinjauan Sosial Ekonomi*". Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Padmo, S. (2004). *Bunga Rampai Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Purnomo, P. (2001). "Perkembangan Peternakan Sapi Perah dan Serangan Wabah Anthrax di Boyolali". Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.

Subandriyo & Adiarto. (2009). “Sejarah Perkembangan Peternakan Sapi Perah”, dalam Krishna Agung Santosa, Kusuma Diwyanto, Toto Toharmat (Eds.). *Profil Usaha Peternakan Sapi Perah di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Touwen, J. (2002) “Regional Inequalities in Indonesia in the Late Colonial Period”. *Lembaran Sejarah*. Vol. 3. No. 1, 102-123.

GRIYA UNTUK KAWULA: PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA YOGYAKARTA, 1950-1978

Tamim Umar Herdiyanto

tamim.umar1903@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Kebutuhan akan hunian atau ruang hidup layak merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia pasca-Kemerdekaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi kebijakan pemerintah dan proses berlangsungnya pembangunan perumahan rakyat di Kota Yogyakarta pada 1950–1978. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan perumahan di Kota Yogyakarta sejak 1950 tidak hanya merupakan upaya untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat, tetapi juga upaya dekolonisasi. Selain itu, berbagai fenomena yang terjadi di Kota Yogyakarta juga merupakan alasan dibangunnya perumahan rakyat selain peran pemerintah dalam penyediaan perumahan rakyat melalui berbagai kebijakan dan program yang dicanangkan.

Abstract

The need for housing or living space is one of the problems faced by post-Independence Indonesia. This research aims to examine the transformation of government policies and the ongoing process of public housing construction in the city of Yogyakarta in 1950–1978. The results of the study show that housing construction in Yogyakarta City since 1950 was not only an attempt to provide housing for the people, but also an effort to decolonize. Apart from that, various phenomena that have occurred in the city of Yogyakarta are also reasons for the construction of public housing in addition to the government's role in providing public housing through various policies and programs that have been launched.

Kata Kunci

Perumahan rakyat; Kota Yogyakarta; Pembangunan Perumahan

Keywords

Public Housing; Yogyakarta City; The Development of Public Housing

Pendahuluan

Sejak masa kolonial, pemerintah Belanda telah menaruh perhatian pada perumahan rakyat. Hal tersebut tercantum dalam peraturan *Burgerlijke Woningenregeling 1934* (Peraturan Perumahan Sipil) yang termasuk dalam *Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij aaneming van Openbare Werken in Indie 1941* (Syarat dan Ketentuan Umum Pelaksanaan Pekerjaan Umum di Hindia), serta *Indische Comptabiliteits Wet (UU Akuntansi Hindia)* (Yosita et al., 2015: 1). Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departement van Verkeer en Waterstaat (Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Air) yang menangani perumahan rakyat (*Volkshuisvesting*) dan bangunan gedung atau rumah.

Hal yang serupa juga dilaksanakan pemerintahan Jepang selama masa Penjajahan. Pada masa ini, Jepang membentuk lembaga sejenis bernama *Doboku* sebagai pengganti Departement van Verkeer en Waterstaat (Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan Pengelolaan Air) (Suparwoko, 2013: 1). Namun, pada masa tersebut, kebijakan seputar pembangunan perumahan rakyat tidak terlalu berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh fokus kebijakan politik pemerintah Jepang yang hanya terfokus pada kepentingan perang dan militer. Oleh karena itu, dalam lembaga buatan Jepang tersebut, kebijakan seputar perumahan rakyat hanya sebatas pembahasan antara Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara (Suwardi Surjaningrat), Otto Iskandar Dinata dan para pemimpin Jepang kala itu, tanpa adanya implementasi yang nyata (Colombijn, 2011: 442).

Pasca-Kemerdekaan, sesuai amanat dalam UUD NRI 1945 amandemen ke-4 yang tertuang dalam pasal 28H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Prayitno et al., 2012: 14). Dengan demikian, pada 1947 Indonesia mendirikan lembaga yang mengenai pengadaan perumahan rakyat yaitu, Balai Perumahan di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum. Akan tetapi, balai tersebut mengalami kendala dalam pelaksanaannya yang disebabkan kondisi negara yang tidak stabil secara politik dan keamanan, terlebih meletusnya revolusi fisik pada 1945-1949. Oleh karena itu, kebijakan seputar perumahan rakyat melalui departemen tersebut tidak terlalu maksimal dan efisien dirasakan oleh masyarakat.

Kongres ini dinilai sebagai tonggak sejarah dan sebagai momentum di bidang perumahan rakyat (Eryudhawan, 2010: 177). Semangat Pada 25-30 Agustus 1950 dilaksanakan Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung. Hasil dari kongres tersebut adalah pengadaan perumahan sederhana bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek fisik dan sosial. Bung Hatta menyampaikan bahwa cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan hal mustahil. Dalam pidatonya, Bung Hatta menyatakan bahwasanya

“...kesan saya tentang keadaan Perumahan Rakyat. Keadaan yang menyedihkan yang harus kita ubah secepat-cepatnya kejurusan perbaikan. Bukan suatu pekerjaan mudah karena mengenai berjuta-juta rumah, yang harus diperbaharui dan diadakan baru untuk mengatasi kekurangan rumah dan untuk penampungan tambahan jiwa yang berjumlah kira-kira satu setahun” (Eryudhawan, 2010: 175).

atas pengadaan rumah mengisyaratkan yang kemudian, pada 25 April 1952 dibentuklah Jawatan Perumahan Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah (Ronodirdjo, 1983: 425). Ada empat tugas pokok jawatan tersebut yakni, melakukan penelitian teknis-teknologis, membuat konsep pemikiran kebijaksanaan perumahan, mengadakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat, dan mengatur penyelenggaraan pembiayaan pembangunan perumahan. Selain itu, dibentuk pula Badan Pembantu Perumahan Rakyat dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor U. 25/28/22 tanggal 22 Maret 1951 yang memiliki tugas untuk badan penasehat yang bertugas memberi pertimbangan yang diperlukan Jawatan Perumahan Rakyat (Yudohusodo, 1991: 111).

Sebagai bentuk lanjutan, diadakanlah Kongres Perumahan Kedua di Jakarta pada 4 Agustus 1952. Dalam kongres tersebut Bung Hatta berpesan bahwa

“...titik berat daripada usaha membangun rumah rakyat yang murah dan sehat itu hendaklah terletak di daerah, sebagai isi yang terpenting daripada pemerintahan otonomi. Membangun rumah rakyat yang menjamin kesehatan, dan kesenangan diam di dalamnya dan murah harganya, itulah masalah yang harus dipecahkan” (Eryudhawan, 2010: 79).

Memasuki masa senja kala pemerintahan Sukarno memasuki terbitnya pemerintahan Soeharto, pembangunan perumahan tetap menjadi salah satu fokus yang kebijakan pemerintah. Presiden Soeharto dengan pencanangan perumahan untuk masyarakat yang tertuang dalam Rencana Lima Tahun atau Repelita 1-6 selama 1969-1994 (Suparwoko, 2013: 12-15). Hal ini tercermin dalam Lokakarya tingkat Nasional Perumahan dan Permukiman I pada 4-6 Mei 1972 di Gedung Bina Graha, Jakarta yang merupakan tonggak kedua dalam sejarah pembangunan perumahan setelah Kongres Perumahan Sehat di Bandung pada 1950. Hasil dari lokakarya tersebut antara lain, dibutuhkannya sistem kelembagaan, sistem keuangan, dan sistem penunjang kebutuhan mengenai perumahan. Tindak lanjut dari Lokakarya I yakni, dibentuknya Badan Kebijakan Perumahan Nasional (BKPN) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1974 yang berfungsi sebagai perumus garis-garis kebijaksanaan dan pelaksana di bidang pengembangan dan pembinaan perumahan. Selain itu, pada 18 Juli 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974 didirikanlah Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional

dibutuhkannya sistem kelembagaan, sistem keuangan, dan sistem penunjang kebutuhan mengenai perumahan. Tindak lanjut dari Lokakarya I yakni, dibentuknya Badan Kebijakan Perumahan Nasional (BKPN) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1974 yang berfungsi sebagai perumus garis-garis kebijaksanaan dan pelaksana di bidang pengembangan dan pembinaan perumahan. Selain itu, pada 18 Juli 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974 didirikanlah Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebagai badan usaha negara untuk menjalankan program perumahan nasional (Ronodirdjo et al., 1983: 486–487).

Tidak terkecuali di Kota Yogyakarta, sejak awal hingga pertengahan 1900-an, kota ini mengalami pertumbuhan permukiman masyarakat. Pada awalnya, permukiman yang tumbuh masih terbatas di sekitar tembok keraton yang berkaitan dengan tempat tinggal abdi dalem keraton Yogyakarta dan rumah pangeran (Ari Setyastuti et.al, 2009: 139-140). Permukiman ini semakin beragam akibat pertumbuhan penduduk di Yogyakarta yang turut meningkat, baik populasi penduduk lokal, maupun populasi penduduk asing yang saling memiliki basis permukiman masing-masing (Nur Aini Setiawati et.al, 2019: 12-15). Hal ini menyebabkan tumbuhnya permukiman-permukiman khusus etnis masyarakat tertentu, seperti Pecinan dan Kota Baru. Memasuki pertengahan abad ke-20, untuk pertama kali di Yogyakarta diadakan program perumahan rakyat oleh Jawatan Perumahan Rakyat.¹ Sejak saat itu, perumahan rakyat di Kota Yogyakarta semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan akan papan bagi masyarakat luas.

Kajian mengenai pembangunan perumahan rakyat telah dikaji oleh beberapa akademisi. Salah satunya yakni, karya Freek Colombijn yang berisi mengenai permasalahan penyediaan rumah yang dihadapi Indonesia.² Masalah yang ditimbulkan setelah Indonesia merdeka adalah penyediaan rumah bagi seluruh kalangan masyarakat, berbeda dengan zaman kolonial yang hanya berfokus pada segelintir kelompok elite. Selanjutnya, artikel jurnal yang ditulis oleh James L Cobban.³ Pada artikel tersebut berisi penjelasan kebijakan permukiman di Indonesia (Hindia Belanda saat itu) selama 1900-1940. Ketertarikan dalam pembangunan rumah merupakan isu urban dan isu kemiskinan yang terjadi di Hindia Belanda dan bagaimana pemerintah kolonial menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kajian lainnya yakni, tesis oleh Idam Setiyawan yang memaparkan mengenai kondisi Kampung Kota Surabaya, bagaimana perkembangan perumahan rakyat mulai dari pembangunan hingga permasalahan yang dihadapi.⁴ Sayangnya, kedua kajian awal menitikberatkan pada aspek spasial nasional, kajian mengenai Kota Yogyakarta kurang dibahas mendetail dalam artikel

¹ Laporan Bulanan Panitia Perumahan Kota Praja Yogyakarta Pekerjaan pendirian perumahan rakyat, 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY

² *Public Housing in post-colonial Indonesia: The Revolution of Rising Expectations*

³ *Government Housing Policy in Indonesia 1900-1940*

⁴ Mendirikan Perumahan Rakyat: Menyiasati Kampung Kota Surabaya 1906-1990

jurnal tersebut. Sedangkan kajian ketiga menitikberatkan pada aspek spasial Kampung Kota Surabaya.

Dapat disimpulkan berdasarkan tinjauan di atas bahwasanya belum terdapat narasi akademik yang menggambarkan mengenai Perumahan Rakyat di Kota Yogyakarta pada 1950–1978. Oleh karena itu, kajian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan membahas mengenai Perumahan Rakyat di Kota Yogyakarta tahun 1950–1978. Selain itu, penulis berfokus pada 1950-an sebagai titik awal karena cerminan atas suasana bangsa yang telah merdeka dan adanya gagasan awal mengenai pengadaan rumah. Kemudian, batas penelitian pada 1978 karena tahun tersebut pencahangan pembangunan perumahan rakyat telah memasuki masa pembangunan yang lebih masif dan terstruktur serta sebagai penjelasan bagaimana perkembangan pembangunan perumahan rakyat pada masa pemerintahan Sukarno dan awal pemerintahan Soeharto berlangsung. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah, apa yang mendasari kebijakan pembangunan perumahan rakyat di Kota Yogyakarta pada 1950–1978 serta bagaimana perkembangan pembangunan perumahan rakyat di Kota Yogyakarta pada 1950–1978.

Penelitian ini menggunakan arsip yang didapat dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY serta Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Selain itu, digunakan pula sumber berupa surat kabar dan sumber pustaka lain berupa buku serta artikel jurnal. Mengenai sumber surat kabar, penulis memperoleh dari Perpustakaan Nasional yang dapat diakses secara daring dan Surat Kabar Kompas. Untuk sumber pustaka buku, penulis peroleh dari Perpustakaan Geografi UGM dan PSKK UGM.

Perumahan Rakyat pada Masa Revolusi

Pasca-Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dalam amanat terpisah pada 5 September 1945 menyatakan bahwa wilayah Keraton Yogyakarta berikut juga wilayah Keadipatian Paku Alam bergabung dan menyatakan mendukung penuh atas terbentuknya Negara Republik Indonesia yang baru lahir (Soemardjan, 2009: 72). Pengakuan dan peleburan kedua wilayah yang sebelumnya termasuk ke dalam *Vorstenlanden* ini, secara resmi diakui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1952. Undang-undang yang menyatakan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa yang otonom dan berkedudukan setara dengan provinsi. Daerah dengan pertanggungjawaban gubernur sekaligus Sultan dan wakil gubernur sekaligus Adipati Paku Alam, secara langsung kepada pemerintahan pusat di Jakarta.

Bersamaan dengan proses pembentukan Republik dan lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu permasalahan yang muncul adalah kebutuhan perumahan rakyat. Permasalahan tersebut muncul tidak hanya untuk mengakomodasi kebutuhan rakyat, tetapi juga sebagai upaya dekolonisasi di luar perang, diplomasi, dan pengembangan pemerintahan baru yang mandiri (Colombijn, 2013: 1). Pada 1950-an, Indonesia mencari cara untuk meruntuhkan pengaruh Barat, salah satunya dengan membangun masyarakat baru. Dalam hal ini, pembangunan perumahan rakyat merupakan respons pemerintah atas kebutuhan masyarakat sekaligus upaya dekolonisasi (Colombijn, 2013: 7). Dekolonisasi juga membawa perubahan sosial yang mendalam. Perubahan sosial yang terjadi selama dekolonisasi yang terwujud dalam pembentukan kota-kota yang kemudian menimbulkan adanya kompleksitas tatanan sosial perkotaan.

Untuk mengetahui dan memahami proses perkembangan perumahan rakyat pada dekade ini, maka perlu diketahui pula bahwa kebijakan ini telah dimulai oleh pemerintah kolonial di Hindia-Belanda (Colombijn, 2011: 438). Sementara itu, kebijakan ini sempat terbengkalai saat meletusnya revolusi fisik, tidak terkecuali dalam hal ini di Kota Yogyakarta. Keadaan yang genting dan penuh pertempuran ini menyebabkan banyak perumahan dan hunian terbengkalai hingga mengalami kerusakan berat secara fisik. Pada saat itu, di Yogyakarta terdapat banyak peninggalan aset bangunan pemerintahan karena sebelumnya Yogyakarta menjadi Ibu kota Negara Indonesia untuk sementara, sebelum dipindahkan kembali ke Jakarta pada 17 Agustus 1950. Kemudian, banyaknya bangunan peninggalan Belanda yang ada di kota ini memerlukan pengaturan lebih lanjut. Selain itu, jumlah penduduk di Yogyakarta yang kian bertambah. Salah satu penyebabnya yakni, pasca revolusi fisik, pejuang yang berkumpul bersama di Yogyakarta menghasilkan kota ini menjadi penuh sesak (Colombijn, 2013: 239).

Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia kemudian membentuk Kantor Perumahan Jogjakarta (KPJ) pada 4 Juli 1949 yang didasarkan pada putusan Menteri Negara R.I./Koordinator Keamanan Nomor R.1/4 Tahun 1949. Dalam surat keputusan tersebut, Kantor Perumahan Jogjakarta bertugas untuk

“...mengatur urusan mempergunakan gedung-gedung atau rumah-rumah atau sebagian-dari padanya untuk:

- a. Kepentingan Negara
- b. Untuk tempat tinggal perumahan partikelir atau maksud lain”⁵

Sebagai bentuk lanjutan dari berdirinya Balai Perumahan pada 1949 yang bersifat nasional, pada 1 Desember 1949, Kementerian Pekerjaan Umum Kantor Perumahan membentuk Balai Perumahan K.P.U. yang bertugas untuk menyelenggarakan perumahan untuk rakyat di daerah.⁶ Sebelumnya, tugas KPJ dibebankan pada Balai Perumahan sebagai pengatur urusan lokal (pengelolaan aset bangunan) dan persiapan mengenai persiapan keperluan Pemerintah. Berkaitan dengan tugas KPJ telah sebagian besar selesai, fokus Balai Perumahan kini berada pada pelaksanaan kebijakan perumahan rakyat. Kondisi Yogyakarta pada saat itu mengalami kerusakan kurang lebih sebanyak 15.000 rumah yang kemudian tidak dapat dipergunakan kembali.⁷ Oleh karena itu, fokus kebijakan Balai Perumahan kini lebih terarah kepada mengadakan persiapan mengenai perbaikan kerusakan-kerusakan hunian tersebut.



Figur 1. Perumahan Rakyat Minggiran Kotapraja Yogyakarta dibangun pada 1951. (Sumber: Arsip DPK Kota Yogyakarta)

⁵ Surat Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Jogjakarta Nomor S.5/9/10 Tahun 1949 perihal Kantor Perumahan Jogjakarta. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta.

⁶ Surat Kementerian Pekerjaan Umum Kantor Perumahan Nomor S.1/1/15 Tahun 1949 perihal Kantor Perumahan Jogjakarta. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta.

⁷ Surat Kementerian Pekerjaan Umum Kantor Perumahan Nomor S.1/1/15 Tahun 1949 perihal Kantor Perumahan Jogjakarta. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta.



Figur 2. Perumahan Rakyat Batjiro Kotapraja Yogyakarta dibangun pada 1951. (Sumber: Arsip DPK Kota Yogyakarta)

Perumahan Rakyat pada 1950-an

Pada 7 Januari 1952, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga menyerahkan KPJ kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.⁸ Melalui penyerahan ini, maka secara otomatis tanggung jawab KPJ berada di Pemerintah Daerah DIY. Penyerahan tersebut dilaksanakan karena terdapat perubahan penugasan yang sebelumnya berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga diubah menjadi tugas Kementerian Sosial. Selain itu, pada yang sama, kepala daerah-daerah Otonom dianjurkan untuk membentuk Yayasan Kas Pembangunan (YKP) sebagai tempat menabung untuk membeli rumah (Yudohusodo (ed.) et.al, 1991: 112). Pendanaan YKP berasal dari anggaran belanja Pemerintah yang disalurkan melalui Jawatan Perumahan Rakyat.

Wacana mengenai pembangunan perumahan rakyat sudah digulirkan semenjak Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung pada 1950 dan Kongres Perumahan Rakyat ke-2 di Jakarta, 4 Agustus 1952 (Eryudhawan (ed.) et.al, 2010: 89). Setelah serangkaian percobaan dalam pelembagaan, pembangunan perumahan rakyat di Kota Yogyakarta dimulai pada 1952. Pada awal pembangunan, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan uang pinjaman untuk mendirikan perumahan rakyat dalam 1952.⁹ Uang pinjaman yang diberikan sebe-

⁸ Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor Kab.1/1/6 Tahun 1952 perihal Penyerahan K.P.J. kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta. Koleksi Arsip DPAD DIY.

⁹ Surat Djawatan Perumahan Rakjat Nomor Jog/Lem 2/i/5 tahun 1953 perihal uang pinjaman kepada Daerah Otonoma untuk mendirikan perumahan rakyat yang diberikan pada 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Rp69.570,00 serta sisa uang pinjaman yang ada yakni sebesar Rp305.430,00.

Uraian pembayaran sebagai berikut, sejumlah Rp67.000,00 digunakan untuk bahan bangunan negeri.¹¹ Pada 15 Desember 1952, sejumlah Rp470,00 dibayarkan kepada N.V. "IWOCO" Jogjakarta sebagai biaya angkut kayu sebanyak 2 (dua) rit dari Semarang menuju Yogyakarta. Kemudian, pada 19 Desember 1952 dibayarkan sebesar Rp2.100,00 untuk pengangkutan kayu sebanyak 7 (tujuh) rit atau dua truk.

Memasuki 1953, persiapan pembangunan perumahan rakyat kian matang. Pembangunan yang direncanakan pada Maret 1953 karena pengiriman bahan baku pembangunan berupa kayu yang berasal dari Semarang selesai pada minggu kedua bulan Januari, dan kayu tersebut diawetkan terlebih dahulu menggunakan *Supperwolmanzout*.¹² Persiapan yang dilakukan menelan biaya sebesar Rp1.200,00. Sisa keuangan yang dimiliki sebesar Rp304.230,00.

Penjelasan mengenai biaya yang dikeluarkan yakni, pada 5 Januari 1953, dibayarkan sebesar Rp600,00 kepada N.V. "IWOCO" Jogjakarta sebagai biaya pengangkutan kayu untuk perumahan rakyat dari Semarang ke Jogja sebanyak 2 (dua) rit. Kemudian, di tanggal yang sama, dibayarkan sejumlah Rp300,00 untuk biaya angkut 100 (seratus) pintu dan 65 jendela dan dibayarkan sejumlah Rp300,00 untuk pengangkutan 100 (seratus) pintu dan 60 (enam puluh) jendela.¹³

Perencanaan pembangunan perumahan rakyat mengalami sedikit kendala karena pengiriman kayu dan obat pengawetan kayu yang dikirim dari Semarang mengalami keterlambatan.¹⁴ Selanjutnya, pada Februari mengalami pengeluaran biaya sebesar Rp51,61 dan sisa uang pinjaman sebesar Rp304.178,39. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Vereenigde Javasche Houthandel Maatschappij (Kantor Perdagangan Kayu Jawa) kepada Regentschap (bupati). Selain itu, pada Februari 1953, terdapat surat pertanggungjawaban atas penggunaan uang pinjaman pemerintah untuk perumahan rakyat pada 1951 dan 1952. Pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Inspeksi Perumahan Rakyat Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Semarang. Seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY diwajibkan untuk mengisi daftar pemakaian uang dalam kurun waktu tersebut.¹⁵

¹¹ Daftar Pertanggungjawaban dari Keuangan Panitia Perumahan Rakyat Kotapradja Jogjakarta bulan Desember 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

¹² Laporan Bulanan Panitia Perumahan Rakyat Kotapradja Jogjakarta untuk bulan: Januari 1953 Nomor 36/PRKJ/53 Tahun 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY.

¹³ Daftar Pertanggungjawaban dari Keuangan Panitia Perumahan Rakyat Kotapradja Jogjakarta bulan Januari 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY.

¹⁴ Laporan Bulanan Panitia Perumahan Rakyat Kotapradja Jogjakarta untuk bulan: Februari 1953 Nomor 54/PRKJ/53 tahun 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY.

¹⁵ Surat Inspeksi Perumahan Rakyat Djateng dan Daerah Istimewa Jogjakarta Tromolpos 132. Nomor F 8/2/6 perihal pemakaian uang pinjaman pemerintah untuk perumahan rakyat pada 1951 dan 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Akan tetapi, pembangunan perumahan rakyat tersebut mengalami kendala lain. Kendala yang dihadapi yakni, adanya peraturan yang tumpang tindih.¹⁶ Pada awalnya tercantum dalam Staatsblaad 1948 Nomor 33 yang kemudian mengalami perubahan dan penambahan sebanyak dua kali yakni, Staatsblaad 1948 Nomor 217 dan terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/1953. Selain itu, terdapat peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Negara Koordinator Keamanan Nomor R.I./4. Kedua peraturan tersebut memiliki kedudukan yang sama. Urusan lapangan perumahan diatur oleh Pemerintah Pusat, yang seharusnya hanya ada satu peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Ketua Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu, Paku Alam VIII mengirimkan surat kepada Pemerintah Pusat agar peraturan yang tumpang tindih dapat segera diselesaikan dengan saran pencabutan Peraturan Menteri Negara Koordinator Keamanan Nomor R.I./4 dengan undang-undang. Kemudian, jika saran tersebut disetujui maka pembiayaan KPJ dibebankan kepada Pemerintah Pusat, bukan daerah. Mengingat kondisi keuangan Pemerintah Daerah.

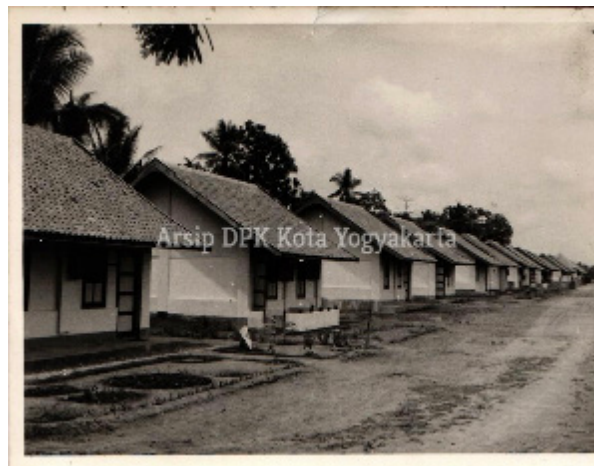
Sedangkan, mengenai penyelenggaraan akan tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk tindak lanjut mengenai peraturan perumahan rakyat dan badan penyelenggara, dilaksanakan pertemuan antara Panitia Negara Pemeriksa Urusan Perumahan dengan Instansi-instansi di Yogyakarta perihal urusan perumahan.¹⁷ Pertemuan tersebut menghasilkan penjelasan bahwasanya Pemerintah dengan adanya panitia tersebut akan memperbaiki keadaan perumahan baik pengadaan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur. Selain itu, kondisi mengenai perumahan bukanlah hanya permasalahan yang dihadapi oleh Negara Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lainnya. Kesulitan-kesulitan tersebut terjadi karena jumlah tentara meningkat, kementerian baru dan jawatan yang menaunginya di kota-kota dan daerah, dan peningkatan jumlah penduduk yang membutuhkan hunian. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya *wilde occupatie* atau pendudukan secara ilegal atau tanpa hak atas suatu rumah atau tanah. Terakhir, mengenai Peraturan Menteri Negara Koordinator Keamanan Nomor R.I./4 sudah tidak berlaku dan urusan mengenai perumahan dibebankan kepada Kementerian Sosial.

Dalam kurun waktu 1951-1954, Jawatan Perumahan Rakyat telah membiayai pembangunan perumahan rakyat di Yogyakarta sebanyak 200 buah dengan rincian pada 1951 dibiayai sebanyak 62 buah; 1952 sebanyak 73 buah; 1953 sebanyak 65 buah; dan 1954 berjumlah 0 buah (Colombijn, 2013: 342).

¹⁶ Surat Ketua Dewan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Peraturan-peraturan tentang urusan perumahan Nomor 9311/XV/A/53. Koleksi Arsip DPAD DIY.

¹⁷ Tjatanan pertemuan antara Panitia Negara Pemeriksa Urusan Perumahan dengan instansi-instansi di Jogjakarta yang bersangkutan dengan urusan perumahan pada tanggal 12 Juni 1954 di Bangsal Kepatihan Jogjakarta. Koleksi arsip DPK Kota Yogyakarta.

Memasuki 1956, berdasarkan harian Kedaulatan Rakyat dilaporkan bahwasanya di Kotapraja Yogyakarta dibangun perumahan rakyat dengan tipe 5 H (Kedaulatan Rakyat, 20 Juni 1956). Dengan rumah utama berukuran 6x6 dan rumah samping 5x5. Rumah tersebut dilengkapi dengan kamar mandi W.C. dan sumur. Mengenai harga terdapat perbedaan tergantung pada material yang digunakan dan wilayah dibangunnya perumahan tersebut. Contohnya, rumah yang dibangun pada 1952 memiliki harga Rp14.175,00 dengan tembok ramuan glugu. Sedangkan rumah yang dibangun pada 1953 memiliki harga Rp16.600,00 dengan tembok ramuan kayu tahun model paku, harga Rp16.750,00 dengan kayu jati model paku. Kemudian, rumah yang dibangun pada 1954 dibanderol Rp20.000,00 dengan ramuan kayu jati model biasa dan harga Rp22.050,00 dengan ramuan sama tetapi harga bahan naik. Selanjutnya, rumah pendirian pada 1955 dibanderol Rp23.300,00 disebabkan harga bahan mengalami kenaikan dan terakhir, memiliki harga Rp25.000,00 yang disebabkan kenaikan harga bahan dan upah pekerja.



Figur 3. *Perumahan Rakyat Tegalrejo Kotapraja Yogyakarta pada 1956. (Sumber: Arsip DPK Kota Yogyakarta)*

Pembangunan perumahan rakyat semakin masif dilakukan. Berdasarkan Laporan Inspeksi Perumahan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Desember 1956 dan Januari 1957 bahwasanya pada 21 Februari 1955 telah diselesaikan pembangunan perumahan rakyat di Kotapraja Yogyakarta sebanyak 40 buah (38 buah dalam kenyataannya).¹⁸ Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp831.250,00. Pendanaan pembangunan perumahan rakyat didapatkan dari dana JKP Kotapraja Yogyakarta.

¹⁸ Laporan Pekerdjaan-pekerdjaan dari Inspeksi Perumahan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta bulan: Desember 1956. Koleksi arsip DPAD DIY.

Selama periode tersebut juga dilakukan pembangunan perumahan rakyat sebanyak 11 (sebelas) buah. Rincian pembangunan sebagai berikut:

Nama Pekerjaan	Biaya	Keterangan
Pembangunan 3 Buah	Rp69.000,00	3 buah selesai
Pembangunan 2 Buah	Rp43.700,00	2 buah selesai
Pembangunan 3 Buah	Rp31.725,00	Rata-rata 70% selesai
Pembangunan 1 Buah	Rp6.900,00	Selesai 50%
Pembangunan 2 Buah	Rp11.750,00	Selesai 50%

Dalam laporan bulan Januari 1957 disebutkan bahwa pembangunan perumahan rakyat mencapai 8 buah, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Biaya	Keterangan
Pembangunan 2 Buah	Rp43.700,00	2 buah selesai
Pembangunan 3 Buah	Rp42.300,00	Rata-rata 80% selesai
Pembangunan 1 Buah	Rp12.650,00	70% selesai
Pembangunan 2 Buah	Rp21.150,00	60% selesai

Pada 1956, Biro Perancang Negara merumuskan Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956–1960 (Yudohusodo et.al, 1991: 112). Dalam rencana tersebut disebutkan bahwasanya program pemerintah di bidang perumahan dilakukan secara terbatas. Selain itu, ditetapkannya Keputusan MPRS Nomor 11 Tahun 1960 yang mengatur soal perumahan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat (Ronodirdjo et.al, 1983: 486). Lebih lanjut mengenai pembiayaan pembangunan perumahan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Namun, akan dilakukannya usaha bersama dengan masyarakat dalam bentuk koperasi perumahan.

Perumahan Rakyat pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pengembangan kebijakan pembangunan perumahan rakyat dalam kurun waktu 1957-1965 dalam lingkup Nasional mengalami berbagai kendala. Kendala tersebut dilatarbelakangi oleh gejolak politik yang terjadi yakni, dengan terbentuknya Demokrasi Terpimpin (Ricklefs, 2005: 508). Di antara peraturan yang berubah mengenai perumahan rakyat ialah, pertama, mengenai penyerahan tugas urusan perumahan Kepada Daerah Tingkat ke-1 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958.¹⁹ Peraturan tersebut mengenai penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus perumahan di daerah-daerah dengan ketentuan yang tercantum dalam Staatsblad 1948 Nomor 33

¹⁹ Turunan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 perihal penyerahan tugas urusan perumahan kepada Daerah Tingkat ke-1. Koleksi arsip DPAD DIY.

yang sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 Nomor 32).

Kedua, mengenai peraturan pencabutan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 43) dan Undang-Undang Nomor 25 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 73) menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan.²⁰ Peraturan tersebut berisi mengenai usaha pengadaan perumahan rakyat tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Seluruh warga negara dan badan-badan swasta dapat melakukan pengadaan perumahan. Tidak hanya itu, pemerintah juga berusaha meniadakan Surat Izin Perumahan atau S.I.P. Kemudian, persetujuan sewa menyewa kini harus dilakukan bersama dengan pemilik rumah. Peraturan tersebut diundangkan karena kebutuhan akan perumahan kian terdesak, ditambah dengan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Peraturan lebih lanjut mengenai perumahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 yang mengatur mengenai hubungan sewa menyewa perumahan.²¹ Peraturan tersebut menjelaskan mengenai beberapa penghapusan peraturan lama yang tidak relevan, misalnya, penghapusan *Huurprijsbesluit* (Keputusan sewa) 1949 mengenai pedoman harga sewa, penghapusan Surat Izin Perumahan atau S.I.P. yang dinilai memberatkan birokrasi. Selain itu, dijelaskan pula mengenai hubungan antar pemilik dan penyewa rumah yang didasarkan sewa menyewa, jika terdapat perselisihan dalam penentuan harga sewa dan hubungan sewa menyewa akan dilaksanakan pengawasan oleh Pemerintah. Sementara itu, segala urusan mengenai sewa menyewa merupakan wewenang Kepala K.U.P. (Kantor Urusan Perumahan) atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Peraturan mengenai perumahan silih berganti. Pada 1964 ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 menjadi Undang-Undang.²² Peraturan tersebut didasarkan dalam tata masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perumahan merupakan unsur pokok daripada kesejahteraan rakyat, di samping sandang dan pangan. Dibutuhkannya usaha pemerintah dengan mengikutsertakan peran masyarakat baik perorangan atau swasta. Undang-Undang ini juga disebut sebagai Undang-Undang Pokok Perumahan (Yudohusodo et.al, 1991: 113).

²⁰Turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan. Koleksi arsip DPK Kota Yogyakarta.

²¹ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta.

²² Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 menjadi Undang-Undang.

Usaha mengenai pengadaan perumahan tidak hanya sebatas dalam peraturan perundangan saja. Pada 28-29 Juni 1965 dilaksanakan Konferensi Perumahan yang bertempat di Kaliurang, Yogyakarta. Konferensi tersebut didasarkan Undang-Undang Pokok Perumahan Nomor 1 Tahun 1964. Dalam konferensi membahas mengenai tiga tugas pokok bidang perumahan yakni, bidang pembangunan, bidang pemukiman, dan bidang persewaan. Kesimpulan dari konferensi tersebut ialah diperlukannya masing-masing Peraturan Pemerintah tersendiri agar fokus tiap bidang tidak terbagi.

Perumahan Rakyat di Bawah Repelita

Gejolak politik 1965 dan dengan adanya G30S yang menyebabkan lengsernya Presiden Sukarno dan digantikan oleh Soeharto menciptakan keadaan negara yang tidak stabil. Pada awal masa pemerintahan Presiden Soeharto dilakukan stabilisasi di bidang sosial, politik, dan ekonomi sebagai dasar yang kuat bagi pembangunan nasional secara berencana dan bertahap (Yudohosodo et al., 1991: 114). Stabilisasi yang dilakukan juga belum mampu untuk menanggulangi masalah perumahan. Perumahan rakyat adalah masalah Nasional (Kompas, 4 Februari 1966). Masalah mengenai perumahan mendapatkan perhatian dari dunia Internasional. Pada 7 dan 15 Oktober 1967 dilaksanakan Kongres Afro Asian Housing Organisation ke-2 di Singapura yang mendesak pemerintah negara-negara Asia dan Afrika untuk menyediakan perumahan bagi rakyat kecil (Kompas, 18 Oktober 1967). Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut akan dilakukannya uji coba pembangunan perumahan rakyat oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Pusat yakni dengan Lokakarya Direktorat Jenderal Cipta Karya mengenai perumahan rakyat di Bandung pada 1968 sebagai persiapan PELITA-1 (Pembangunan Lima Tahun) (Yudohosodo et al., 1991: 114). dalam Lokakarya tersebut dilakukan pengkajian dan persiapan mengenai perumahan rakyat. Walaupun situasi dan kondisi yang kurang memungkinkan untuk dilakukannya pembangunan perumahan rakyat, program tersebut telah masuk ke dalam PELITA-1.

Kondisi mengenai perumahan rakyat di Yogyakarta sendiri mengalami kemerosotan. Dibuktikan dengan sebanyak 60% penduduk Yogyakarta tidak memiliki rumah (Kompas, 31 Juli 1968). Penduduk yang berjumlah 400 ribu tersebut tidak memiliki hunian tetap di Yogyakarta. Mereka menumpang selama 3-5 tahun kemudian berpindah. Pemerintah Yogyakarta merespon dengan akan dibangunnya perumahan rakyat sebanyak 1500 rumah dengan harga 150 juta.

Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XLI/MPRS/1968 salah satu tugas Kabinet Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita (Ronodirdjo et.al, 1983: 131). Sektor perumahan rakyat menjadi salah satu sektor

dari tujuh belas sektor yang ada di dalam Repelita pertama tersebut. Salah satu usaha pembangunan perumahan rakyat tersebut yaitu dengan dikaitkannya perumahan dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 1968 yang berisi mengenai perumahan murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Yudohosodo et al., 1991: 114). Namun, berdasarkan harian Kompas, Pemerintah belum bermaksud untuk membangun rumah bagi masyarakat disebabkan kondisi anggaran yang tidak memungkinkan (Kompas, 4 Agustus 1970). Kegiatan pemerintah menitikberatkan dalam penelitian dan pengembangan, kebijaksanaan dan program, dan penyuluhan mengenai perumahan rakyat (Ronodirdjo et.al, 1983: 486).

Mengenai pembangunan perumahan percontohan, terutama sebagai persiapan program pembangunan perumahan skala besar telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya yang melaksanakan in-job training di berbagai daerah salah satunya di Yogyakarta yang mendapat sebanyak seribu rumah beserta lingkungan penunjang (Ronodirdjo et.al, 1983: 486). Hal tersebut juga terlihat pada Laporan Hasil-Hasil Pelita 1 di Kotamadya Dati II Yogyakarta pada 1969-1974.²³ Sebanyak 1.040 rumah telah dibangun dengan rincian berikut:

Tahun	Rumah Tinggal	Tambahan	Jumlah
1969	53.873	332	54.205
1970	54.205	343	54.553
1971	54.553	365	54.918
1972	54.918	-	-
1973*	-	-	-

*Tahun 1973 tidak tercatat.

Kemudian, pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat dilanjutkan secara berkesinambungan dan konsisten dilaksanakan dalam PELITA-II (Eryudhawan et.al, 2010: 178). Sesuai dengan GBHN-1973, kebijakan dalam perumahan rakyat diarahkan kepada usaha memenuhi kebutuhan perumahan di perkotaan ataupun di pedesaan dan usaha persebaran pembangunan perumahan yang lebih merata dari kegiatan pembangunan daerah serta menekan laju perpindahan penduduk ke kota besar (Yudohosodo et.al, 1991: 115). Dengan dasar yang lebih kuat, PELITA-II membentuk beberapa program dan lembaga agar mencapai tujuan tersebut (Ronodirdjo et.al, 1983: 486). Di antara nya yakni, dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1974 dibentuk Badan Kebijakan Nasional Perumahan Nasional (BKPN) yang bertujuan merumuskan garis kebijaksanaan dan sebagai petunjuk pelaksanaan di bidang pengembangan dan pembinaan perumahan. Bank Tabungan Negara atau B.T.N. melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/MK/IV/74 ditunjuk sebagai Bank Hipotik Negara.

²³ Hasil-Hasil Pelita 1 di Kotamadya Dati II Yogyakarta tahun 1969/1970 s.d. 1973/1974 Bappeda Tingkat II Kotamadya Yogyakarta. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Program penyediaan perumahan berlanjut dengan pembentukan badan usaha yang melibatkan kegiatan jual-beli rumah dan tanah. Pada 18 Juli 1974 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974 didirikan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perum PERUMNAS. Dalam tingkatan lokal di Yogyakarta juga mempersiapkan pembangunan perumahan rakyat yang didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1977 mengenai pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pusat Untuk keperluan Perumnas.²⁴ Dalam surat keputusan tersebut berisi mengenai proyek pembebasan tanah untuk Perumnas agar dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menjamin tercapainya jumlah rumah rakyat yang direncanakan dalam PELITA-II.

Pelaksanaan pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan Perumnas di Yogyakarta telah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 614/KPTS/1976 tertanggal 26 November 1976.²⁵ Secara garis besar ditentukan untuk pematangan lahan akan dimulai pada Agustus 1977 dan hal-hal yang berhubungan dengan pengadaan tanah akan dikoordinasikan oleh Bappeda DIY dengan instansi terkait. Melalui Surat Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, Cosmas Batubara menyatakan bahwasanya pembangunan perumahan Perumnas di Yogyakarta diperkirakan akan selesai pada bulan Juli 1978.²⁶ Pembangunan tersebut berada di daerah Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Kesimpulan

Kebijakan pembangunan perumahan rakyat didasarkan oleh upaya dekolonisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia. Pasca-kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai gejolak. Salah satunya yakni, revolusi fisik. Kondisi tersebut menyebabkan upaya dekolonisasi terhambat. Pemerintah berupaya merespons kebutuhan rakyat melalui kebijakan pembangunan perumahan rakyat.

Memasuki 1950, tonggak sejarah mengenai perumahan rakyat mengalami perubahan yang monumental dengan adanya Kongres Perumahan Sehat di Bandung. Kongres tersebut timbul atas prakarsa dari beberapa tokoh yang menghasilkan keputusan mendasar bagi perkembangan di bidang perumahan rakyat. Selain itu, kerusakan rumah pasca-perang hingga kenaikan jumlah penduduk turut mendasari dibentuknya berbagai kebijakan hingga lembaga mengenai perumahan.

²⁴ Surat Departemen Dalam Negeri Nomor BTU 6/125/6-77 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1977 mengenai pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pusat Untuk keperluan Perumnas. Koleksi Arsip DPAD DIY.

²⁵ Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K5/V2/3947/77. Koleksi Arsip DPAD DIY.

²⁶ Surat Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Nomor UM. 01 01 perihal Pembagian rumah Perumnas di Condong Catur Kec. Depok Kabupaten Sleman. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Kebijakan dan pelebagaan di Kota Yogyakarta dimulai pada 1949 dengan dibentuknya Kantor Perumahan Jogjakarta (KPJ) pada 4 Juli 1949 oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian, implementasi pembangunan dari kebijakan yang bersifat lokal dilaksanakan sejak 1951. Pembangunan perumahan rakyat juga dipengaruhi oleh berbagai gejala yang terjadi, misalnya sistem Demokrasi Terpimpin dan Peristiwa G30S. Perkembangan tersebut tidak terhenti pada Pemerintahan Sukar Nomor Melalui pelebagaan yang lebih terstruktur pada Perum Perumnas, pemerintahan Soeharto menghadirkan perumahan rakyat bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Referensi

Arsip dan Surat Kabar

Anonim. 4 Februari 1966. "Perumahan Rakyat adalah masalah Nasional", dalam harian *Kompas*.

Anonim. 18 Oktober 1967. "Th. 1968 Dept Pekerdjaan Umum Memulai Try Out Pembangunan Perumahan Rakjat", dalam harian *Kompas*.

Anonim. 31 Juli 1968. "60% Penduduk Jogja Tak Berumah", dalam harian *Kompas*.

Anonim. 4 Agustus 1970. "Pemerintah Belum Bermaksud Membangun Rumah-Rumah Untuk Masyarakat", dalam harian *Kompas*.

Daftar Pertanggung Djawab dari Keuangan Panitia Perumahan Rakjat Kotapradja Jogjakarta bulan Desember 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Daftar Pertanggung Djawab dari Keuangan Panitia Perumahan Rakjat Kotapradja Jogjakarta bulan Januari 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Hasil-Hasil Pelita 1 di Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1969/1970 s.d. 1973/1974 Bappeda Tingkat II Kotamadya Yogyakarta. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Laporan Bulanan Panitia Perumahan Rakjat Kotapradja Jogjakarta untuk bulan: Januari 1953 Nomor 36/PRKJ/53 Tahun 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Laporan Bulanan Panitia Perumahan Rakjat Kotapradja Jogjakarta untuk bulan: Desember 1952 Nomor 33/PRKJ/53 Tahun 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Laporan Bulanan Panitia Perumahan Rakjat Kotapradja Jogjakarta untuk bulan: Februari 1953 Nomor 54/PRKJ/53 Tahun 1953. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Laporan Pekerdjaan-pekerdjaan dari Inspeksi Perumahan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta bulan: Desember 1956. Koleksi arsip DPAD DIY.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta

Prodjohandoko. 20 Juni 1956. "Harga Perumahan Rakyat K.P. Jogjakarta", dalam *Kedaulatan Rakyat*.

Surat Departemen Dalam Negeri Nomor BTU 6/125/6-77 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1977 mengenai pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pusat Untuk keperluan Perumnas. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Surat Djawatan Perumahan Rakjat Nomor Jog/Lem 2/i/5 Tahun 1953 perihal uang pinjaman kepada Daerah Otonom untuk mendirikan perumahan rakyat yang diberikan pada 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Surat Inspeksi Perumahan Rakyat Djateng dan Daerah Istimewa Jogjakarta Tromolpos 132. Nomor F 8/2/6 perihal pemakaian uang pinjaman pemerintah untuk perumahan rakyat pada 1951 dan 1952. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Surat Kementerian Pekerjaan Umum Kantor Perumahan Nomor S.1/1/15 Tahun 1949 perihal Kantor Perumahan Jogjakarta. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta.

Surat Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Jogjakarta Nomor S.5/9/10 Tahun 1949 perihal Kantor Perumahan Jogjakarta. Koleksi Arsip DPK Kota Yogyakarta.

Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K5/V2/3947/77. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Surat Ketua Dewan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Peraturan-peraturan tentang urusan perumahan Nomor 9311/XV/A/53. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Surat Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Nomor UM. 01 01 perihal Pembagian rumah Perumnas di Condong Catur Kec. Depok Kabupaten Sleman. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor Kab.1/1/6 Tahun 1952 perihal Penyerahan K.P.J. kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta. Koleksi Arsip DPAD DIY.

Tjataan pertemuan antara Panitia Negara Pemeriksa Urusan Perumahan dengan instansi-instansi di Jogjakarta yang bersangkutan dengan urusan perumahan pada tanggal 12 Juni 1954 di Bangsal Kepatihan Jogjakarta. Koleksi arsip DPK Kota Yogyakarta.

Turunan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 perihal penyerahan tugas urusan perumahan kepada Daerah Tingkat ke-1. Koleksi arsip DPAD DIY.

Turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan. Koleksi arsip DPK Kota Yogyakarta

Artikel dan Buku

Cobban, J. L. (1993). Government Housing Policy in Indonesia 1900-1940. *GeoJournal*, 143-154.

Colombijn, Freek. (2011). Public Housing in Post-colonial Indonesia: The Revolution of Rising Expectations. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 442.

Colombijn, Freek. (2013). *Under Construction: The Politics of Urban Space and Housing during the Decolonization of Indonesia, 1930-1960*. The Netherlands: BRILL.

Eryudhawan, Bambang, et.al. (2010). *Kilas Balik Perumahan Rakyat 1900-2000*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Prayitno, Budi, et.al. (2012). *Kesejahteraan Rakyat atas Papan*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.

Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.

Ronodirdjo, Bustomi Hadjid, et.al. (1983). *Presiden Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Y. D. B. K. M. I.

Setiawati, Nur Aini, et.al. (2019). *Toponim Kota Yogyakarta*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Setiyawan, Idam. "Mendirikan Perumahan Rakyat: Menyiasati Kampung Kota Surabaya 1906-1990", *Tesis*, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Setyastuti, Ari, et.al. (2009). *Mozaik Pusaka Budaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.

Soemardjan, Selo. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Suparwoko. (2013). *Peningkatan Kapasitas Perumahan Swadaya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

Yosita, Lucy, et.al. (2015). *Strategi Perencanaan dan Perancangan Perumahan Pada Era Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.

Yudohusodo, Siswono, et.al. (1991). *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.

BARA DI BALIK CITRA: KEKERASAN TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI YOGYAKARTA PADA MASA REVOLUSI 1945-1949

Vennesa Theonia

vennesa.theonia@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Citra Yogyakarta sebagai wilayah yang relatif aman pada masa Revolusi, bahkan bagi etnis Tionghoa, tidak berarti Yogyakarta sepenuhnya nihil dari kekerasan. Terdapat kekerasan di Kota Yogyakarta (Kota Gede), Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman (Prambanan). Dengan studi literatur dan metode penelitian sejarah, ditemukan bahwa dua alasan utama terjadinya kekerasan adalah ambivalensi keberpihakan politik Tionghoa dengan Belanda dan kesenjangan ekonomi. Selain itu, kekerasan yang terjadi memengaruhi pandangan simpatik masyarakat Tionghoa terhadap Belanda dan kekecewaan terhadap pemerintah Republik.

Kata Kunci
Kekerasan;
Tionghoa;
Yogyakarta;
Revolusi

Abstract

The image of Yogyakarta as a relatively safe area during the Revolution, even for ethnic Chinese, did not mean that Yogyakarta was completely devoid of violence. There was violence in Yogyakarta City (Kota Gede), Bantul Regency, and Sleman Regency (Prambanan). Using literature study and historical research methods, it was found that the two main reasons for the violence were the ambivalence of Chinese political alignment with the Dutch and economic inequality. In addition, the violence influenced the Chinese community's sympathetic view of the Dutch and disappointment with the Republican government

Keywords
Violence;
Chinese-
Indonesia;
Yogyakarta;
Revolution

Pendahuluan

Yong Tjie Fong tidak mengetahui nasib yang menantinya ketika ia dikumpulkan di pendopo dari Assistent Desa Dukuh, Yogyakarta. Ketika pagi tiba, ia dan kepala rumah tangga Tionghoa lainnya berhimpit-himpit, diangkut menyusuri Gunung Gono. Matahari menunjukkan dirinya; menjadi saksi atas ajal yang akan tiba. Pertunjukan keji dimulai dari penyiksaan Liem Djien Tjong, sebelum tubuhnya ditusuki bayonet hingga tewas. Sebuah pedang besar lalu dikeluarkan, menyembelih Tjong Leng setelahnya. Pembunuhan terus terjadi satu per satu. Yong Tjie Fong dan sisa orang Tionghoa yang belum terbunuh diperintahkan untuk mengubur mayat-mayat itu (Sin Po, 31 Desember 1948).

Mereka digiring ke markas pembunuh-pembunuh itu keesokan harinya.

Di Markas dari itoe algodjo-algodjo jang kedjem, marika laloe moelai dipreksa dan katanja diexamen ... marika ditanja dengan berbagi-bagi perantjaraan dalem bahasa-bahasa Indonesia (Melajoe) kamoedian dalem bahasa Boso (Djawa). Kaloe marika bisa berbitjara dalem doea bahasa itoe dengan lantjar, maka ia diperbolehkan poelang (Sin Po, 31 Desember 1948)..

Berkat penguasaan kedua bahasa itu, Yong Tjie Fong diperbolehkan pergi. Ia berlari ke kota dan memberitahukan hal ini kepada Chung Hua Tsung Hui (CHTH) (Sin Po, 31 Desember 1948).¹

Kisah ini hanyalah salah satu anomali dalam citra harmonis hubungan Tionghoa-Jawa di Yogyakarta. Citra-citra ini dapat ditemukan dalam berbagai penelitian yang dilakukan, baik mengenai orang Tionghoa di Yogyakarta maupun Yogyakarta masa Revolusi. Mengutip Fakhri (2017), “Yogyakarta, ibu kota revolusioner, (adalah) salah satu daerah yang relatif damai dan stabil padahal di berbagai tempat tengah dilanda situasi genting yang penuh pergolakan.” Setyowati (2018) juga menyatakan bahwa pembantaian kerap terjadi di Jawa, tetapi orang Tionghoa di Yogyakarta tetap adem ayem. Klaim lain dituliskan oleh Putri (2013). Ia menyatakan bahwa penemuan prasasti Tionghoa-Jawa yang penyerahannya kepada sultan dipersiapkan sejak 1940 merupakan “bukti akan kehidupan masyarakat Tionghoa di Yogyakarta yang hidup sejahtera tanpa penindasan dan tekanan.” Namun, kutipan di awal menjadi salah satu bukti adanya celah dalam citra ini. Cerita tersebut menunjukkan adanya kekerasan yang tertuju secara spesifik kepada etnis Tionghoa.

Konteks wilayah Yogyakarta juga unik dalam kasus ini. Pada masa Revolusi, Yogyakarta merupakan ibukota Republik. Pemerintahan dipindahkan dari Batavia dan militerisasi terjadi. Oleh karenanya, terdapat banyak agen di dalamnya, seperti pemerintah

¹ Chung Hua Tsung Hui adalah asosiasi yang bertujuan menyatukan etnis-etnis Cina untuk membuat kesepakatan dan berkoperasi dengan kelompok serta organisasi lainnya.

Republik, militer Republik, tentara Belanda, dan masyarakat secara umum. Dengan berbagai agen yang ada, hubungan-hubungan di dalamnya perlu diperhatikan untuk memetakan sifat dari kekerasan ini. Penelitian ini mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, Bagaimana hubungan antara masyarakat Tionghoa dengan agen-agen lain di Yogyakarta menuju masa revolusi? Kedua, apa motif dan kepentingan di balik kekerasan terhadap Tionghoa pada masa Revolusi? Penelitian ini juga ingin menghadirkan kebaruan dalam melihat hubungan di Yogyakarta dalam aspek sosiokultural. Penemuan tersebut akan didukung oleh rekonstruksi kekerasan yang terjadi dengan memperhatikan siapa pelaku dan korban yang terlibat. Dengan demikian, diharapkan penulisan sejarah mengenai kekerasan terhadap Tionghoa ini dapat dikontekstualisasikan dengan latar Yogyakarta.

Penelitian ini mencakup studi literatur untuk memahami latar belakang kekerasan-kekerasan yang ada. Selain itu, digunakan juga metode penelitian sejarah yang mencakup proses pencarian sumber, kritik sumber, dan interpretasi. Sumber-sumber primer yang digunakan mencakup arsip koran dan foto.

Menuju Kekerasan

Kekerasan yang ada tidak terjadi dalam suatu vakum. Ia berkaitan erat dengan dinamika kehidupan yang melatarbelakanginya. Maka, untuk memahami peristiwa ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab: Bagaimana atmosfer kehidupan di Yogyakarta menuju Revolusi? Seperti apakah kelompok Tionghoa yang tinggal di Yogyakarta? Bagaimana hubungan kelompok Tionghoa dengan kelompok lain di Yogyakarta saat itu? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjelaskan keunikan Yogyakarta sebagai tempat munculnya konflik.

Yogyakarta Menuju Revolusi

Pada masa Penjajahan Jepang, atmosfer di Yogyakarta berubah. Sebelumnya, pemerintahan Belanda bergaya tenang, praktis, dan borjuis. Terdapat wibawa yang dipertahankan dengan supremasi kulit putih, rasionalisme, dan kehebatan teknologi. Namun, ketika militer Jenderal Imamura menang pada 1942, atmosfer tersebut berubah. Nilai-nilai dalam militer dan imperial Jepang, serta ideologi perwira yang keras dan radikal, menggantikannya dengan nilai-nilai kekuatan batiniah, mitos kejayaan Timur, mitos berani mati. Pada masa Belanda, pejuang hanyalah anggota-anggota hina dalam tentara sewaan. Namun, pemujaan terhadap semangat masa Jepang membuat para pejuang yang tanpa pamrih dan serba berani dilihat sebagai penjamin kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat (Anderson, 2018).

Atmosfer tersebut dinamakan gaya Kabuki. Ia adalah percampuran antara upacara-upacara yang memesona, disiplin militer, dan kekerasan yang ditampilkan di publik. Maka dari itu, zaman Penjajahan Jepang ditandai dengan berbagai parade, peringatan hari

besar yang fantastis, siaran yang berkobar-kobar, olahraga massal, dan penyebaran semboyan penggelora semangat. Nilai-nilai tersebut disebarkan lewat berbagai pendidikan dan organisasi militer yang dibentuk Jepang. Selama ia berkuasa, Jepang menutup semua lembaga pendidikan Barat. Lembaga-lembaga ini digantikan dengan pusat pendidikan tertentu. Salah satunya adalah Pembela Tanah Air (PETA) yang berdiri pada 1943 (Benda, 1983) PETA merupakan pasukan gerilya bantuan yang terdesentralisasi, beranggotakan sekitar 500–600 orang, dan tersebar sebagai pertahanan lokal semisal sekutu menyerang Jawa.

Jepang menggunakan disiplin yang keras untuk mempersiapkan pemuda-pemuda ini. Para pemuda yang dilatih menganggap latihan itu penting. Nilai-nilai Jepang memberikan alasan untuk merasionalisasi latihan tersebut. Soehoed (2018) menjelaskan:

Kemenangan atau kekalahan itu tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya tenaga tentara. Tentara yang mempunyai roh perjuangan yang menjala-njala, lagi sempurna latihannya, selamanya dapat mengalahkan musuh, meskipun tenaga tentara yang berkurang.... Demikianlah ditanamnya pengertian tentang semangat roh keperadjuiran sebagai salah satu sifat yang terpenting untuk seorang prajurit.

Selain itu, organisasi tersebut memberikan ruang bagi nasionalisme untuk tumbuh. Pelatihan ideologi meningkatkan kesadaran politik nasionalis anggota-anggotanya. Soehoed (2018) juga bercerita mengenai masa ketika ia ditanya oleh pelatih Jepang tentang dari mana asal senjata mereka. Pelatuhnya menjelaskan:

Sendjata-sendjata ini asal dari rakjat Indonesia, hasil keringat rakjat Indonesia yang diperas oleh Belanda dan dipergunakan untuk menindas rakjat itu kembali. Sekarang sendjata-sendjata ini dikembalikan kepada putera-putera Indonesia sendiri, untuk dipergunakan guna membela rakjat dan Tanah Air. Karena itu pergunakanlah sebaik-baiknya, djangan sampai mengetjewakan kepertjajaan rakjat yang telah dilimpahkan kepada putera-puteranja.

Oleh karena itu, terjadi pemusatan kekuatan-kekuatan militer dan rasa nasionalisme dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang. Tak heran menurut Anderson, bagi Belanda, masyarakat Indo, dan Tionghoa, kata “pemuda” yang sebelumnya “biasa saja” mendadak mendapatkan kesan yang menakutkan dan kejam.²

Gerakan-gerakan massa hanya perlu turun dari panggung sandiwara untuk memasuki kenyataan hidup sehari-hari. Rapat-rapat umum simbolis menentang imperialisme dan penindasan kolonial hanya perlu meninggalkan lapangan olahraga untuk lalu

² Lihat David Whel, *The Birth of Indonesia* (London, 1948), Bab 2; I.J. Brugmans, et al., eds., *Nederlandsch Indie onder Japanse bezetting: Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945* (Franeker, 1960), hlm 590.; H.J. van Mook, *The Stakes of Democracy in Southeast Asia* (New York, 1950), hlm 146-154.

menghambur ke jalan-jalan raya. Upacara solidaritas dengan Kerajaan Jepang tinggal mengubah tujuan pengabdian mereka. Pengorbanan diri, persaudaraan, dan kepahlawanan tinggal diberi kesempatan-kesempatan konkret untuk mewujudkan. Kekerasan dan kematian tinggal mengalir keluar dari ruang ceramah, program radio, dan gedung-gedung bioskop untuk memasuki rumah-rumah tahanan militer, gudang senjata, dan markas-markas tentara Jepang sendiri. Suatu impian politik sudah ada; tinggal menunggu waktu pelaksanaannya saja.

Atmosfer semacam inilah yang akan dibawa hingga perjuangan mempertahankan Indonesia pada masa Revolusi. Penjajahan Jepang dengan nilai-nilai militer dan nasionalisme, serta radikalisme pemuda yang dibawanya, menciptakan suasana yang berapi-api di masa mendatang.

Hal ini bercampur dengan sifat militer Indonesia pada saat itu. Republik Indonesia merupakan sebuah bangsa yang masih dalam proses pembentukan, tidak hanya secara administratif, tetapi juga militer. Mayoritas dari kelompok bersenjata Indonesia bukanlah institusi yang terorganisir secara ketat. Bahkan, ketika Indonesia merdeka, ia tidak memiliki tentara nasional. Pada 22 Agustus, Sukarno membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), sebuah federasi kelompok bersenjata yang belum disebut sebagai “tentara”. Pada 5 Oktober, Tentara Keamanan Rakyat (TKR), institusi bersenjata yang lebih tersentralistik dibentuk. Pada awal 1946, TKR beralih nama menjadi Tentara Republik Indonesia, dan pada Juni 1947, direorganisasi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Strategi militer dan doktrin dikembangkan berlandaskan satu tujuan, yakni mengusir tentara Belanda dan mencapai “kemerdekaan” yang sesungguhnya.

Selain milisi lokal, terdapat geng kriminal yang terkadang beraliansi dengan organisasi politik bersenjata. Kelompok-kelompok ini berkontribusi sangat besar terhadap kekerasan dari pihak Indonesia. Dengan keberadaan mereka, pemimpin politik dan militer Indonesia mendapatkan kambing hitam atas kejahatan dan pelanggaran hak-hak, meskipun hal tersebut dilakukan oleh TNI.

Oleh karena itu, periode revolusi merupakan masa yang dipenuhi semangat nasionalisme yang meletup-letup. Sebagai negara baru, konsepsi kewarganegaraan mulai dipikirkan. Berbagai kelompok dengan berbagai kepentingan mulai memikirkan peran dan posisi mereka dalam negara ini. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang termiliterisasi, tentara nasional yang cenderung baru, dan kelompok-kelompok milisi lokal, semi-militer, serta geng kriminal di tengah-tengahnya. Kondisi ini memberikan latar bagi kekerasan untuk terjadi.



Figur 1. Tentara Republik di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Sumber: Nationaal Archief.

Tionghoa di Yogyakarta

Pada 1835, Belanda menerapkan sistem zona ‘wijkenstelsel’ yang melarang orang Tionghoa untuk tinggal di luar pecinan. Orang Tionghoa di Yogyakarta pun dapat dikategorikan sebagai masyarakat urban karena banyak yang tinggal di daerah kota. Kemudian pada 1919, Belanda mencabut kebijakan tersebut. Akibatnya, terjadi perpindahan ke pinggiran kota. Namun, menurut sensus 1930, mayoritas Tionghoa—sebanyak 70 persen—masih tinggal di daerah kota. Banyak yang memilih menetap di kota karena akses fasilitas yang lebih mudah (Kwartanada, 2002: 258).

Tabel 1. Populasi Yogyakarta pada 1930

Area	Indonesia*	Eropa	Tionghoa	T i m u r A s i n g Lainnya	Total
Kota Yogyakarta %	121,979 89,3	5,593 4,1	8,913 6,5	164 0,1	136,649 100
Kesultanan Yogyakarta %	1,538,868 98,7	7,317 0,5	12,640 0,8	202 -	1,559,027 100

*Indonesia di sini merujuk kepada apa yang disebut Belanda sebagai “inlanders”

Sumber: (Kota) Volkstelling 1930, II (1933), hlm. 148-9, 160; (Kesultanan) Volkstelling 1930, II (1933), hlm. 138-9, 158; Volkstelling 1930, VIII (1936), hlm. 65 dalam Kwartananda (2002).

Komunitas Tionghoa di Yogyakarta juga bersifat heterogen. Mayoritas Tionghoa di Yogyakarta merupakan kelompok Hokkien, disusul oleh Kwongfu (Kanton) dan Hakka.

Tabel 2. Populasi Tionghoa pada 1930 di Yogyakarta berdasarkan kelompok dialek

Kelompok Dialek	Kesultanan Yogyakarta			Kota Yogyakarta		
	L	P	Total	L	P	Total
Hokkien	4,579	3,273	7,852	3,131	2,391	5,522
Kwongfu (Kanton)	723	355	1,078	618	308	926
Hakka	162	79	241	134	69	203
Tiochiu	81	60	141	43	25	68
Yang lainnya	1,402	1,326	2,728	916	958	1,864
Orang Indonesia*	2	525	527	1	292	293**
Tidak Diketahui	29	41	70	16	21	37
Total	6,978	5,659	12,637	4,859	4,054	8,913

* Pada 1930, terdapat 527 orang Indonesia yang dihitung sebagai “Tionghoa” di Kesultanan Yogyakarta. Kebanyakan adalah perempuan dan hampir pasti istri atau selir dari laki-laki Tionghoa. Dari angka tersebut, 508 adalah orang Jawa dan sisanya tidak diketahui.

** Tidak secara spesifik disebut sebagai “pribumi” di dalam sumber, hanya ditulis sebagai “bukan Tionghoa”.

Sumber: *Volkstelling 1930*, VII (1935), hlm. 287, 304 dalam Kwartananda (2002).

Dari segi ekonomi, komunitas Tionghoa di Yogyakarta sering kali bekerja dalam perdagangan dan industri. Pada 1934, sumber Belanda menyatakan bahwa jenis perdagangan ini mencakup 1) kleinhandel, atau perdagangan skala kecil di pasar atau warung, 2) marskramershandel, pedagang keliling yang mayoritas menggunakan sepeda, 3) groothandel, perdagangan skala besar, terutama dalam bidang produk agrikultur, 4) tusschenhandel, perdagangan skala menengah dengan komoditas yang bervariasi, tetapi mayoritas produk agrikultur dan peternakan, 5) middenstandhandel, atau perdagangan kelas menengah, mencakup

warung dan toko besar, serta produk kesenian, terutama batik (de Cock, 2002: 259). Tidak banyak dari mereka bekerja kepada Pemerintah Belanda karena kebijakan diskriminatif yang mengeksklusi mereka dari pekerjaan administratif.

No.	Pekerjaan	Kota Yogyakarta			Kesultanan Yogyakarta		
		Pribu- mi	Eropa	Tiong- hoa	Pribu- mi	Eropa	Tiong- hoa
1	Produksi Bahan Mentah	-	58	38	360,282	500	199
2	Industri	-	191	916	163,379	193	1,063
3	Trans- portasi	-	184	81	6,670	196	144
4	Pedagang	-	264	1,673	55,029	286	2,859
5	Partiku- ler	-	372	94	5,086	408	104
6	Pegawai Sipil	-	455	14	17,788	487	24
7	Lainnya	-	258	103	45,381	280	141
	Total	-	1,782	2,919	653,633	2,354	4,504

Catatan: Data mengenai pekerjaan masyarakat tempatan di Kota Yogyakarta tidak tersedia

Sumber: *Volkstelling, 1930*, VI (1933), hlm. 360-3; VII *1935), hlm. 358; VIII (1936), hlm. 126-7 dalam Kwartananda (2002).

Secara kultural, kelompok Tionghoa sering dibagi menjadi dua, yakni peranakan dan totok. Pada umumnya, kelompok peranakan merujuk kepada kelompok Tionghoa dengan orientasi budaya lokal dan sering kali merupakan keturunan ayah Tionghoa dan ibu lokal. Di sisi lain, totok adalah kelompok yang berorientasi ke kebudayaan Cina dan sering kali merupakan pemukim generasi pertama. Pengelompokan ini terjadi berdasarkan sebanyak apa orang tua mempertahankan budaya Cina di dalam keluarga. Budaya berbisnis juga merupakan kriteria penting. Beberapa Tionghoa kelahiran lokal juga terkadang mengidentifikasi diri mereka sebagai totok dan mengikuti jejak totok dalam perekonomian. Kedua kelompok umumnya bersifat antagonistik satu sama lain. Masing-masing memiliki pandangan yang saling merendahkan dan prasangka yang mengakar (Kwartanada, 2002: 258)

Pada 1937, Jepang melakukan aksi militer di Cina. Akibatnya, sebanyak 466 kepala keluarga dari Cina Daratan mengajukan perizinan untuk tinggal di Yogyakarta. Populasi totok di Yogyakarta pun meningkat (Kwartanada, 2002: 259).

Di sisi lain, orang-orang Tionghoa di Jawa membentuk Tjin Tjai Hwee (Dana Amal Cina) untuk mengumpulkan donasi. Dari tabel di bawah, dapat dilihat bahwa meskipun Yogyakarta merupakan kota ke-6 terbesar di Jawa, dana yang dikumpulkan lebih sedikit dibanding kota kecil seperti Cirebon dan Surakarta. Menurut Didi Kwartananda, hal ini menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa di Yogyakarta didominasi oleh peranakan. Akibatnya, komunitas Tionghoa di Yogyakarta secara umum tidak terlalu patriotik terhadap Cina Daratan. Aksi-aksi boikot terhadap Jepang di Yogyakarta juga tidak marak dilakukan (Kwartananda, 2002: 269).

Tabel 3. Dana yang dikumpulkan oleh China Funds (1937-41)

No.	Kota	Jumlah (NFL)	No.	Kota	Jumlah (NFL)
1	Batavia	4,512,446	5	Cirebon	353,365
2	Surabaya	1,763,562	6	Surakarta	219,510
3	Palembang	1,043,788	7	Lampung	211,502
4	Bandung	1,014,111	8	Yogyakarta	148,000

Sumber: 'Fonds Amal Tiongkok', Sin Po, 14 Feb. 1942 (n.p.) dalam Kwartananda (2002).

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas kelompok Tionghoa di Yogyakarta tinggal di daerah perkotaan, bersifat heterogen, bekerja dalam bidang perdagangan dan industri. Nasionalisme Cina tidak begitu marak di Yogyakarta karena kelompok Tionghoa di Yogyakarta kebanyakan

Hubungan Menuju Revolusi

Tionghoa-Jepang

Akibat perang Sino-Jepang, kelompok Tionghoa—terutama kelompok totok yang lebih patriotik terhadap Cina dibandingkan peranakan—melaksanakan aksi-aksi boikot. Pada 1927, polisi politik Belanda melaporkan bahwa terdapat boikot dan aksi teror taktis terhadap toko-toko Tionghoa yang menjual produk Jepang, seperti pencoretan dan pelemparan kotoran manusia di pintu toko. Konsul Cina, Ling Go Wang pada 1928 dan Fartsan Tsung pada 1933 juga mendiseminasi propaganda anti-Jepang ketika mereka sampai di Yogyakarta. Media-media, seperti Bintang Mataram, Kiao Seng, dan Sin Po, memberitakan konflik tersebut secara intensif (Kwartananda, 2002: 268).

Setelah Jepang mengokupasi Yogyakarta, mereka menangkap 36 figur yang diketahui telah berpartisipasi dalam gerakan anti-Jepang, seperti Liem Ing Hwie, Dr. Yap Hong Tjoen, Sie Kee Tjie, Tjie Tjing Ing, dan Oei Tik Kie. Kemungkinan otoritas Jepang mendapatkan nama-nama mereka dari nasionalis Indonesia anti-Tionghoa atau mantan anggota polisi rahasia Hindia Belanda.

Namun, setelah perubahan kekuasaan, masyarakat Tionghoa mencoba untuk mengambil posisi yang kooperatif. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah penangkapan orang Tionghoa di Yogyakarta, yakni 5 dari 536. Padahal, jumlah penduduk Tionghoa di Yogyakarta cukup tinggi (Kwartanada, 2002: 258). Pemimpin-pemimpin yang sebelumnya anti-Jepang, terutama pengusaha peranakan, memilih berkolaborasi. The Hong Oe, mantan pemimpin dari Tjin Tjai Hwee dan seorang pengusaha peranakan, menjadi pemimpin Hua Chiao Chung Hui (HCCH).³ Tjie Tjing Ing, seorang pengusaha batik dan mantan pemimpin perkumpulan rahasia Hoo Hap, bekerja sebagai propagandis HCCH. Ang Ping Gwan, pemimpin totok terkemuka dari cabang lokal Guomintang, Partai Nasionalis Tiongkok, ditempatkan sebagai penerjemah di kantor Kempeitai (Polisi Militer Jepang) karena kemampuan bahasanya. Liem Ing Hwie, pemimpin Tionghoa yang paling menonjol, dipaksa oleh Jepang untuk mengurus mesin-mesin yang digunakan di perkebunan kapas, karena ia adalah seorang insinyur mesin yang berpengalaman (Kwartanada, 2002: 271).

Kolaborasi-kolaborasi ini terjadi karena pertama, kelompok Tionghoa merupakan ‘middleman minority’, sebuah kelompok asing yang kuat secara ekonomi tetapi tidak memiliki kekuatan politik. Mereka dapat menjadi target kemarahan penduduk tempatan. Maka dari itu, mereka perlu memiliki hubungan dengan kelompok yang berkuasa pada saat itu untuk alasan keamanan. Kedua, dengan konflik yang muncul antara masyarakat tempatan dan kelompok Tionghoa, mereka merasa masyarakat tempatanlah yang perlu mereka takutkan dan bukan Jepang. Ketiga, Jenderal Imamura juga memiliki sikap yang cukup suportif dengan kelompok Tionghoa karena ia memilih untuk memanfaatkan mereka.

Tionghoa-Belanda

Setelah Nazi menginvasi Belanda pada Mei 1940, beberapa orang Tionghoa secara aktif berpartisipasi dalam gerakan pro-Belanda. Dr. Yap Hong Tjoen menjadi ketua dari Prins Bernhard Fonds dan Spitfire Fonds yang mengumpulkan dana untuk membeli pesawat tempur udara Spitfire. Beberapa orang Tionghoa juga ikut serta dalam mobilisasi rakyat Belanda. Hal-hal ini dilakukan bukan hanya karena hubungan Tionghoa-Jepang yang kurang baik, melainkan juga citra Jepang sebagai kelompok berbahaya setelah pengeboman Pearl Harbour (Kwartanada, 2002: 270).

Di Yogyakarta, setelah pengumuman dari Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Liem Ing hwie, seorang perwakilan dari Siang Hwee (Kwartanada, 2002: 262), menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Setelahnya, NIROM, stasiun radio

³ Organisasi bentukan Jepang yang bertujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi Cina.

nasional Belanda, menyiarkan lagu kebangsaan Cina, Sanmin Zhuyi. Hal ini meninggalkan kesan yang membekas kepada para penduduk Tionghoa. Pada 11 Desember 1941, Gubernur Adam memberikan pidato di depan berbagai kelompok, termasuk kelompok Tionghoa, meminta mereka untuk berpartisipasi secara aktif untuk melindungi Hindia-Belanda dari invasi Jepang. Ia juga meminta pemilik toko Tionghoa di Malioboro secara spesifik untuk memperbolehkan tentara berlindung di toko mereka (Kwartanada, 2002: 270).

Selain itu, terdapat kolaborasi-kolaborasi lain dari kelompok Tionghoa. Berdasarkan inisiatif dari Siang Hwee, kelompok Tionghoa membentuk pertahanan diri sipil yang disebut *Chineesche Burgerfront Organisatie* (CBO) pada 30 Desember, yang dipimpin oleh Liem. CBO memiliki empat bagian yang bertanggung jawab untuk (i) propaganda, (ii) membantu pekerjaan polisi, (iii) kegiatan kesejahteraan sosial seperti mengatur makanan dan bantuan medis untuk orang miskin dan tunawisma, dan (iv) perlindungan serangan udara, pemadam kebakaran, dan pertolongan pertama. Lebih lanjut, sekelompok wanita Tionghoa bertugas sebagai perawat dalam kelompok pertahanan rumah wanita yang disponsori Belanda, COVIM (*Commissie voor de Organisatie van Vrouwenarbeid in Mobilisatietijd*). CBO mengumpulkan 5.000 NFL dalam waktu dua hari dan pemerintah Belanda memberikan apresiasi (Kwartanada, 2002: 278).

Kedekatan dan pembentukan CBO ini menarik perhatian kelompok nasionalis Indonesia. Mereka memandang badan tersebut sebagai simbol kolaborasi antara kelompok Tionghoa dan Belanda. Bagi banyak kelompok nasionalis, Jepang akan datang sebagai pembebas. Di sisi lain, siapapun yang berhubungan erat dengan Belanda adalah musuh, dalam kasus ini, kelompok Tionghoa totok.

Tionghoa-Republik

Ketika Jepang membentuk organisasi multi-etnis, Gerakan 3A, kelompok totok, peranakan, dan Arab tertarik untuk berpartisipasi. Namun, kelompok Indonesia tidak ingin dikelompokkan dengan keturunan asing. Maka dari itu, Jepang membentuk setiap kelompok etnis organisasinya masing-masing. Untuk Tionghoa, dibentuk Hua Chiao Tsung Hui (HCTH). Pada 8 Mei 1942, ketua dari 10 organisasi Tionghoa dikumpulkan dalam suatu rapat.⁴ Tsuda Fumio, staf dari Sendenbu Yogyakarta, menyatakan bahwa Jepang menginginkan

4 (i) Hoa Kiao Societeit Mataram, sebuah perkumpulan rekreasi (ii) Hua Chiao Tsing Nien Hui, sebuah organisasi pemuda yang berbasis di sekolah-sekolah Tionghoa (iii) Hoo Hap Hwee Koan, sebuah organisasi gotong royong (iv) Hiap Gie, sebuah perkumpulan pemakaman (v) Pak Hoo Tong, juga sebuah perkumpulan pemakaman (vi) Chung Hsioh, sebuah perkumpulan untuk para siswa yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda (vii) Ai Shung Chi, sebuah kelompok olah raga (viii) Rukun Kampung Tionghoa Tugu, sebuah organisasi gotong royong (ix) Kong Khauw Hwee, sebuah badan keagamaan (x) Tiong Hoa Hwee Koan, sebuah perkumpulan pendidikan.

menginginkan semua organisasi yang ada untuk dileburkan menjadi satu institusi yang merepresentasikan komunitas Tionghoa. Dalam propaganda HCTH, dituliskan:

. . . karena keinginan Administrasi Militer Jepang untuk menyatukan semua bangsa Asia, maka tidak mengherankan jika melihat munculnya organisasi Tionghoa yang tidak didasarkan pada prinsip 'peranakan untuk peranakan' dan 'totok untuk totok'. Semua kelompok sekarang bergabung bersama di dalam HCTH, sebuah pusat bersama untuk orang Cina yang tidak hanya menyatukan orang Cina tetapi juga menyediakan cara untuk menawarkan semua sumber daya manusia masyarakat kepada pemerintahan Jepang untuk mencapai Asia Timur Raya (Sinar Matahari, 15 Januari 1943).

Kelompok inilah yang akan menjadi Chung Hua Tsung Hui (CHTH) setelah kekalahan Jepang. CHTH menyatakan bahwa tujuannya adalah menyatukan orang Tionghoa untuk meningkatkan posisi ras Tionghoa, mempromosikan kemakmuran dan kesejahteraan, dan membuat pengaturan untuk bekerja sama dengan kelompok dan organisasi lain. Maka dari itu, organisasi ini menjadi penghubung komunitas Tionghoa dengan Republik Indonesia. Di Yogyakarta, pada 2 Januari 1946, pemimpin-pemimpin CHTH mengadakan kontak-kontak bersahabat dengan pemerintah lokal. Beberapa dari mereka melakukan pertemuan dengan Sultan Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, dan Komite Nasional Indonesia (KNI) untuk menjalin ikatan (Kwartanada, 2002: 71). Tionghoa-Republik

Namun, dalam tatanan akar rumput, hubungan tidak selalu harmonis. Terdapat kompetisi sengit dalam aspek ekonomi. Pada 1932, Gubernur van Gesseler Verschuur menyebutkan 3 pebisnis agrikultur Jawa dari Yogyakarta yang substansial, yakni Soeroredjo, Martosentono, dan Djiwokarijo (Kwartanada, 2002: 259). Namun, hanya Soeroredjo, dengan pengalaman bekerja di perusahaan Tionghoa, yang berhasil bertahan dari kompetisi dengan pedagang Tionghoa. Kompetisi terjadi di berbagai bidang. Dengan begitu, para nasionalis mulai khawatir akan pasar yang didominasi Tionghoa (Kwartanada, 2002: 266).

Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor dari aksi-aksi kekerasan terhadap Tionghoa pada masa peralihan dari Belanda ke Jepang. Dalam memoarnya, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menyatakan bahwa setelah ia sampai di Jawa Barat, beberapa orang Tionghoa melaporkan bahwa toko-toko mereka telah dijarah setelah kejatuhan kekuasaan Belanda. Kekerasan-kekerasan ini mengejutkan karena kelompok Tionghoa menganggap hubungan mereka dengan kelompok masyarakat tempatan harmonis, sehingga kekerasan tidak diantisipasi dalam masa peralihan tersebut (Twang, 1998: 72) Kelompok religius dan nasionalis yang radikal juga bukanlah kekuatan

yang signifikan di Yogyakarta sebelumnya. Hanya terdapat organisasi nasionalis moderat dengan fokus kejawaan dan organisasi religius moderat seperti Muhammadiyah dan Partai Islam Indonesia yang memainkan peran dominan.

Salah satu tugas polisi militer Jepang adalah untuk mengembalikan ketertiban. Itu menjadi alasan mereka tidak menyetujui kekerasan anti-Tionghoa. Jenderal Imamura juga menyatakan bahwa kelompok Tionghoa dapat meminta bantuan Jepang jika “kehidupan (mereka) terancam oleh kelompok masyarakat tempatan” (Kwartanada, 2002: 70). Dengan begitu, kelompok Tionghoa mulai merasa bahwa bukan Jepang yang perlu mereka takuti, melainkan para masyarakat tempatan (Goan, 1945: 20–25).

Perlu dicatat bahwa kekerasan ini tidak merepresentasikan posisi Republik Indonesia. Pemerintah Republik tidak menyetujui aksi anti-Tionghoa ini. Pada 14 September 1948, CHTH seluruh republik berkumpul di CHTH Yogyakarta, dikunjungi oleh Presiden Sukarno, menteri penerangan, menteri kemakmuran, Wk. Konsul New Shu Chun, dan orang-orang Tionghoa terkemuka. Dalam pidatonya, Sukarno menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha menjamin dan melindungi keamanan penduduk Tionghoa. Ia juga menyatakan bahwa sebagai langkah nyata, pemerintah akan mempertinggi keamanan penduduk dengan menghidupkan kembali rukun-rukun tetangga di seluruh daerah yang masih dikuasai Republik (Hariwarta, 8 Agustus 1948). Selain itu, kelompok Tionghoa merupakan salah satu kelompok yang diundang oleh Sultan ketika mendapatkan berita Proklamasi Kemerdekaan. Dalam pertemuan itu, Sultan menyampaikan pesan bahwa mereka harus berjaga-jaga sehingga tidak terjadi kerusuhan di Yogyakarta.

Dapat dilihat bahwa hubungan pada masa menuju Revolusi sangatlah kompleks. Namun, secara umum, dapat disimpulkan bahwa terdapat bibit-bibit kekerasan dikarenakan hubungan Tionghoa-Belanda yang dianggap dekat oleh kelompok nasionalis. Selain itu, kompetisi ekonomi di Yogyakarta cukup sengit dan kelompok nasionalis telah mengungkapkan kekhawatiran akan posisi Tionghoa dalam pasar.

Kasus-Kasus Kekerasan

Meskipun Pemerintah Republik dan Sultan telah menjamin keamanan masyarakat Tionghoa, kekerasan tetap terjadi pada masa Revolusi. Yogyakarta dikenal sebagai kota yang relatif aman bagi kelompok Tionghoa dibandingkan daerah-daerah lain di Jawa. Sering kali, ia menjadi tempat tujuan pengungsian dari berbagai daerah. Namun, ini bukan berarti tidak ada kekerasan yang terjadi.

Selain cerita mengenai pengalaman Yong Tjie Fong, terdapat kasus-kasus lain. Pada 24 Desember 1948, gedung CHTH Yogyakarta

dipenuhi oleh pengungsi-pengungsi dari Prambanan, Salam, dan Muntilan. Terdapat 200 pengungsi dari Prambanan yang diangkut dengan truk-truk militer Belanda. Ketika Yogyakarta dan Solo diduduki oleh tentara Belanda, sikap masyarakat tempatan mulai berubah. Konvoi-konvoi militer Belanda yang datang dari jurusan Solo maupun Yogyakarta sempat berhenti di Prambanan. Di antara mereka, terdapat tentara Belanda yang meminta keterangan dari penduduk Tionghoa. Tentara Indonesia pun menjadi marah dan menganggap bahwa masyarakat Tionghoa telah memberikan bantuan kepada tentara Belanda. Dikatakanlah bahwa mereka adalah kaki-tangan Belanda. Masyarakat Tionghoa akhirnya diancam untuk diungsikan agar tidak dapat mengadakan perhubungan dengan tentara Belanda. Mereka pun memilih untuk mengungsi dengan tentara Belanda. Mereka diangkut dengan truk-truk. Rumah-rumah mereka diserbu setelah mereka meninggalkan Prambanan. Pengalaman tersebut serupa dengan pengungsi-pengungsi dari Muntilan (Sin Po, 31 Desember 1948).

Kwa Hong Bing, penduduk Tempel yang kebetulan berada di Yogyakarta, mendengar bahwa terdapat penyingkiran 200 masyarakat Tionghoa satu jam setelah tentara Belanda memasuki wilayah tersebut. Aksi ini dilakukan oleh “pemuda yang bersenjata bambu runcing”. Namun, ketua CHTH tidak berupaya untuk memperlambat penyingkiran tersebut. Pada 25 Desember 1948, sebagian pengungsi tersebut ditemukan di Desa Belumbang. Mereka dipencar di berbagai desa. Mereka ditemukan oleh Kwa Hong Bing yang berangkat dengan beberapa tentara Belanda dan sejumlah tank. Sesampai mereka di Belumbang, mereka bertanya kepada seorang petani, lalu menemukan para pengungsi di satu rumah dengan kondisi yang “sangat menyedihkan”. Masih terdapat 40 penduduk Tionghoa yang belum dapat ditemukan (Sin Po, 31 Desember 1948).

Terdapat pula perampokan “kaum tani dan golongan hartawan” di Kota Gede. Beberapa mayat ditemukan di tempat-tempat tertentu. Namun, kota tersebut kosong setelahnya. Kebanyakan dari mereka mengungsi ke Imogiri (Sin Po, 31 Desember 1948).



Figur 2. Pengungsi dari Bantul yang dibawa ke Kota Yogyakarta oleh tentara Belanda Sumber: Nationaal Archief

Pada 31 Desember 1948, diberitakan bahwa penduduk Tionghoa di Bantul telah hilang (Sin Po, 31 Desember 1948). Ternyata, 500 orang Tionghoa tersebut telah diangkut oleh tentara Republik. Mereka lalu dikumpulkan di suatu sekolah. Namun, tentara Belanda datang dan membawa mereka ke Yogyakarta.⁵

Kasus-Kasus Kekerasan

Seperti yang dibahas sebelumnya, Yogyakarta adalah kota dengan penduduk Tionghoa yang mayoritas peranakan. Kelompok ini ditandai dengan penguasaan bahasa tempatan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di markas kepada Yong Tjie Fong dan orang-orang Tionghoa lainnya merupakan salah satu upaya untuk memilih target. Ia menunjukkan siapa sebenarnya orang-orang yang menjadi target kekerasan. Dalam kasus ini, dapat diprediksi bahwa target kekerasan merupakan kelompok Tionghoa totok. Gelombang migrasi kelompok totok pada 1937 dapat menjadi hal yang mencolok di tengah-tengah populasi Tionghoa Yogyakarta yang peranakan. Bibit-bibit konflik seperti kesenjangan ekonomi dan keberpihakan politik yang cenderung identik dengan Tionghoa totok dapat melandasi aksi tersebut.

Selain itu, kasus-kasus pengungsian dari Prambanan dan Muntilan menunjukkan bahwa agresi muncul akibat anggapan atas ambivalensi keberpihakan politik. Masyarakat Tionghoa pada saat itu memiliki stigma sebagai kelompok yang dekat dengan Belanda. Dengan kehadiran tentara-tentara Belanda yang berhenti untuk bertanya kepada penduduk sekitar, pandangan tersebut dapat dengan mudah dipandang sebagai salah satu bentuk kolaborasi. Dengan atmosfer nasionalisme yang tinggi dan keberadaan tentara Indonesia yang saat itu bertujuan mengusir tentara Belanda, pandangan itu cukup untuk mengundang amarah.

Kekerasan yang berlandaskan faktor ekonomi juga terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus perampokan-perampokan di Kota Gede dan kekerasan yang terlibat di dalamnya. Masa Revolusi yang menjadi masa transisi memberikan latar bagi kemunculan kekerasan-kekerasan ini.

Kekerasan juga terjadi dalam kasus-kasus “pengungsian”. Pengungsian merupakan hal yang cukup lumrah dilakukan pada Masa Revolusi, ketika terdapat kemungkinan adanya konflik terbuka dan masyarakat perlu dipindahkan. Kata “pengungsian” tersendiri memiliki konotasi yang baik.⁶ Namun, bukan berarti pengungsian selalu berujung kepada keamanan mereka yang diungsikan. Dalam memorandum

⁵ DLC Liberation of Bantool Chinese and Their Evacuation to Djokja, 12 Dec 1948, 2.24.04.03, 15098, Fotocollectie Dienst voor Legercontacten Indonesië, Nationaal Archief, The Hague.

⁶ Menurut KBBI, ia dimaknai sebagai aksi penghindaran (penyingkiran) diri dari bahaya atau penyelamatan diri (ke tempat yang dirasa aman).

CHTH mengenai kekerasan terhadap kelompok Tionghoa pada masa Revolusi, dituliskan:

Mereka dipenjara, diinternir atau ditangkap tanpa alasan apa pun. Mereka sering diusir dari tempat tinggalnya dan digiring ke hutan atau tempat yang jauh atau penjara tanpa diberi makan. Faktanya, orang Tionghoa yang sekarang tinggal di wilayah Republik seperti sandera yang tidak berani bergerak atau berbicara karena takut dibunuh, diculik, atau dipenjara. Ketika seorang Tionghoa diculik, dia hanya memiliki kesempatan yang sangat tipis untuk dibebaskan. Ketika dia dibunuh, mayatnya akan menghilang.⁷

Selain itu, salah satu artikel kolom komentar Sin Po juga menuliskan bahwa berdasarkan pengalaman yang ada, orang-orang yang dibawa mengungsi tidak jarang sebagian atau seluruhnya dibunuh (Sin Po, 30 Desember 1948).

Penggambaran ini membuat “pengungsian” lebih tepat dimaknai sebagai campuran dari penculikan, penyanderaan, dan pembunuhan. Ini membuat penggambaran terhadap pengungsi-pengungsi dari Tempel yang dikumpulkan di suatu rumah di Blambangan—yang disebut berada dalam “kondisi menyedihkan”—akurat.

Pelaku-pelaku dari kekerasan ini juga beragam. Dalam sumber tertentu, digunakan terma “algodjo”. Mereka digambarkan sebagai masyarakat tempatan yang membunuh menggunakan bayonet dan pedang. Terdapat juga pemuda dengan bambu runcing dan tentara Indonesia. Keragaman ini menggambarkan adanya sentimen yang berasal dari berbagai kelompok, tidak hanya tentara Republik. Dalam lanskap militer Yogyakarta pada saat itu, kelompok-kelompok yang aktif juga bervariasi, mulai dari tentara, milisi lokal, hingga geng kriminal.

Kebanyakan kasus terjadi di daerah pinggiran Yogyakarta, seperti Bantul, Prambanan, Imogiri, Kota Gede, dan Muntilan. Korban-korban ini kebanyakan diungsikan ke daerah kota. Kemungkinan, ini dikarenakan Sultan dan pemerintah Republik telah mengutarakan kesediaan mereka untuk memberikan perlindungan. Daerah kota lebih dekat dengan kekuasaan Sultan dan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut lebih mudah untuk ditegakkan.

Musuh dan Sekutu: Pandangan Masyarakat Tionghoa

Dengan terjadinya kasus-kasus kekerasan, masyarakat Tionghoa mulai membentuk ide mengenai siapa yang dianggap musuh dan sekutu. Pandangan mengenai Republik dan Belanda sangat dipengaruhi oleh

⁷ Chung Hua Tsung Hui, Memorandum Outlining Acts of Violence and Inhumanity Perpetrated by Indonesian Bands on Innocent Chinese Before and After the Dutch Police Action was Enforced on July 21, 1947, 7.

kasus-kasus tersebut.

Setelah maraknya kasus, pandangan kelompok Tionghoa terhadap Republik memburuk. Terdapat kekecewaan besar. Sebagaimana tertulis dalam kolom komentar Sin Po:

Doeloe boeat itoe peristiwa-peristiwa jang manjedihkan orang bisa dimpahken sebagian jang terbesar tanggoengan djawab pada pamerentah Repoeblik. Bagimana sekarang? Pamerentah Repoeblik practisch soeda tida ada lagi. Pembesar-pembesar Repoeblik jang soeda tida pegang kakoeasaan, tida bisa mamerentah, nistjaja tjoema bisa angkat poendak. Siapa jang haroes bertanggungdjawab bagi semoea pemboenoehan, perampokan, penjoelikan, paksaan mengoengsi, pembakaran dan sebagianja boeat karoeagiannja pendoedoek Tionghoa? (Sin Po, 30 Desember 1948).

Republik dan masyarakat tempatan dipandang sebagai kelompok yang berbahaya karena masyarakat Tionghoa mengalami persekusi yang lebih serius ketimbang pada masa penjajahan Jepang. Ketakutan juga muncul ketika Mayor-Jenderal Soetomo memperingatkan para masyarakat Tionghoa yang tinggal di daerah kekuasaan Belanda melalui radio Yogyakarta bahwa “ratusan ribu saudara-saudara mereka masih hidup di bawah rezim Republik Indonesia”.⁸

Pandangan tersebut terlihat jelas dari pemberitaan media Tionghoa terhadap tentara Indonesia. Sin Po menuliskan:

Kaoem tani dan pendoedoek desa menderit sanget heibat kerna perboeatannja bangsanja sendiri. Kaoem tani dan pendoedoek desa dipaksa menjerahken barang makanannja dan diwadjibken masak oentoek kaperloean tentara. Semoea boeah-boeahan dan daon-daon dari papoehoenan jang bisa dimakan moesti dipetik dan diserahkan kapada tentara oentoek persediaan makanannja. Desa-desa jang sekarang didjadien poesat pertahanan tentara Indonesia, pendoedoeknja ngalamken penderitaan heibat. Rasa tida soeka terhadap tentara sekarang kaliatan moelai meloeas, hingga ada kamoengkinan jang perhoeboengan antara kaoem tani dan pendoedoek desa di satoe fihak dengan tentara repoeblik di lain fihak, bisa djadi tambah genting (Sin Po, 31 Desember 1948).

Tidak adanya respons dari pemerintah⁹ membuat masyarakat Tionghoa putus asa. Mereka pun beralih kepada Belanda. Sebagaimana ditulis di kolom komentar Sin Po:

Dalem keadahan seperti sekarang Hoakiauw nistjaja tida bisa laen dari anggep bahoea pamerentah Blanda heroes bertanggungdjawab. Dari itoe Hoakiauw aken merasa perloe minta dengan lebih keras dari doeloe pada pamerentah Blanda soepaja keslametannja Hoakiauw di saloeroe Djawa dan Sumatra didjamin sebagaimana

⁸ Chung Hua Tsung Hui, Memorandum Outlining Acts, 7.

⁹ Memorandum Outlining Acts of Violence and Inhumanity Perpetrated by Indonesian Bands on Innocent Chinese Before and After the Dutch Police Action was Enforced on July 21, 1947, 6.

moestinja ... soepaja Hoakiauw jang tinggal dalem desa-desa dimana tida bisa ditempatin tentara lekas diangkoet ka tempat jang lebih slamet, dan soepaja orang-orang jang dioengsiken lekas ditjari sampe dapet dimerdikaken lagi (Sin Po, 30 Desember 1948).

Dalam pemberitaan kebanyakan kasus, Belanda dianggap sebagai sekutu. Sering kali ketika pengungsian terjadi, tentara-tentara Belandalah yang dihubungi untuk membantu. Hal ini dapat dilihat dari kasus di Bantul, ketika tentara Belanda merebut pengungsi yang ditawan tentara Republik ke Yogyakarta. Hal serupa terjadi di Prambanan, ketika tentara Belanda membawa masyarakat Tionghoa ke Yogyakarta setelah mendapatkan ancaman dari tentara Republik. Selain itu, ketika tidak ada gedoran besar-besaran, penculikan, maupun teror di Prambanan, masyarakat Tionghoa beranggapan bahwa ini adalah akibat dari ketakutan tentara Republik atas diketahuinya aksi mereka oleh tentara Belanda karena muncul pada siang hari (Sin Po, 31 Desember 1948).

Ketika masyarakat Tionghoa di Tempel disingkirkan, Sin Po mengabarkan:

Orang merasa manjesel jang Ketoea C.H.T.H di sana waktoe trima prentah boeat mengoempoelken pendoeboek Tionghoa oentoek dioengsikan, tida bisa tjari daja-oepaja oentoek melambatkan penjingkiran itoe. Begitoe poen koetika tentara Blanda masoek di Tempel dan menanjaken tentang keadahannja pendoeboek Tionghoa, ketoea C.H.T.H. jang ternjata tida ikoet dioengsiken tida maoe memberiken katerangan kaloe pendoeboek Tionghoa baroe sadja disingkirken, hingga kaloe itoe ketones minta bantoeannja tentara Blanda boeat meneloeng, tentoe masi bisa direboet kembali dari tangannja orang-orang Indonesia kerna jang menggiring marika itoe hanja bebrapa pamoedan jang bersendjata bamboe roentjing.¹⁰

Sebagaimana tertulis dalam Sin Po, masyarakat Tionghoa memandang keberadaan tentara Belanda sebagai simbol keamanan. Hal ini menyebabkan pengharapan masyarakat Tionghoa secara otomatis berkontradiksi dengan tujuan Republik yang ingin mengusir tentara Belanda:

...soepaja tempat-tempat dimana ada pendoeboek Tionghoa bila soeda didoeboek oleh tentara Blanda heroes didoeboek teroes oleh itoe tentara sampe kaslametan pendoeboek di itoe tempat betoel-betoel terdjamin...(Sin Po, 30 Desember 1948).

Karena kegagalan pemerintah dalam menjamin keamanan di berbagai tempat, bagi kelompok Tionghoa, keamanan dapat diperoleh dengan penguasaan Belanda terhadap suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah terjadi, seperti bagaimana terdapat beberapa bantuan dari Belanda, salah satunya adalah pengiriman dana kepada CHTH (De Nederlander, 30 Agustus 1947). Kegagalan Republik juga memberi

10 Memorandum Outlining Acts of Violence, 6.

justifikasi bagi tentara Belanda untuk “mempertahankan ketertiban”

Konklusi

(Algemeen Handelsblaad, 30 Agustus 1947). Hal ini dapat menjelaskan ambivalensi keberpihakan dalam komunitas Tionghoa.

Meskipun Yogyakarta dikenal sebagai wilayah yang relatif aman bagi masyarakat Tionghoa, tidak berarti kekerasan tidak terjadi. Kekerasan pernah berlangsung saat perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang dan terjadi lagi pada masa Revolusi. Kekerasan ini muncul akibat hubungan-hubungan yang ada di Yogyakarta sebelum masa Revolusi, yakni kedekatan masyarakat Tionghoa dengan Belanda akibat sentimen anti-Jepang dan persaingan ekonomi yang ketat.

Kekerasan yang terjadi dalam berbagai kasus ditargetkan kepada Tionghoa totok, meskipun pada kenyataannya cukup banyak Tionghoa peranakan yang menjadi korban. Penargetan ini bisa jadi tidak dilakukan secara sadar, tetapi merupakan manifestasi dari tensi-tensi yang sudah ada sebelumnya. Dalam kasus tertentu, pembunuh membebaskan masyarakat Tionghoa yang membaaur dengan berbahasa Melayu dan Jawa, kemungkinan karena jumlah peranakan yang tinggi di Yogyakarta. Selain itu, kekerasan biasanya dilandasi kekesalan atas apa yang dianggap sebagai bentuk kolaborasi dengan Belanda oleh tentara Republik, sebagaimana terjadi di Prambanan dan Muntilan. Kekerasan juga terjadi kepada “hartawan” di Kota Gede dan pengusaha-pengusaha lainnya.

Kegagalan pemerintah Republik untuk menegakkan rasa aman di berbagai tempat memengaruhi keberpihakan masyarakat Tionghoa. Berbagai kekerasan dilakukan oleh tentara Republik, pemuda, dan masyarakat tempatan lainnya. Atas dasar keputusan ini, kelompok Tionghoa mengharap bantuan Belanda. Dalam berbagai kasus, tentara-tentara Belanda membantu pencarian pengungsi Tionghoa yang hilang dan mencegah kekerasan dilakukan oleh tentara Indonesia. Dengan begitu, sebagian besar masyarakat Tionghoa berharap agar tentara Belanda menguasai wilayah-wilayah tertentu agar terciptanya keamanan. Hal ini tentu berlawanan dengan semangat zaman pada masa itu dan tujuan yang ingin dicapai oleh Republik. Namun, kekerasan yang terjadi menjelaskan sentimen tersebut.

Referensi

Arsip Surat Kabar

Algemeen Handelsblad, 30 Agustus 1947. Diakses melalui www.delpher.nl.

Chung Hua Tsung Hui, Memorandum Outlining Acts of Violence and Inhumanity Perpetrated by Indonesian Bands on Innocent Chinese Before and After the Dutch Police Action was Enforced on July 21, 1947.

Bataviaasch Handelsblad, 10 Oktober 1879.

DLC Liberation of Bantool Chinese and Their Evacuation to Djokja, 12 Dec 1948, 2.24.04.03, 15098, Fotocollectie Dienst voor Legercontacten Indonesië, Nationaal Archief, The Hague, <http://hdl.handle.net/10648/8eb6b657-cd84-eff5-1353-493ef35c67d7>

De Nederlander. 30 Agustus 1947. Diakses melalui www.delpher.nl.

Hariwarta. 8 Agustus 1948.

Sin Po. 30 Desember 1948.

_____. 31 Desember 1948.

Oei, The Tjiang. Januari 1943. "Hua Chiao Chung Hui." Dalam Sinar Matahari.

Artikel dan Buku

Anderson, Benedict R. (2018) *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang Dan Perlawanan Di Jawa, 1944-1946*. Serpong, Tangerang: Marjin Kiri.

Benda, Harry J. (1983) *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*. Dordrecht etc., The Hague: Foris Publications.

Fakih, Farabi. (2017). *Keraton dan Rakyat: Kerja Sama Menuju Kemerdekaan Indonesia*. In Fakih, F., Margana, S., Sasi, G. A., Utama, W. S., & Winardi, U. N. (Ed.), *Gelora di Tanah Raja: Yogyakarta pada Masa Revolusi 1945-1949* (hlm. 4). Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa.

Goan, Tan Po. (1945). "Chinese Problem in Indonesia." Essay. In *The Voice of Free Indonesia*, 20–25. Djakarta, Indonesia: Kementerian Informasi dan Informatika.

Kwartanada, Didi. (2002). "Chinese Leadership and Organization in Yogyakarta during the Japanese Occupation." *Southeast Asian Minorities in the Wartime Japanese Empire*.

Kwartanada, Didi. (2002). "Competition, Patriotism and Collaboration: The Chinese Businessmen of Yogyakarta between the 1930s and 1945."

Depdikbud. (1991). Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Depdikbud.

Suryadinata, Leo. (1999). Political thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995: a Sourcebook. Singapore: Singapore University Press.

NIOD, KITLV, and NIMH. (2022). "The War in Indonesia 1945-1949." Essay. In Beyond the Pale Dutch Extreme Violence in The Indonesian War of Independence, 1945-1949. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Oei, The Tjiang. (1943). "Hua Chiao Chung Hui." Sinar Matahari, January 15.

Putri, C. D. (2013). Prasasti Tionghoa Jawa sebagai Simbol Hubungan Baik Masyarakat Tionghoa dan Kasultanan Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

Setyowati, U. (2018). Perjanjian Dwikewarganegaraan: Kehidupan Etnis Tionghoa di Kota Yogyakarta (1950-1970). In Ilmu Sejarah vol. 3 no. 3 (p. 363). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Twang, Peck Yang. (1998). The Chinese Business élite in Indonesia and the Transition to Independence, 1940-1950. Kuala Lumpur, Malaysia: Oxford University Press.

BOOK REVIEW

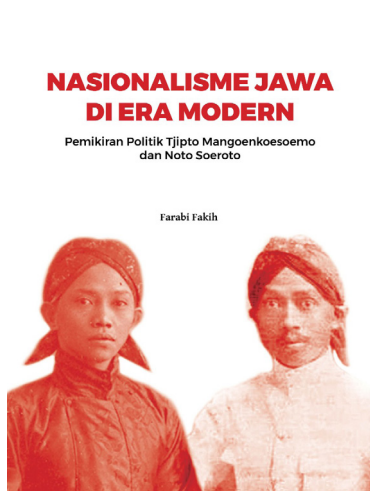
Nasionalisme Jawa di Era Modern: Pemikiran Politik Tjipto Mangoenkoesoemo dan Noto Soeroto

Ryan Adi Parameswara

Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
ryanadiparameswara@mail.ugm.ac.id

Nasywa Naurah Alawal

Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
nasywanaurahalawal@mail.ugm.ac.id



Judul

Nasionalisme Jawa di Era Modern: Pemikiran Politik Tjipto Mangoenkoesoemo dan Noto Soeroto

Penulis

Farabi Fakhri

Penerbit

Penerbit Terang

Halaman

xvi+176 halaman

ISBN

978-602-51805-7-6.

Narasi tentang historiografi pergerakan nasional sering kali ditulis secara linear seolah-olah berlangsung melalui satu koridor yang berkembang secara teleologis. Namun, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa ada nilai-nilai nasionalisme lain yang muncul pada masa awal pergerakan kemerdekaan. Velde (2005: 205–221) menjelaskan proliferasi tersebut disebabkan arus pertukaran gagasan politik dan budaya dari berbagai tempat di dunia. Hal ini, dalam konteks Indonesia awal abad XX, mendorong muncul dan berkembangnya berbagai spektrum politik, mulai dari Nasionalisme Jawa hingga komunisme. Di dalam buku ini, Farabi Fakhri menunjukkan nasionalisme Jawa sebagai bentuk pemikiran nasionalisme pertama yang muncul di kalangan bumiputra. Gagasan ini lahir sebagai bagian dari teosofisme-politik yang diminati oleh kelas atas Jawa pada awal abad XX.

Nasionalisme Jawa dinilai sebagai bentuk transformasi dari tradisi Jawa prakolonial yang dibalut dengan konsep pemikiran modern agar lebih mudah diterima masyarakat saat itu. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Noto Soeroto merupakan dua tokoh pada masa pergerakan kemerdekaan yang memiliki pemikiran bernapaskan nasionalisme Jawa. Namun, mereka berdua memiliki pandangan yang berseberangan.

Secara politis, Tjipto lebih agresif dan dikategorikan sebagai salah satu nasionalis Indis di satu sisi juga pejuang masyarakat akar rumput layaknya Boedi Oetomo di sisi yang lain. Sementara itu, Noto Soeroto merupakan seorang aristokrat sejati lebih bersifat elitis dan pergerakan politiknya cenderung “lunak” terhadap pemerintah kolonial.

Perbedaan karakteristik pemikiran Tjipto dan Noto tidak lepas dari latar belakang masing-masing tokoh yang sangat berbeda. Tjipto merupakan priayi Jawa kelas menengah yang dilahirkan di Jepara, daerah pesisir Utara Jawa. Secara psikis, orang-orang pesisiran dinilai lebih kosmopolitan (Triyanto, dkk., 2019: 69). Hal ini sangat mungkin mempengaruhi pemikiran Tjipto yang agresif dan mudah menerima hal-hal baru yang ia dapat melalui pendidikan Barat. Sebagai priayi kelas menengah, ia masih berhak menerima pendidikan Eropa sehingga termasuk dalam golongan orang berpendidikan. Tjipto dinarasikan sebagai seorang priayi kelas menengah yang memahami budaya Barat secara agresif, dalam artian dia berusaha menyesuaikan konsep kekuasaan Jawa dengan keinginannya untuk melakukan demokratisasi dan melepaskan diri dari kolonialisme.

Sementara itu, Noto Soeroto memiliki karakteristik pemikiran politik yang lebih elitis karena dilahirkan di lingkungan Kadipaten Pakualaman. Selain menerima pendidikan Barat, Noto mempelajari budaya Jawa secara mendalam karena pendidikan yang didapatnya di Pura Kadipaten. Hal ini berlainan dengan Tjipto yang meskipun priayi, jauh dari pendidikan mengenai budaya Jawa secara mendalam. Noto yang elitis, menilai bahwa melalui pendidikan Barat, Jawa dapat dibimbing pada kemajuan. Namun, di sisi yang lain, ia menolak gagasan tentang demokrasi. Hal ini sejalan dengan latar belakang sosialnya sebagai seorang aristokrat Jawa yang mendasarkan pemikiran politiknya pada konsep kekuasaan Jawa. Jadi implikasi pendidikan Barat oleh kedua tokoh menghasilkan pandangan yang berbeda.

Melalui proyek ilmu pengetahuan kolonial yang dimulai sejak abad ke-19, terjadi perubahan kondisi sosial dan pendidikan bagi para priayi dan aristokrat Jawa. Kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan menggunakan bahasa Belanda sangat terbuka untuk orang-orang Jawa kalangan atas. Menurut Farabi Fakhri dalam buku ini, keluarga bangsawan, termasuk keluarga Pakualaman, memiliki keinginan kuat untuk mengirimkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah Belanda. Hal itu mereka lakukan karena menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk mempertahankan kelas mereka sebagai bangsawan Jawa. Implikasinya, pendidikan lama model pesantren yang ditekuni orang-orang Jawa bergeser dengan pendidikan modern ala Barat.

Kaum intelektual Jawa tradisional yang lazimnya terdiri dari para pujangga telah kehilangan kontrol atas legitimasi mereka sendiri disebabkan oleh diskursus saintifik Eropa yang lebih mapan dan rasional. Kendatipun hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat Jawa, proses ini jelas sangat berpengaruh. Perlahan, kalangan atas Jawa yang sebelumnya memiliki pandangan tradisional Jawa bergeser menuju pandangan modern Barat. Ranggawarsita, sebagai contoh, seorang penyair terakhir Jawa dalam salah satu karyanya, *Serat Kalatidha*, berbicara mengenai Jawa yang dikutuk tidak dapat memahami kekuatan modern sebagai akibat dari hilangnya kekuatan atau tradisi peradabannya. Karya itu menyiratkan bahwa dunia tradisional Jawa sedang dalam kondisi sekarat dan memberikan ruang bagi rasionalisme Barat untuk berkembang.

Etnis Jawa sebenarnya sudah dapat dianggap mampu untuk membentuk rasa kebangsaan dan negara-bangsa sendiri di luar Indonesia, tetapi mereka malah meleburkan diri meneruskan sebuah proyek kebangsaan sipil. Masalah ini sempat disinggung oleh Farabi Fakih dalam pengantar buku ini, ia berpendapat bahwa keputusan etnis Jawa untuk melakukan ‘bunuh diri’ kebangsaan itu merupakan sesuatu yang punya efek panjang. Tradisi kesusastraan Jawa yang sudah ada selama setidaknya satu milenium, sebagai contoh, akan mengalami kematian pasca 1940-an, ketika orang Jawa sendiri berhenti menulis sastra berbahasa Jawa dan mengalihkannya pada sastra berbahasa Indonesia. Ketakutan juga muncul dari kalangan aristokrat Jawa, terdapat perasaan bahwa mereka sedang menuju kejatuhan karena modernisasi birokrasi pemerintahan serta pergeseran menuju negara teknokratis yang semakin hari semakin mengancam. Efek modernitas dikhawatirkan oleh aristokrat di kalangan pemuda Jawa karena pengajaran model Barat akan membuat mereka kekurangan pengetahuan akan budaya Jawa.

Meskipun nasionalisme Jawa tidak dipilih sebagai identitas imajiner pada masa pergerakan kemerdekaan, nilai-nilai Jawa masih diadopsi ke dalam nasionalisme modern pasca-Indonesia merdeka. Hal ini terlihat melalui simbol-simbol kenegaraan yang mencerminkan beragam ikon dan imaji Jawa; mulai dari Garuda, Rupiah, Pancasila, sampai Bhinneka Tunggal Ika, serta perayaan kejayaan Majapahit sebagai salah satu mitos historis negara-bangsa Indonesia. Perayaan terhadap artefak kultural ke-Jawa-an menunjukkan ketertarikan akan kebudayaan dan nasionalisme Jawa yang terus terbina dalam Republik Indonesia merdeka. Farabi Fakih juga memantik sebuah pertanyaan apakah budaya politik Orde Baru sebenarnya telah mengambil beberapa aspeknya dari nasionalisme Jawa di masa akhir kolonial. Obsesi Orde Baru untuk membangun citra bangsa dilakukan melalui perayaan kebudayaan, terutama kebudayaan Jawa, pembangunan fisik, pendidikan di sekolah, serta melalui hubungan Soeharto dan keterlibatannya dalam dunia mistisisme Jawa. Dengan demikian, obsesi Soeharto ini bertindak layaknya Sultan Jawa yang ingin menyatukan keseluruhan Indonesia sebagai perluasan dari ‘Keraton Jawa’-nya. Hal ini mungkin sekali bukan produk dari masa-masa pra kolonial, melainkan sebuah reaksi atas kondisi modern, yang muncul ke permukaan setelah 20 tahun dominasi materialisme historis.

Meskipun telah menjelaskan pandangan Tjipto dan Noto secara komprehensif, tetapi Farabi Fakih tampaknya luput menjelaskan rasionalisasi relasi mereka dengan tokoh lain yang berbeda pandangan. Salah satunya hubungan antara Tjipto dengan Douwes Dekker. Sebab, meskipun dalam buku tersebut Tjipto disebut sebagai seorang nasionalis Indis, dalam banyak hal ia termasuk orang-orang yang memperjuangkan hak masyarakat akar rumput layaknya para tokoh Boedi Oetomo. Berlainan dengan Douwes Dekker pendiri Indische Partij yang meskipun juga menentang kolonial, tetapi lebih menitikberatkan pada pertanyaan rasional mengenai hubungan negara koloni dengan pemerintah kolonial Belanda. Di sisi lain, Indische Partij juga dianggap bersifat elitis karena didirikan oleh seorang Indis dan banyak dari anggotanya yang juga kalangan Indis. (Purwanto, 2021: 165–166). Jawaban yang paling masuk akal mengenai pertanyaan di atas adalah adanya kemungkinan bahwa baik Tjipto maupun Douwes Dekker meminggirkan subjektivitas masing-masing individu sehingga mereka dapat berkolaborasi.

Bagaimanapun, buku ini memiliki arti penting dalam historiografi Indonesia dengan memberi gebrakan besar terhadap narasi besar bangsa yang diingat sebagai memori kolektif masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sebab, buku ini menyajikan anomali nasionalisme terutama nasionalisme Jawa yang dalam penulisan sejarah Indonesia saat

ini terpinggirkan atau bahkan tidak pernah diperhatikan. Hal itu membuat buku ini memperkaya pandangan kita terhadap masa pergerakan nasional di samping narasi besar yang telah terbentuk. Bagi pembaca, buku ini memiliki arti penting untuk menambah wawasan mengenai nasionalisme Jawa. Sebuah konsep nasionalisme yang diilhami dengan modernitas serta bangsanya diakui oleh pemerintah kolonial sebagai bangsa yang sudah siap untuk membentuk negara sendiri. Hal inilah yang menarik karena buku ini kemudian menjelaskan mengapa negara yang terbentuk saat ini justru berbentuk kesatuan dan bukan negara Jawa.

Nasionalisme Jawa sebagai anomali pergerakan nasional memiliki dinamika yang kompleks. Munculnya rasionalitas turut andil dalam proses konsepsi nasionalisme Jawa ini. Implikasinya, beberapa aspek dalam budaya Jawa terkikis oleh pengaruh Barat di satu sisi, akan tetapi para aristokrat Jawa berusaha untuk mempertahankan beberapa nilai kultural yang masih dapat disesuaikan dengan modernitas di sisi yang lain. Implikasi yang pertama ini kemudian diikuti oleh keresahan-keresahan priayi Jawa terpelajar karena dunia mistis yang telah melingkupi keberlangsungan hidup nenek moyang mereka selama berabad-abad mulai luntur. Sedangkan implikasi kedua menghadirkan satu konsep nasionalisme yang unik karena diilhami oleh jiwa zaman yang bercorak modern tetapi juga bercampur budaya lokal. Menariknya, dalam beberapa waktu terlihat dinamika politiknya melewati batas jiwa zaman itu sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya keberagaman pandangan mengenai arah politik nasionalisme Jawa, apakah harus menentang kolonial, ataukah harus berdamai dengan kolonial guna menciptakan masyarakat Jawa yang modern dalam konteks mengikuti perkembangan kebudayaan Barat.

Referensi

Purwanto, Bambang. 2021. “*Ki Hadjar Dewantara, Berpolitik dengan Akal Budi dan Hati Nurani.*” *Patrawidya* 22(2): 159–180.

Triyanto, dkk. 2019. “*Masjid Menara Kudus: Refleksi Nilai Pendidikan Multikultural pada Kebudayaan Masyarakat Pesisiran.*” *Jurnal Imajinasi* 13 (1): 69–76.

Velde, te Henk. 2005. “*Political Transfer: An Introduction.*” *European Review of History*, Vol 12: 205–221.

